

kk
kk-2
DIS.03/10
Us0
a

DISERTASI

ANALISIS STRUKTURAL ATAS KONFLIK DAN KEKERASAN ETNIS DI SAMPIT

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



SIDIK RAHMAN USOP

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2009**

**ANALISIS STRUKTURAL ATAS KONFLIK
DAN KEKERASAN ETNIS
DI SAMPIT**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Selasa
Tanggal : 5 Mei 2009
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**SIDIK RAHMAN USOP
NIM. 0999167 D**

LEMBARAN PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 29 Mei 2009

Oleh

PROMOTOR



Prof. A. Ramlan Surbakti, M.A, Ph.D

NIP.130 701 133

KO-PROMOTOR



Prof. Dr. Irwan Abdullah

NIP.131 851 818

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Doktor Tahap I (Tertutup)

Tanggal 7 Maret 2009

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Dr. L. Dyson, Drs., M.A

Anggota : Prof. Ramlan Surbakti, Drs., M.A.,Ph.D

Prof. Dr. Irwan Abdullah

Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si

Prof. Dr. Setya Yuwano, M.A

Prof. Dr. Mustain Mashud, Drs., M.Si

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomer : 345/H3/KR/2009
Tanggal : 27 Maret 2009**

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya sampaikan rasa hormat yang mendalam kepada Prof. Ramlan Surbakti, Drs, MA, Ph.D selaku Promotor dan Prof. Dr. Irwan Abdullah selaku Ko-Promotor atas perhatiannya selama membina dan membimbing serta secara konsisten menyediakan waktu untuk saya berkonsultasi. Kepada mereka berdua, saya sampaikan penghargaan atas dukungan dan semangat dalam meningkatkan kemampuan akademik saya.

Rektor Universitas Airlangga, Prof.H. Fasich, Apt. dan mantan Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Med. Puruhito, dr. SpB, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program doktor.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, SH, MS, beserta staf; mantan direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Prof. Dr. Muhamad Amin, dr. SpP(K) atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa program doktor Ilmu Sosial.

Saya juga menyampaikan rasa hormat yang mendalam kepada para pengajar S3 Ilmu Sosial atas perhatian dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di program Pasca Sarjana Unair. Mereka adalah Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA, Prof. Dr. Hotman Siahaan, Dede Oetomo, Ph.D, Daniel T. Sparringa, Drs, M.A, Ph.D dan Prof. Dr. Lorentius Dyson Penjalong, Drs, M.A

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Lorentius Dyson Penjalong, Drs. M.A, yang senantiasa memberikan dorongan kepada penulis untuk dapat mempercepat selesainya program doktor ini.

Penghargaan juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Thomas Santoso, M.Si atas kesediaannya mengikuti semua tahapan proses ujian disertasi, dan kepada Prof. Dr. Setyo Yuwono Sudikan dan Prof. Dr. Mustain, Drs, M.Si atas kesediaannya dalam memberikan koreksi dan masukan dalam perbaikan disertasi

Khusus kepada tokoh masyarakat yang telah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam, yaitu kepada Sabran Akhmad, KMA. M. Usop, Dewin Marang, Esra Pahan, Fedlik Aser dan Lewis KDR atas informasi dan kesediaannya untuk berdiskusi, selama berlangsungnya penelitian ini. Demikian pula terhadap During dan Hendrick yang banyak bercerita mengenai peristiwa pada saat berlangsungnya konflik etnik di Sampit. Terima kasih dan penghargaan yang besar saya sampaikan juga kepada warga Madura, seperti Abdul Wahid, Sahriansyah, Tumi, Martijo, dan Lorat atas kesediaannya dalam memberikan informasi berkaitan dengan konflik etnik di Sampit.

Kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Camat Kota Baamang, Camat Mentawa Baru dan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur saya sampaikan terima kasih atas kesediaannya menerima saya selama melakukan penelitian di sana. Demikian juga kepada LMMDD-KT Kabupaten Kotawaringin Timur, Yayasan Pahaga Petak Danum dan Majelis Adat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kepada teman-teman kuliah, di antaranya Dr. Eka Suaib, M.Si, Dr. I.B. Putera Manuaba, M. Hum, Dr. Suko Susilo, M.Si dan Dr. Lukmono Hadi, M.Si yang selalu memberikan dorongan agar saya dapat menyelesaikan studi ini.

Terhadap dukungan teman-teman ini, selayaknya saya memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sangat mendalam.

Akhirnya, kepada istri dan anak-anak yang tercinta saya sampaikan penghargaan yang sangat dalam atas kesetiaan dan pengorbanan mereka selama saya menyelesaikan studi serta semua keluarga yang telah memberikan dukungannya kepada saya.

RINGKASAN

RINGKASAN

Analisis Struktural atas Konflik dan Kekerasan Etnis Di Sampit

Sidik Rahman Usop

Penelitian mengenai Analisis Struktural Atas Konflik dan Kekerasan Etnis Di Sampit, dilatarbelakangi oleh adanya fenomena konflik dan kekerasan antara orang Dayak dengan orang Madura yang terjadi di Kalimantan Tengah. Konflik dan kekerasan etnis tersebut berlangsung sejak tahun 1982-2000. Dari 15 kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, terdapat 4 kasus yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Konflik dan kekerasan yang terjadi pada tahun 2001, bersifat komunal dan secara faktual telah membangkitkan budaya mengayau yang sudah tenggelam sejak Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894 di Kabupaten Kapuas. Rapat Damai Tumbang Anoi tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan *hakayau* (saling potong kepala), *habumu* (saling Bunuh) dan *hajipen* (saling memperbudak) yang terjadi antara sesama orang Dayak. Selain itu disepakati pula penyeragaman hukum adat dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Fakta sosial yang terjadi di Sampit ini, menimbulkan dua hal penting yang dipertanyakan dalam disertasi ini, yaitu : *pertama*, bagaimana proses terjadinya konflik antara orang Dayak dengan orang Madura di Sampit ? *kedua*, sejauhmana faktor struktural dapat menyebabkan terjadinya konflik etnis antara Dayak dan Madura di Sampit ?

Penjelasan terhadap ketiga masalah di atas, dilakukan dengan menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser. Teori konflik dari Dahrendorf (1957) menitik beratkan pada dominasi peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, berdampak pada kesenjangan sosial akibat distribusi sumberdaya yang tidak merata. Keadaan ini disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu (*interest group*) yang menyatu dengan kepentingan negara, sehingga dapat mengabaikan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, posisi negara bersifat memaksa terhadap warga masyarakat untuk mengikuti kehendak para penguasa sehingga terjadi stabilitas (*imperatively coordinated association*).

Pemikiran Lewis Coser (1964) menyebutkan bahwa konflik akan membangun pengakuan terhadap identitas kelompok (*group identity*) dan batas-batas budaya, sehingga mendorong terjadinya integrasi dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, penguatan rasa permusuhan disebabkan oleh rasa memiliki dari anggota terhadap kelompoknya, dan keadaan seperti ini dapat menjadi kebencian sosial. Kebencian tersebut langsung dilawan oleh anggota kelompok dengan mengatakan bahaya, sebagai upaya memelihara kesinambungan kelompok. Pemikiran Coser ini melahirkan perasaan *in group* dan *out group* yang memperkuat identitas kelompok (*group identity*) dan batas-batas budaya (*cultural boundaries*) sebagai penyumbang terjadinya konflik.

Teori konflik yang dikembangkan oleh Dahrendorf dan Coser melihat integrasi dan konflik sebagai keadaan yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat dan mendorong keseimbangan dan konsensus, serta perubahan dalam struktur atau dunia sosial. Dengan demikian terjadi dinamika struktur yang digerakan oleh kelompok masyarakat.

Dinamika struktur dalam pemikiran di atas, dikembangkan oleh Ritzer (1996) dengan menggabungkan pemikiran pada tataran makro-obyektif, yang mempelajari

obyek dalam bentuk nyata (*a thing*) seperti negara, institusi, kelompok masyarakat dan pengaruhnya terhadap individu dan pemikiran individu; dan makro-subyektif yang menyelidiki transformasi ekonomi, politik, sosial dan budaya, termasuk keadaan struktur dan historis yang mengalami perubahan akibat dinamika struktur yang dibentuk oleh dialektika antara aktor dan struktur. Guba dan Lincoln (1994) menyebutkan bahwa untuk memahami (*understanding*) dialektika antara aktor dan struktur tersebut harus dibangun dengan cara dialogis serta memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif pada tingkat analisisnya.

Studi mengenai konflik etnis di Sampit ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder yang bersifat makro-obyektif. Sedangkan untuk data yang bersifat makro-subyektif dilakukan dengan wawancara langsung dengan metode dialog untuk memahami dinamika struktur, yaitu dialektika antara aktor dalam struktur untuk melakukan perubahan terhadap struktur..

Beberapa temuan penting dari hasil analisis struktural atas konflik etnis di Sampit ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, dalam proses terjadinya konflik, meningkatnya intensitas konflik etnis adalah akibat lemahnya kondisi organisasi, meliputi : tidak adanya pengakuan mengenai adanya konflik etnis di Sampit (*technical condition*), lemahnya kemampuan tokoh masyarakat untuk mengembangkan kesepakatan dalam mengendalikan konflik (*political condition*) dan tidak tersedianya ruang dialog untuk menyampaikan kepentingan dan permasalahan dari kedua etnis yang bertikai (*social condition*).

Kedua, kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi untuk memperbesar pendapatan daerah, telah menimbulkan kesenjangan sosial yang merupakan faktor penyebab terjadinya konflik sosial di tingkat masyarakat. Kesenjangan sosial tersebut adalah konsekuensi dari kebijakan model pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang menciptakan ketergantungan pemerintah dengan pemilik modal. Kondisi ini melemahkan peran pemerintah atau negara untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah harus berani keluar dari ketergantungan dan aliansinya dengan pengusaha dan mendorong pengusaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dengan melakukan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Ketiga, dominasi peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat telah mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan pengusaha. Akibatnya terjadi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap kepunahan flora dan fauna; pelanggaran terhadap hak-hak adat masyarakat atas tanah dan menghilangkan sumber pendapatan masyarakat yang bersumber dari lingkungan hutan tersebut.

Hubungan antara negara dengan pengusaha ini telah mengabaikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang seharusnya juga sebagai penerima manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Karena itu dominasi negara ini akan mendorong munculnya gerakan-gerakan sosial untuk melakukan perubahan terhadap sistem yang membelenggu kehidupan mereka. Oleh karena itu, upaya untuk mengamankan investasi dan hasil-hasil pembangunan, negara melalui militer melakukan pengamanan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

Keempat, tekanan-tekanan ekonomi dan politik terhadap kelompok masyarakat telah menimbulkan kesadaran yang mendorong munculnya solidaritas etnis yang dibangun dengan atribut-atribut budaya untuk melakukan perlawanan terhadap keadaan yang merugikan kelompok mereka tersebut. Proses transformasi untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang membelenggu kehidupan mereka dapat berimplikasi pada konflik etnis ketika identitas kelompok etnis yang dibangun terus disosialisasikan dan ditanamkan sebagai batas-batas budaya yang memperbesar jarak sosial dengan kelompok etnis lainnya.

Kelima, ketimpangan sumberdaya etnis akan memperbesar ruang bagi kelompok etnis yang diuntungkan untuk memperluas pengaruhnya melalui kerjasama dengan elite politik sehingga mereka mendapat perlakuan istimewa (*priviledge*). Sebaliknya kelompok etnis yang merasa dirugikan akan memperkuat identitas kelompok etnis untuk melakukan perlawanan terhadap sistem yang merugikan mereka. Identitas kelompok etnis yang dirugikan sangat rentan terhadap mobilisasi kelompok kepentingan sehingga kondisi seperti ini sangat berpotensi menimbulkan konflik etnis.

SUMMARY

Structural Analysis of Ethnic Conflict and Violence in Sampit

Sidik Rahman Usop

The research about structural analysis of ethnic conflict and violence in Sampit has background conflict phenomena and violence between Dayak people and Madura people that was occurred in the Central of Kalimantan. The ethnical conflict and violence has occurred since 1989-2000. From 15 cases in Central of Kalimantan, there were 4 cases that occurred in Kabupaten Kotawaringin Timur.

Conflict and violence that occurred in 2001 has communal nature and factually has raised “mengayau” culture that has been stopped since Peace Agreement of Tumbang Anoi in 1894 at Kabupaten Kapuas. That Peace Agreement of Tumbang Anoi has been stopped the action of hakayau (cutting the head each other), habunu (killing each other) and hajipen (enslaving each other) that occurred between Dayak people. Beside that, it has been agreed also the uniforming custom law in the settlement of conflict around the community.

This social fact that occurred in Sampit emerging two important matters questioned in this dissertation that are: *first*, how the conflict occurrence process between Dayak people and Madura people in Sampit? *Second*, how far the structural factor can cause any ethnical conflict between Dayak and Madura in Sampit?

The explanation about the three problems above is held by using conflict theory from Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser. Conflict theory from Dahrendorf (1959) emphasizing the domination of state role in ruling the community life, which has social inequalities because unevenly resource distribution. This condition is caused by interest of specific group that attached to the state interest, thereby it ignores the community interest. In this matter, the state position has imperative nature to the community member to follow the desire of the rulers (man in power) to create stability (imperatively coordinated association) .

The Lewis Coser’s theory (1964) asserted that conflict would develop the acknowledgement of group identity and cultural boundaries, thereby supporting integration in the community life. Otherwise, the strengthening of hostility feeling is caused by possessive feeling of group member that this condition can raise social hatred. That hatred immediately responded by community member by saying dangerous condition, as the effort to keep the sustainability of group. This Coser theory creates in group and out group feeling that strengthen the group identity and cultural boundaries as the booster of conflict occurrence.

Conflict theory that was developed by Dahrendorf and Coser saw integration and conflict as the condition that always occurred in the community life and supports the balancing and consensus and changes in the structure or

social world. Thereby there is any structure dynamics that is driven by community group.

Structure dynamics in the theory above was developed by Ritzer (1996) that mixed the theories in the macro-objective field, studying object in the tangible form such as state, institution, community group and the influence in the individual and individual thinking; and macro-subjective studying the transformation of economic, politic, social and culture, included the structure and history condition that has change because the impact of structure dynamics that is formed by dialectical between actor and structure. Guba and Lincoln (1994) asserted that to understand the dialectic between actor and structure must be developed dialogically and mixed the quantitative and qualitative approach in the analysis level.

This study about ethnical conflict in Sampit used quantitative approach with collected secondary data that has macro-objective nature. While for data that has macro-subjective nature was collected by direct interview with dialogue method to understand the structure dynamics, namely dialectic between actor and structure to make reformation in the structure.

Some important findings from structural analysis result on this ethnical conflict in Sampit are as follows: First, in the process of conflict occurrence, the increasing of ethnic conflict was caused by weakness of organization condition, which consists of: there were not any acknowledgment about the conflict occurrence in Sampit (technical condition); the weakness of leaders groups capability to develop any agreement in controlling the conflict (political condition) and unavailability of dialogue room to express the interest and problems from the conflicted parties (social condition).

Second, the development policies that concentrated on the economic growth to increase local revenue have caused the emergence of social inequality that was one factor of cause of social conflict occurrence in the community level. That social inequality is the consequence of development policy that concentrated on economic growth that creates any dependence of government with capital owner. This condition decreases the government or state roles to improve the life level of community. Therefore to cope with this inequalities/gap the government must escape from the dependence and alliance with businessman and support the businessman to implement their social responsibilities to the community with doing any efforts to create independent community.

Third, Domination of government role in regulating the community life has supported the using of nature resources as much as possible for the interest of government and businessman. It caused uncontrolled natural resources using that make any damage in the physical environment such as the extinction of flora and fauna; the violation of custom rights of community of the soil and carry away the community income resource that come from the forest environment.

The relationship between state and businessman have ignored the community as development actor that must be also the receiver of usefulness of development results. Therefore the domination of state can support the emergence of social movements to make reformation in the system that has fettered their life. Thereby the effort to keep the investment and development results make the state

through military force doing any securing action through violent action to the community.

Fourth, the economic and political pressure to the community group have cause any awareness that encourage the emergence of ethnical solidarity that is created with cultural attribute to made against the condition that disadvantaging them. Transformation process to make against on structure that has fettered their life can has implication in ethnical conflict when their established ethnic group identity continually socializing as cultural boundaries that increase the social gap with other ethnic groups.

The five, discrepancy of ethnical resource will increase the room for ethnic group that get the advantage to extend their influence through cooperation with political elite thereby they can get any privilege. Otherwise the ethnical group that feel disadvantaged will strengthen the ethnic group identity to make against the system that disadvantaging them. Identity of ethnic group that is disadvantaged is very susceptible to the mobilization of group interest thereby it has potential to create ethnic conflict.

ABSTRACT

ABSTRACT

Structural Analysis of Ethnic Conflict and Violence in Sampit

Sidik Rahman Usop

Study about ethnic conflict and violence in Sampit has been emphasized on the effort to explain about: (1) How the occurrence of ethnic conflict in Sampit (2) How far the structural factor causing the ethnic conflict between Dayak and Madura ethnic in Sampit. The two issues above were explained with structural analysis that is the part of social fact paradigm that based on the positivism perspective to explain social reality. The analysis object is social structure, institution, and that impact in the individual thinking and action.

Some important finding from this research are: *first*, in the process of conflict occurrence, there were some weaknesses in organization condition that are there were not any acknowledgment about the conflict occurrence; the lack of capabilities of leaders groups to develop regulatory agreement of conflict, such as providing dialogue space to achieve agreement between each group in conflict; there was not any mediator or arbitrator as conflict regulator. *Second*, from the structural analysis could be know that : (1) development policy that was centered on the economic growth to increase local revenue, have caused the emergence of social inequality that was one factor of cause of social conflict occurrence in the community level. (2) Domination of government role in regulating the community life through forest resources exploitation policy have caused the alliance of government to the entrepreneurs but make any disadvantages of local community, it was the predisposition factor of ethnic conflict occurrence. (3) Economical and political pressure that have been experienced by Dayak ethnic have supported the emergence of institution in the community level as the realization of their collective consciousness. The purpose was to make any changes to the government domination that has been damaged their interests. (4) Interest conflicts between political elit have supported the occurrence of ethnic conflict in Sampit by mobilizing the ethnical group. Madura ethnic as the politic mass power in Sampit was faced to the Dayak ethnical mass to make change in the leadership structure. *Third*: from the composite of Dahrendorf and Coser conflict theory it was known that the weakness of organization condition and disappointed to the government for privilege of other ethnic have supported the conflict intensity and violence.

Keywords: *Authority, conflict and violence, social change.*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Lembaran Pengesahan	iii
Halaman Panitia Penguji	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Ringkasan	viii
Summary	xi
Abstract	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

1.1.1. Realitas Sosial	4
1.1.2. Permasalahan	10
1.1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.1.4. Kontribusi Teoritik yang Diharapkan.....	11

1.2. Kerangka Pemikiran

1.2.1. Penelitian Terdahulu	12
1.2.2. Kekerasan Etnis	18
1.2.3. Gerakan Keagamaan	29
1.2.4. Negara sebagai Mesin Produksi Kekerasan	31

1.2.5. Kajian Teori Struktural	37
1.2.6. Teori Yang Digunakan	44
1.3. Metode Penelitian.	
1.3.1. Jenis Penelitian	47
1.3.2. Lokasi Penelitian	49
1.3.3. Pemilihan Subjek Penelitian	50
1.3.4. Pengumpulan data	58
1.3.5. Analisis Data.....	65

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2.1. Kondisi Wilayah.....	68
2.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan	74
2.3. Struktur Ekonomi Wilayah	81
2.4. Pembangunan Kehutanan	87
2.5. Pembangunan Perkebunan	99
2.6. Kependudukan dan Distribusi Sumberdaya Etnis	103
2.7. Kesejahteraan Masyarakat.....	111

BAB III PROSES TERJADINYA KONFLIK ETNIS DAN KEKERASAN

DI SAMPIT

3.1. Kronologis Terjadinya Konflik Etnis.....	114
3.2. Dampak Konflik Etnis	120
3.3. Respons Masyarakat Dayak Terhadap Konflik Etnis	125
3.4. Respons Masyarakat Madura Terhadap Konflik Etnis	133

BAB IV MARJINALISASI DAN ISOLASI POLITIK ORANG DAYAK	
4.1. Pandangan Terhadap Orang Dayak	143
4.2. Kebijakan Pembangunan dan Marjinalisasi Orang Dayak.....	151
4.3. Gerakan Melawan Isolasi Politik	160
BAB V ANALISIS STRUKTURAL ATAS KONFLIK DAN KEKERASAN ETNIS DI SAMPIT	
5.1. Ketimpangan Pembangunan	169
5.2. Dampak Pembangunan Kehutanan	172
5.3. Dinamika Politik Lokal	176
5.4. Ketimpangan Sumberdaya Etnis	180
5.5. Batas-Batas Budaya dan Menguatnya Identitas Etnis	183
5.6. Intensitas Konflik dan Kekerasan.....	187
BAB VI. SIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK	
6.1. Simpulan	189
6.2. Temuan Penelitian.....	190
6.2. Implikasi Teoritik.....	192
6.3. Kontribusi Pengembangan Ilmu Pengetahuan.....	197
6.4. Penelitian lanjut.....	199
6.5. Keterbatasan Studi.....	199
DAFTAR PUSTAKA	201
GLOSSARY.....	206

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Karakteristik Tindakan Kekerasan dalam Masyarakat.....	36
Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.....	69
Tabel 2.2	Luas Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Kecamatan	72
Tabel 2.3	DAS yang Belum Terjangkau Jalan Darat dan Komunitas Penduduk.	73
Tabel 2.4	Luas Lahan dan Produksi Padi di Kabupaten Kotawaringin Timur	78
Tabel 2.5.	Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga yang Berlaku ...	81
Tabel 2.6.	Ditribusi Sektor Pertanian Atas Dasar Harga yang Berlaku	82
Tabel 2.7	Perkembangan Pendapatan Perkapita.....	83
Tabel 2.8.	Total PDRB Perkapita, Pendapatan Perkapita dan laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah.....	84
Tabel 2.9.	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Kalimantan Tengah dari Sub Sektor Kehutanan.....	85
Tabel 2.10	Penerimaan Kalimantan Tengah dari Sub Sektor Kehutanan, Tambang dan Perkebunan	85
Tabel 2.11	Rekapitulasi Konflik Suber Daya Alam Tahun 1990-1996.	88
Tabel 2.12	Peringkat 10 Kelompok Besar Usaha Perakayuan Menurut Pemegang HPH Tahun 1997/1998.....	89
Tabel 2.13.	Produksi Kayu Bulat, Kayu Gergajian, Plewood dan Moulding	91
Tabel 2.14	Produksi Hasil Hutan Ikutan Sumber Penghasilan Keluarga di Kabupaten Kotawaringin Timur	92
Tabel 2.15.	Kasus Pelanggaran Hak Adat di DAS Seruyan	94
Tabel 2.16	Dampak Eksploitasi Hutan Oleh HPH Terhadap Masyarakat.....	97
Tabel 2.17	Data Lahan Kritis di Propinsi Kalimantan Tengah	98
Tabel 2.18	Perkebunan Kelapa Sawit yang Sudah Beroperasi di Kotawaringin Timur	100
Tabel 2.19	Data Sebaran Konflik Perkebunan Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	101
Tabel 2.20	Penduduk Kotawaringin Timur Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin Sex Ratio, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk.....	104
Tabel 2.21	Penduduk Hasil SP 2000 Menurut Sektor Pengembangan Wilayah Kotawaringin Timur.....	105
Tabel 2.22	Penduduk Propinsi Kalimantan Tengah Hasil SP 2000	106
Tabel 2.23	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasidi Kabupaten Kotawaringin Timur.....	107
Tabel 2.24.	Mobilitas Penduduk Ke Sampit	107
Tabel 2.25	Jenis Usaha Penduduk Berdasarkan Kelompok Etnis	109
Tabel 2.26.	Jumlah Suara Lima Partai Politik Kabupaten/Kota pada Pemilu 1999 untuk Anggota DPRD TK II.....	110
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 1999 Berdasarkan Kabupaten dan Persentase Penduduk Kalimantan Tengah	112
Tabel 3.1	Kronologis Konflik Etnis Di Sampit.....	115
Tabel 3.2	Korban dan Kerugian Harta benda dalam Konflik dan Kekerasan Enis di Sampit	121
Tabel 5.1.	Sejarah Transformasi Budaya Dayak	179

GAMBAR

Gambar 1. Contexts of Etnician Categorization.....	23
Gambar 2. Model Deprivasi Progresif.....	34
Gambar 3. Modifikasi Model Turner : Gabungan Teori Konflik Dahrendorf dan Coser	46
Gambar 4. Kesatuan Makroskopis- Mikroskopis dan Kesatuan Objektif-subjektif	48

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Fenomena konflik dan kekerasan etnis antara orang Dayak dengan orang Madura di Kalimantan Tengah telah berlangsung sejak tahun 1982-2000 dengan jumlah kasus sebanyak 15 kali. Dari 15 kasus tersebut terdapat 4 kasus yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Umumnya konflik tersebut bersifat individual dan diselesaikan secara adat melalui upacara perdamaian. Penyelesaian secara adat ini bagi orang Dayak sangat bersifat sakral, karena terkait dengan *pali* (pantangan). Pelanggaran terhadap *pali* (pantangan) ini dianggap akan mengganggu kehidupan mereka pada masa yang akan datang.

Rangkaian konflik dan kekerasan yang dialami oleh warga masyarakat Dayak tersebut telah membentuk penguatan nilai budaya *belom bahadat* sebagai standar dalam pengatur hubungan sosial. Nilai budaya tersebut diartikan oleh orang Dayak sebagai penyesuaian diri dengan adat dan tradisi Dayak, atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai *di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung*".

Pada sisi lain, pengalaman historis yang dialami oleh masyarakat Dayak dalam merespon marginalisasi dan isolasi politik yang menjauhkan mereka dari akses politik tersebut telah menimbulkan kesadaran bahwa mereka adalah kelompok yang dirugikan dalam proses pembangunan. Wujud dari kesadaran mereka tersebut telah melahirkan beberapa gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Dayak dalam merespon masalah-masalah yang dihadapinya.¹

¹ Usop, SR (2004). Reproduksi Budaya Etnis dalam Konflik dan Kekerasan Di Sampit. *Cakrawala*, Jurnal Penelitian Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UKSW Vol. 2 No. 1

Berdasarkan pengalaman sejarah yang dialami oleh warga masyarakat Dayak di atas, maka konflik etnis di Sampit memiliki keterkaitan dengan proses marjinalisasi dan isolasi politik terhadap masyarakat Dayak. Dengan demikian, penjelasan mengenai marjinalisasi dan isolasi politik terhadap orang Dayak ini menjadi penting, untuk memberikan gambaran bahwa orang Dayak dan orang Madura adalah korban dari kekerasan politik.

Dari aspek historis masyarakat Dayak pernah mengalami masa konflik antar sesama orang Dayak yang kemudian diselesaikan dengan Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1984. Sejak saat itu adat dan hukum adat diberlakukan dalam mengatasi berbagai perkara yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Dayak diselesaikan berdasarkan adat dan hukum adat yang berlaku dalam wilayah adat yang bersangkutan.

Adat dan hukum adat tersebut biasanya tersosialisasi melalui upacara *tiwah* (kematian). Salah satu hal yang harus ditaati pada saat upacara *tiwah* adalah *pali*, yaitu pantangan berkelahi selama berlangsungnya upacara *tiwah*. Orang yang melanggar *pali* disebut sebagai orang yang *belum dia bahadat* (hidup tidak beradat). Karena itu, *tiwah* menjadi salah satu institusi penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang berfungsi memelihara tertib sosial dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Dalam dinamika pembangunan masyarakat, fungsi adat dan hukum adat sebagai pengatur hubungan sosial telah mengalami degradasi sebagai pegendali hubungan sosial. Hal ini terjadi akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menyeragamkan struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, peran Damang Kepala Adat yang berfungsi menyelesaikan

perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat secara perlahan-lahan digantikan oleh hukum formal.

Kondisi di atas diperburuk lagi oleh tekanan-tekanan ekonomi dan politik terhadap orang Dayak yang menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk menyelenggarakan upacara ritual adat yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma ke dalam kehidupan masyarakat. Hancurnya tatanan adat dan melemahnya adat dan hukum adat yang berfungsi sebagai pengatur hubungan sosial inilah yang diduga berpotensi menimbulkan konflik etnis.

Tekanan ekonomi dan politik yang dialami oleh masyarakat Dayak akibat dominasi peran negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan masyarakat turut menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah kebijakan negara dalam memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada pengusaha yang secara faktual telah merugikan masyarakat seperti kehilangan mata pencaharian dan hancurnya tatanan adat.² Kondisi ini telah mendorong solidaritas kelompok masyarakat Dayak untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan pemerintah tersebut dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Pada sisi lain, konflik yang sering terjadi antar orang Dayak dengan orang Madura telah menimbulkan ketegangan hubungan di antara kedua kelompok etnis tersebut, dan ketegangan tersebut menjadi semakin meningkat pada waktu terjadinya konflik antara warga Dayak dan Madura di Kereng Pangi pada tahun 2000. Ketegangan dan permusuhan yang terjadi antara orang Dayak dan orang Madura tersebut, telah memperkuat nilai *belom bahadat* sebagai identitas kelompok orang-orang Dayak

²Alqadrie, Syarif Ibrahim. *Mesianisme dalam Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat*, dalam Flores, Paulus, dkk (1994). *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

(*ethnic group identity*). Pada sisi lain, terjadi penguatan solidaritas orang Dayak akibat ketidakpuasan dengan kebijakan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, merupakan faktor kondisional yang mengkonstruksikan terjadinya tindakan kekerasan etnis di Sampit.

1.1. Latar belakang

1.1.1. Realitas Sosial

Kekerasan sebagai cara untuk melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat telah meluas ke beberapa daerah di Indonesia. Intensitas kejadian tersebut semakin meningkat sejak tahun 1998, yaitu ketika terpuruknya perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini telah mengancam integrasi bangsa yang dibangun berdasarkan kebijakan sentralistik dalam mengatur kehidupan masyarakat yang pluralistik. Pada tataran politik, dampak dari krisis ekonomi tersebut telah melemahkan kekuatan pemerintah dan mendorong bangkitnya kekuatan masyarakat (*people power*) untuk merombak sistem politik yang dianggap oleh masyarakat lebih berkiprah pada kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

Ancaman terhadap integrasi bangsa ini memperlihatkan bahwa integrasi yang dibangun berdasarkan narasi yang bersifat makro, sudah tidak memiliki kekuatan untuk mengintegrasikan masyarakat yang semakin kritis dalam merespon permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan memahami kejadian-kejadian dalam skala mikro atau skala lokal yang telah melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini.

Kasus kekerasan etnis di Sampit merupakan bagian dari masalah integrasi nasional yang memiliki kekhasan, karena kekerasan tersebut dipandang oleh masyarakat Dayak sebagai kebangkitan (*revivalisme*) budaya *mengayau* (pemenggalan kepala) yang sudah hampir punah sejak dilaksanakannya Rapat Damai Tumbang Anoi pada

tahun 1894 yang menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan *habunu* (saling bunuh), *hakayau* (saling potong kepala), dan *hajipen* (saling memperbudak). Sejak itu, konflik yang terjadi dalam masyarakat, diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masing-masing wilayah adat masyarakat yang bersangkutan³. Realitas sosial di atas menarik perhatian peneliti untuk menjelaskan mengapa terjadinya konflik dan kekerasan antara orang Dayak dengan Madura di Sampit.

Pengalaman historis mengenai interaksi antara orang Dayak dengan Madura menunjukkan tidak adanya penyesuaian diri dari orang Madura terhadap nilai budaya masyarakat Dayak sebagai tuan rumah (*host*). Beberapa konflik dan kekerasan etnis yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah : *pertama*, konflik antara orang Dayak dengan orang Madura yang terjadi di Sampit pada tahun 1982. Dalam kejadian tersebut, terjadi pembunuhan terhadap orang Dayak oleh orang Madura yang mendapat dukungan dari kelompok Madura lainnya. Kondisi ini diperburuk pula oleh penegakan hukum yang tidak tuntas dan pelanggaran oleh warga Madura atas perdamaian yang telah disepakati.

Kedua, tahun 1983, di Bukit Batu, Kasongan, seorang warga etnis Dayak dibunuh melalui perkelahian antara 1 orang Dayak yang dikeroyok oleh 30 orang Madura. Terhadap pembunuhan tersebut, tokoh masyarakat Tjlik Riwut telah melakukan upacara perdamaian dengan upacara tiwah yang biayanya dibebankan kepada pelaku pembunuhan. Upacara tersebut dilanjutkan dengan perdamaian yang ditandatangani oleh keduabelah pihak, yang isinya menyatakan bahwa apabila orang Madura mengulangi perbuatannya, maka mereka siap untuk diusir dari Kalimantan Tengah.

³ Usop (1994) *Pakat Dayak, Sejarah Integrasi dan Jatidiri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah*, Palangkaraya : Yayasan Pendidikan Batang Garing

Ketiga, tahun 1999 di Tumbang Samba, terjadi penikaman terhadap pasangan suami-istri oleh 3 orang Madura, yang mengakibatkan suami-istri tersebut luka berat dan dirawat di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Pelaku tidak tertangkap dan kabarnya sudah lari ke Madura. Demikian juga pada tahun 2000, di Kerengpangi Kasongan, terjadi pembunuhan terhadap Sendung. Kematian Sendung ini karena dikeroyok oleh orang-orang Madura. Para pelaku pembunuhan tersebut dikabarkan sudah kembali ke Madura, sehingga tidak ada penyelesaian secara hukum.

Rangkaian konflik dan kekerasan yang bersifat personal antara orang Dayak dan orang Madura ini telah menimbulkan pandangan negatif di kalangan warga masyarakat Dayak terhadap orang Madura sebagai orang yang melanggar budaya *belum bahadat*. Sabran Achmad dari pengurus Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) mengatakan bahwa “Propinsi Kalimantan Tengah ini dilahirkan dengan perjuangan darah dari penduduk asli. Oleh karena itu, penduduk Madura pendatang hendaknya menyesuaikan diri dengan adat dan tradisi orang Dayak.”⁴

Gambaran mengenai wilayah interaksi sosial tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi gangguan terhadap keseimbangan hubungan sosial yang dikendalikan oleh sistem nilai yang berlaku dalam wilayah adat yang bersangkutan.

Dalam perspektif paradigma sosial, kejadian yang dialami oleh warga masyarakat Dayak tersebut merupakan realitas makro-obyektif yang terbentuk ketika mereka menyadari bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang Madura telah melanggar nilai budaya *belum bahadat*. Realitas makro-objektif adalah terbentuknya

⁴ Wawancara dengan Bapak Sabran Akhmad selaku tokoh masyarakat dan salah satu unsur ketua LMM DD-KT, 16 juli 2003

nilai budaya yang memiliki efek memaksa (*coercive*) terhadap pemikiran dan aksi individu. Sedangkan pada tataran makro-subyektif yaitu dinamika struktur yang diciptakan aktor, baik secara historis maupun melalui pikiran dan aksi sehari-hari.

Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan, selain menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi dan perluasan kemampuan penyediaan barang dan jasa, proses pembangunan ekonomi itu juga melibatkan proses pemaksaan dan menimbulkan perbedaan kesempatan untuk ikut serta dalam proses produktif tersebut maupun dalam menikmati hasilnya. Artinya, pembangunan adalah proses yang melibatkan penerapan kekerasan langsung maupun struktural.⁵

Merujuk pada pemikiran Mas'ood di atas, terdapat beberapa faktor struktural yang mengkondisikan terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit. Beberapa faktor struktural tersebut adalah kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi hutan kepada pengusaha HPH (Hak Penguasaan Hutan). Kehadiran pengusaha HPH sejak tahun 1967 telah menghancurkan sistem mata pencaharian masyarakat yang sangat tergantung dari hasil hutan, seperti tengkawang, jelutung, damar, rotan, kayu ulin dan sistem perladangan (*shifting cultivation*) yang sangat tergantung dengan *masa bera* (proses penghutanan kembali) untuk menyuburkan lahan⁶.

Demikian pula dengan tanah adat dan areal yang dianggap keramat atau tanah milik kelompok masyarakat, ikut musnah akibat eksploitasi hutan oleh HPH, seperti *pahewan, tajahan, sepan, kaleka, betang*, hutan tempat kuburan leluhur seperti *sandung, sapundu*. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini adalah pencemaran air sungai oleh obat-obatan pengawet kayu, dan banjir akibat pengundulan

⁵ Mas'ood (2001) *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta : P3PK UGM

⁶ Ibat, Sion (1996) Aktualisasi Hak Adat dalam Pergaulan Lintas Etnis, Sosialisasi Hasil Kongres Rakyat Kalimantan Tengah Tahun 2001.

hutan.⁷

Kompleksitas permasalahan di atas diperburuk pula oleh kebijakan pembangunan antar wilayah di Kotawaringin Timur yang telah menciptakan kesenjangan antara pembangunan Wilayah Bagian Tengah yang mayoritas penduduknya adalah pendatang, dengan Wilayah Bagian Utara dan Selatan dengan mayoritas penduduk Dayak. Berdasarkan hasil sensus tahun 2000, jumlah penduduk di Wilayah Bagian Tengah adalah yang terbesar, yaitu 281.968 (64,30 %), Wilayah Bagian Selatan 138.237 (26,62%) dan Wilayah Bagian Utara 99.109 (19,08%).⁸

Dari aspek politik, identitas Dayak sebagai pemersatu penduduk asli yang berbeda agama, etnis dan komunitas di Kalimantan Tengah telah terbentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1920 di Kalimantan Tengah telah berdiri *Serikat Dayak* yang bertujuan untuk memajukan suku Dayak, khususnya di bidang pendidikan. Pada tahun 1927 organisasi Serikat Dayak ini berubah menjadi *Pakat Dayak* dengan tujuan yang lebih luas, yaitu mengejar ketertinggalan dari aspek sosial, politik dan ekonomi; persatuan seluruh Dayak dan mempertinggi adat leluhur serta kebudayaan suku. Setelah kemerdekaan, gerakan masyarakat Dayak tampil kembali dengan nama *Gerakan Mandau Talawang Pancasila* untuk memperjuangkan berdirinya Propinsi Kalimantan Tengah.⁹

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kesadaran masyarakat Dayak bangkit kembali untuk menentang dominasi pemerintah pusat karena merasa diisolasi dari kehidupan politik, terutama dalam menentukan siapa yang menjabat sebagai gubernur

⁷ Siun (2001) Revitalisasi Hukum Adat Kalimantan Tengah, disampaikan pada *Mubes Damang Kepala Adat Se Kalimantan Tengah* di Palangka Raya

⁸ Aser, Fedlik (1999) Kesenjangan Pembangunan di kabupaten Kotawaringin Timur, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.

⁹ Usop (1997) Sejarah Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, Proyek kepurbakalaan Provinsi . Kalimantan Tengah

dan kebijakan perusahaan hutan yang dianggap telah merugikan masyarakat Dayak. Melalui momentum peringatan Seratus Tahun Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1994, direkomendasikan untuk membentuk Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak¹⁰. Identitas Dayak ini diperkuat pula melalui Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pada tahun 1998 yang memperjuangkan gubernur berasal dari putra daerah dan pemberdayaan masyarakat Dayak.

Dalam konteks ekonomi dan politik ini, kesadaran warga Dayak telah didorong untuk melakukan respon terhadap kondisi yang telah memarginalisasikan mereka dari kehidupan ekonomi dan menjauhkan mereka dari akses politik. Keadaan ini mereka sebut sebagai *tempon petak menanam sare* (yang punya tanah menanam dipinggiran)¹¹

Pemikiran di atas, memperlihatkan adanya dinamika struktur yang digerakkan oleh aktor dalam menyikapi interaksinya dengan struktur yang berlangsung secara terus menerus, sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam struktur sosial atau dunia sosial. Kondisi ini tidak cukup dijelaskan dengan menggunakan pendekatan fakta sosial yang melihat realita dengan menggunakan teknik wawancara, penggunaan angket dan analisa kuantitatif.

Gambaran kehidupan masyarakat di atas, harus dipahami (*understanding*) melalui dialog mengenai dialektika hubungan antara individu dalam struktur yang menjelaskan kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam perjuangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk melakukan proses perubahan terhadap ketertinggalan, isolasi politik dan proses marginalisasi yang dilakukan pada masa pemerintah Orde Baru.

¹⁰ Usop (2003) Wawancara selaku Ketua Umum LMMDD-KT, 15 juni 2003

Perjuangan tersebut telah mengukuhkan solidaritas orang Dayak yang diperkuat dengan munculnya Lembaga Musyawarah Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) yang dikukuhkan melalui Kongres Rakyat Kalimantan Tengah tahun 1995.

Pengalaman sejarah yang dialami oleh masyarakat Dayak tersebut merupakan bagian dari dinamika struktur yang membentuk realitas makro- subyektif yang dapat dipahami melalui cara dialogis untuk memahami dialektikan antara aktor dalam struktur¹². Pertanyaan yang muncul dari dunia sosial di atas adalah sejauh mana marginalisasi dan isolasi politik yang dialami oleh masyarakat Dayak ini, menjadi faktor pendorong terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit.

1.1.2. Permasalahan

Sejalan dengan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses terjadinya konflik etnis antara Dayak dengan Madura di Sampit ?
2. Sejauhmana faktor struktural dapat menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan etnis antara Dayak dan Madura di Sampit?

1.1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Mengetahui proses terjadinya konflik etnis antara orang Dayak dengan orang Madura di Sampit (2) menemukan sejauhmana faktor struktural dapat menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit. .

¹¹ Kongres Rakyat Kalteng Tahun 1998 merupakan wujud perjuangan untuk peralihan kepemimpinan orang Dayak

¹²Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S (1994). *Handbook of Qualitatif Reserch*. London:SAGE Publication, Inc.

Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai konflik dan kekerasan etnis, maupun sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi suatu proses integrasi yang sedang menjadi masalah nasional dewasa ini.

1.14. Kontribusi Teoritik Yang Diharapkan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan sejauhmana marjinalisasi dan isolasi politik orang Dayak menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori teori konflik dari Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf.

Kontribusi teoritik yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sebagai proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang selalu dihadapkan dengan konflik merupakan dialektika yang melekat dalam diri individu dan kelompok masyarakat. Lemahnya pengaturan konflik mendorong intensitas konflik dan kekerasan.
2. Semakin kuatnya peranan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan memberikan Hak Pengusahaan Hutan kepada pengusaha, semakin besar pula kerugian dipihak masyarakat. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan kelompok masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan pemerintah tersebut.
3. Pembangunan sebagai mekanisme perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata tidak berpihak kepada masyarakat Dayak, bahkan cenderung memarjinalisasikan mereka. Oleh karena itu, transformasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Dayak memiliki kecenderungan untuk memperkuat batas-batas budaya etnis (*ethnic boundaries*) yang berpotensi menciptakan konflik etnis.

4. Meningkatnya ketegangan antara etnis Dayak dengan etnis Madura dan berlangsungnya marjinalisasi dan isolasi politik terhadap orang-orang Dayak telah mendorong terjadinya konflik dan kekerasan etnis yang bersifat kolektif.
5. Pada tataran pengetahuan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu model transformasi sosial yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam melakukan perubahan sosial.

1.2. Kerangka Pemikiran

1.2.1. Penelitian Terdahulu

Penjelasan mengenai kekerasan berdasarkan beberapa hasil penelitian berikut ini mengelompokkan kekerasan dalam perspektif hubungan antar etnis dan perspektif strukturalis. *Pertama*, kekerasan dalam perspektif hubungan antar etnis, Sudagung (2001) dalam penelitiannya yang berjudul *Mengurai Pertikaian Etnis* menyebutkan bahwa pertikaian etnis di Kalimantan Barat disebabkan oleh perbedaan budaya antara etnis Dayak dan Madura. Perbedaan ini menyebabkan hubungan kedua etnis tersebut diwarnai oleh saling prasangka, persaingan bahkan konflik fisik.

Penelitian Sudagung ini menempatkan mengenai sikap egaliter orang Dayak yang memandang bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh sumberdaya. Dengan demikian, nilai budaya yang bersifat menguasai (*exclusive*) sangat bertentangan dengan nilai orang Dayak yang mengutamakan kebersamaan (*inclusive*).

Pada konflik kekerasan di Ambon, Pattiselanno (1999:59-61) menjelaskan bahwa keretakan hubungan antar etnis di Ambon adalah akibat hancurnya batas-batas budaya *sarane -salam* yang telah dibangun melalui sistem *pela gandong*, akibat pengaruh etnis pendatang (Bugis, Buton dan Makasar). Para pendatang ini umumnya beragama Islam yang membaaur dalam wilayah pemukiman *salam* dan mengukuhkan

identitas Islam. Akibatnya identitas Islam menjadi lebih kuat dan hubungan *sarane-salam* menjadi renggang.

Kondisi di atas, menggambarkan terjadinya konstruksi pemahaman hubungan *sarane salam* sebagai hubungan kekerabatan berdasarkan *pela gandong* menjadi hubungan yang memisahkan (*divided society*) dengan dimunculkannya istilah yang mempertajam perbedaan hubungan *sarane salam*. Istilah baru tersebut adalah *Acang* yang berasal dari kata Hasan yang menunjuk orang dengan identitas Islam dan istilah *Obet* yang berasal dari kata Robert yang menunjukkan identitas kristen. Melemahnya budaya *pela gandong* ini terkait pula dengan semakin jarangya dilakukan upacara *panas pela* untuk memperkental atau mengukuhkan budaya *pela gandong*.

Pada sisi lain, Syarib Ibrahim Alqadrie (2002: 6-7) yang melakukan kajian kekerasan dari sisi akulturasi budaya antara etnis melayu dengan etnis Dayak. Alqadrie menjelaskan bahwa kelompok etnis Melayu di Kalimantan Barat merupakan *media identifikasi* bagi orang Dayak yang ingin masuk dalam kelompok Melayu. Dalam hal ini, orang Dayak yang telah masuk Islam tidak menyebut dirinya orang Dayak, tetapi telah menjadi orang Melayu.

Pertemuan antara proses identifikasi atau ditolaknya mereka oleh kelompok sendiri untuk tidak lagi dianggap sebagai warga Dayak telah menyebabkan kedua kelompok Dayak muslim dan Dayak non muslim merasa diasingkan dan tidak diterima sebagai keluarga Dayak Besar dan merasa bahwa Melayu dan saudara mereka yang sudah masuk Islam telah meninggalkan dan mengisolasi mereka. Perasaan dan anggapan seperti ini merupakan psikokultural dari beberapa faktor yang mendorong pertikaian etnis di Kalimantan Barat. Dalam konteks pemahaman tersebut, Alqadrie ingin menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang sedang mengalami kebingungan

(*anomali*) cenderung mudah dimobilisasi untuk melakukan tindakan kekerasan.

Penelitian Parsudi Suparlan (2001) dan *Human Right Watch* (1998) menyoroti kekerasan etnis sebagai gerakan keagamaan. Suparlan (2002 : 7) dalam penelitian awalnya di Sampit menyebutkan bahwa tindakan memenggal kepala dan pengusiran terhadap etnis Madura adalah sebagai konsep membersihkan polusi yang dibuat oleh penduduk pendatang yang menghasilkan malapetaka bagi masyarakat Dayak. Tindakan yang dilakukan oleh orang Dayak adalah melakukan upacara untuk mengundang Dewa Petir atau *Dewa Perang* yang diundang untuk merasuk ke dalam tubuh orang Dayak tertentu yang mau dan mampu berperang melawan orang Madura untuk membersihkan polusi dari kehidupan mereka. Pada kasus ini Suparlan cenderung melihatnya sebagai kebangkitan (*revivalisme*) budaya Dayak untuk merespon permasalahan yang dihadapinya pada masa kini.

Sebaliknya, budaya carok bagi orang Madura dipahami oleh Latief Wiyata (2002:167) sebagai perasaan *malo* karena pelecehan harga diri (*martabhat*). Untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan, mereka melakukan carok yang ternyata selalu mendapat dukungan dari lingkungan sosial. Penelitian Wiyata ini memperlihatkan budaya carok yang terjadi antar sesama etnis Madura, sehingga tidak muncul kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik di balik peristiwa carok yang terjadi dengan etnis lain, seperti dengan etnis Dayak.

Pada kasus kekerasan etnis di Kalimantan Barat, *Human Right Watch* (1998:12) menyebutnya sebagai gerakan pribumisasi (*nativisme*) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Dayak. Dasar dilakukannya gerakan pribumisasi ini adalah ketika darah orang Dayak menetes, maka seluruh warga wajib mengumumkan perang terhadap penyerang.

Tindakan tersebut dilakukan dengan mengedarkan mangkok merah yang biasanya diisi dengan unsur spiritual seperti darah ayam, tongkat dan ilalang. Unsur spiritual tersebut masing-masing memiliki makna, seperti darah ayam yang menunjukkan perang, tongkat dan sejumlah atap ilalang yang menunjukkan kata-kata perang, dan harus terbang dari satu desa ke desa yang lainnya meskipun dalam kegelapan atau cuaca buruk. Putra dan Djuweng (1998:43) menambahkan bahwa sebelum dilakukan peperangan digunakan pula cara-cara untuk memanggil roh (*tariau*) yang dapat masuk ke dalam tubuh orang yang memanggil roh tersebut sehingga orang tersebut memiliki kekuatan yang berasal dari roh yang merasuk ke dalam tubuhnya.

Gerakan keagamaan yang disebutkan oleh Parsudi Suparlan dan *Human Right Watch*, merujuk pada pemikiran Sartono Kartodirdjo (1984:10) yaitu gerakan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat agar zaman keemasan di masa lampau segera kembali. Kekerasan tersebut tidak hanya sebagai gerakan keagamaan untuk memulihkan tertib sosial (*social order*) tetapi dapat pula dijelaskan sebagai gerakan radikal untuk menghancurkan sistem yang telah membelenggu dan memarjinalisasikan mereka dari ruang publik.

Kedua, kekerasan dalam perspektif strukturalis cenderung dipahami sebagai pertarungan dalam ruang ekonomi dan politik, yaitu bagaimana kelompok kepentingan (*entrepreneurs*) dan kelompok penguasa memperlakukan kelompok etnis untuk mendukung kekuasaannya atau mendukung kepentingan kelompok enterpreneur.

Mas'ood, dkk (2001) dalam penelitiannya yang berjudul Kekerasan kolektif : *Kondisi dan Pemicu* menyoroti kekerasan struktural dengan menggunakan kerangka pikir dari Galtung dan Gurr. Hasil temuan Mas'ood dkk.(2001: 62) khususnya pada kasus kekerasan di Sanggau Ledo menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi di

Sanggau Ledo merupakan dinamika transformasi masyarakat di Kalimantan Barat di tengah-tengah tekanan ekspansi kekuatan-kekutan dari luar. Pada tingkat ekonomi, kekuatan itu muncul dalam bentuk ekspansi kapital melalui berbagai sektor, khususnya sektor perkebunan. Pada tingkat politik, kekerasan ini muncul sebagai akibat kekuatan-kekutan eksternal yang didukung oleh birokrasi pembangunan yang dirancang dari Jakarta yang nyaris tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

Dalam Penelitian Mas'ood dkk. ini tidak terdapat penjelasan mengenai dinamika transformasi warga masyarakat Dayak tersebut dan kehadiran pimpinan kelompok (*group leaders*) yang memobilisasi warga Dayak untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti yang ditunjukkan oleh teori Gurr.

Dalam konteks pemikiran ekonomi politik, Mas'ood membedakan antara faktor kondisional dan faktor pemicu (*trigger*) yang menyebabkan terjadinya konflik etnis. Faktor kondisional adalah ketimpangan sosial yang diciptakan oleh negara dan kelompok kepentingan, sehingga menyebabkan keterpinggiran warga masyarakat Dayak. Faktor keterpinggiran ini berdampak pada tekanan mental, sehingga menjadi faktor pemicu (*trigger*) sebagai awal dimulainya tindakan kekerasan.

Marzali (2001:287-289) yang melakukan kajian mengenai kekerasan sosial di Kalimantan dengan menggunakan teori perilaku kolektif (*collective behavior*) dari J. Smelser telah memperlihatkan bahwa kekerasan yang terjadi sebagai akibat proses marginalisasi kelompok etnis Dayak pada masa Orde Baru. Penelitian Marzali ini difokuskan pada ekspansi pengusaha HPH di Kalimantan yang dianggap sebagai penciptaan kondisi kebencian masyarakat Dayak terhadap pemerintah dan Pengusaha HPH yang telah menghancurkan sistem usaha mereka yang sangat tergantung dengan hasil hutan, merusak tanah adat dan tanah yang dianggap kramat oleh warga Dayak.

Sementara itu di tingkat perkotaan sektor perekonomian telah dikuasai oleh kelompok pendatang dan tanpa disadari mereka diasingkan di daerahnya sendiri. Kondisi ini akhirnya meledak menjadi kekerasan terhadap warga Madura, ketika institusi negara mulai lemah akibat krisis ekonomi dan politik.

Pandangan Marzali yang merujuk pada teori *collective behavior* dari J.Smelser ini menunjukkan bahwa kekerasan kolektif sebagai sesuatu gerakan yang disebabkan akumulasi kekecewaan kelompok etnis Dayak terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan mereka. Intensitas kekecewaan ini semakin meningkat ketika terjadi penguasaan sumberdaya oleh kelompok etnis Madura.

Klinken melihat persoalan kekerasan di Sampit sebagai akibat perseteruan di tingkat elit lokal. Pemikiran Klinken (2002:69) ini merujuk pada pendapat Jack Snyder yang menyebutkan bahwa konflik etnis dapat muncul dalam rezim yang otoriter. Dalam hal ini terdapat elit yang anti demokrasi yang menggunakan sentimen etnis untuk membelokkan demokrasi. Terhadap kasus kekerasan etnis di Kalimantan Tengah, Klinken (2000:86) mengaitkan antara pertarungan elit lokal dalam memperebutkan jabatan Gubernur dengan mobilisasi sentimen etnis Dayak untuk mengusir Madura pendatang melalui analisis ucapan yang disampaikan oleh Sabran Ahmad dari pengurus LMMDD-KT terhadap kasus awal konflik antara warga Dayak dengan warga Madura di Kerengpangi.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti Sudagung (2001), Alqadrie (2002), Suparlan (2002), *Human Right Watch* (1997), melihat kekerasan dari perspektif hubungan antar etnis, yaitu hubungan antara penduduk etnis lokal dengan penduduk etnis pendatang, dengan fokus kajian pada perbedaan budaya dan persaingan dalam ruang publik, khususnya dalam kehidupan ekonomi dan politik. Penelitian ini bias

terhadap faktor-faktor eksternal yang mengkondisikan terjadinya konflik dan kekerasan. Karenanya, perdamaian selalu mendapat prioritas utama dalam penyelesaian konflik dan membiarkan faktor-faktor eksternal yang mengkondisikan konflik tersebut tetap berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Mas'ood (2001) dan Marzali (2001) yang menyoroti kekerasan dari pandangan strukturalis dalam perspektif ekonomi dan politik, dan penelitian Klinken (2000) yang menyoroti kekerasan sebagai akibat pertarungan elit politik, telah memposisikan kelompok etnis sebagai hasil manipulasi ekonomi dan politik sehingga mudah dikontrol atau dimobilisasi untuk mendukung kepentingan negara atau kelompok *entrepreneurs*. Penelitian dengan pandangan strukturalis ini telah menempatkan hubungan aktor dan struktur dalam sistem yang tertutup (*closed system*) yang memposisikan aktor sebagai objek dari struktur dan mengabaikan dinamika aktor untuk melakukan perubahan.

Penelitian yang dilakukan dalam disertasi ini, melihat persoalan kekerasan sebagai akibat dinamika dan kreatifitas masyarakat dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapinya, sehingga menimbulkan kesadaran tentang dunia luar yang merugikan kehidupan mereka. Dalam hal ini, terdapat kesadaran kelompok masyarakat Dayak untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang membelenggu kehidupan mereka. Permasalahannya adalah mengapa mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok masyarakat Madura dalam merespon faktor-faktor kondisional yang telah memarjinalisasikan kelompok masyarakat Dayak.

1.2.2. Kekerasan Etnis

Secara umum konsep kekerasan etnis dikelompokkan sebagai kekerasan budaya, karena tindakan kekerasan budaya tersebut cenderung berkaitan dengan penggunaan

atribut-atribut budaya etnis. Galtung (Steger dan Lind,1990:40) mendefinisikan kekerasan budaya sebagai aspek-aspek budaya yang biasanya digunakan untuk melegimitasi tindakan kekerasan. Aspek-aspek budaya tersebut berkaitan dengan aspek agama, ideologi, bahasa dan seni, pengetahuan formal dan fakta yang terjadi dalam masyarakat (*emperical and formal science*).

Definisi kekerasan dari Galtung ini mengedepankan konsep struktural yang dilakukan oleh negara, kelompok masyarakat dan individu. Sebagai contoh, kekerasan terhadap lingkungan alam yang menyebabkan kerusakan hutan dan kebijakan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*growth economics*) telah menyebabkan kesenjangan sosial yang berimplikasi secara tidak langsung pada tindak kekerasan oleh kelompok etnis.

Kekerasan budaya digunakan pula oleh Baskara (2002:38) yang menyebutnya dengan istilah kekerasan dalam bingkai budaya untuk menjelaskan kekerasan etnis yang terjadi pada kelompok masyarakat Bugis dan Madura, yaitu budaya *Siri* dan *Carok*. Budaya *Siri* dan *Carok* ini, menurut Baskara (2002:49) adalah suatu sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan fungsi pertahanan harga diri manusia sebagai individu dan anggota masyarakat agar mereka tetap menjadi warga yang terhormat dalam masyarakat.

Terhadap budaya *Siri* dan *Carok* ini, Alqadrie (2002:20) melaporkan bahwa kekerasan etnis di Kalimantan Barat banyak terjadi di kalangan etnis Madura yang menggunakan budaya *Carok*, dibandingkan pengguna budaya *Siri* pada kelompok etnis Bugis. Perbedaan tersebut karena adanya faktor penyeimbang yang melekatkan *Siri* pada diri pribadi orang-orang Bugis (*siripakasiri*) yaitu ketika mereka tidak mau

dipermalukan atau dihancurkan harga diri mereka oleh orang lain, maka mereka juga tidak akan memermalukan dan menghancurkan harga diri orang lain.

Pada kelompok etnis Madura, faktor penyeimbang itu berada diluar diri individu yaitu dari Kyai. Para Kyai tersebut bagi etnis Madura menurut Wiyata (2002:47-48) disamping sebagai pembina umat juga merupakan tokoh sentral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan orang-orang Madura. Namun sisi gelapnya dapat pula memberika restu bagi tindakan *Carok* setelah *nyabis* (berkunjung) ke Kyai sebelum melakukan tindakan untuk mendapatkan *apagar* dan *jaza* (jimat untuk keselamatan dan kekebalan).

Terkait dengan kekerasan etnis yang bersumber dari budaya, Varshney (2002:27) menyebutnya sebagai *essentialism versus instrumentalism*. *Essentialisme* digambarkan sebagai unsur-unsur primordial seperti ras, agama dan budaya yaitu sebagai unsur pembeda kelompok masyarakat yang dapat memicu terjadinya kekerasan etnis, jika pembeda tersebut terkait dengan persaingan dalam mendapatkan sumber daya ekonomi dan akses politik. Dalam kondisi ini, akan muncul kelompok-kelompok elite yang memobilisasi kelompok etnis dengan membangkitkan identitas etnis (*ethnic identity*) untuk mendukung kepentingan mereka (*instrumentalism*). Tindakan mobilisasi ini didasarkan atas pertemuan kepentingan (*focal point*) yang saling menguntungkan keduabelah pihak. Dengan kata lain, identitas etnis dalam pandangan Varshaney merupakan konstruksi yang dibangun oleh kelompok elite politik untuk mendukung kepentingan mereka.

Identitas etnis sebagai sumber pembentukan kekerasan, dapat dijelaskan dalam konsep etnisitas (*ethnicity*) yang pada awalnya dipahami dari antropolog Malinowski sebagai suatu kesatuan budaya dan teritorial yang tersusun rapi dan definitif.

Menurutnya satu kelompok etnis dapat dibedakan dengan yang lain, baik dalam organisasi kekerabatan, bahasa, agama (sistem kepercayaan), ekonomi, tradisi (hukum), maupun pola hubungan antar kelompok etnis, termasuk dalam pertukaran jasa dan pelayanan (Pelly, 1998 : 26).

Etnisitas (kesukuan) menurut Bart (1998 :15) tidak hanya didasarkan pada teritorial yang ditempatinya atau sistem rekrutmen yang baku yang diberlakukan, tetapi pada pernyataannya dan pengakuannya yang terus - menerus. Penempatan seseorang sebagai anggota kelompok etnis didasarkan atas kriteria penilaian dan pertimbangan (*evaluation and judgement*) agar mereka dapat bermain dalam permainan yang sama (*playing in the same game*). Atas dasar penilaian dan pertimbangan ini, dalam hubungan sosial identitas etnis dikonstruksikan untuk membedakan orang dalam (*in group*) dan orang luar (*out group*).

Dalam masyarakat pluralis yang ditandai oleh multietnis, Barth (1998:16-20) menyebutkan bahwa identitas etnis dapat muncul dalam ruang yang eksklusif; hubungan antar etnis yang tidak memperhatikan batas-batas kesukuan (*ethnicity*); persaingan dalam memperebutkan sumberdaya yang terbatas; dan perspektif demografis yang menyangkut perimbangan jumlah penduduk berdasarkan etnis.

Masyarakat plural (*plural society*) menurut Furnival (Eriksen,1993:49) yang memahami masyarakat pada pemerintahan kolonial, menyebutkan bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang dapat disatukan oleh kegiatan ekonomi dan dominasi politik, namun mereka tetap berbeda dari segi bahasa, agama etnis, kebiasaan dll. Terkait dengan pemikiran ini, Furnival (Grillo,1998:6) menyebutnya sebagai *midley of people*, yaitu terjadi percampuran (*mix*) dalam masyarakat, tetapi tidak terjadi kombinasi. Kondisi ini dijelaskan sebagai *mix populations with particularistic tendencies* yang

menunjukkan bahwa dalam kehidupan bersama, masing-masing kelompok etnis tetap mempertahankan nilai-nilai budaya etnis.

Smith (Grillo,1998:7) menyebutkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat dihadapkan pada kehidupan bersama dengan perbedaan-perbedaan tradisi budaya, hubungan kekerabatan, agama, pendidikan, aktivitas ekonomi dll. Dalam kehidupan bersama ini, interaksi antar individu atau kelompok selalu dihadapkan pada kepentingan dan kekuasaan sehingga terjadi manipulasi identitas etnis untuk mendukung kepentingan dan kekuasaan kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, atas dasar kepentingan dan kekuasaan ini mendorong munculnya kesadaran kelompok etnis untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang dianggap telah membelenggu kehidupan mereka.

Khususnya dalam perspektif demografis, Bruner (1994) menyebutkan batas-batas etnisitas terwujud sebagai arena-arena interaksi yang terwujud dalam birokrasi, tempat-tempat umum, lokal serta pasar yang mewujudkan adanya kebudayaan yang dominan. Menurut Suparlan (1999:14) kebudayaan dominan mencakup tiga unsur yang saling berhubungan dalam menentukan corak hubungan etnisitas.

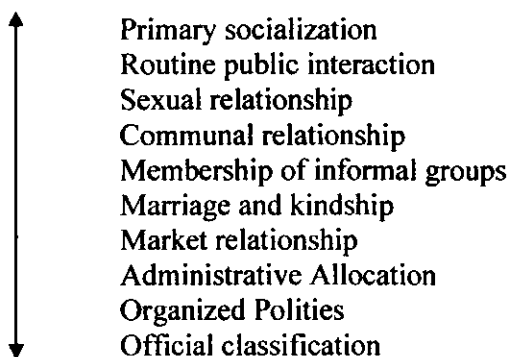
Ketiga unsur tersebut adalah: *pertama*, demografi sosial yang mencakup rasio populasi dan corak heterogenitas serta tingkat percampuran hubungan di antara suku-suku bangsa yang ada dalam sebuah konteks latar tertentu. *Kedua*, kemantapan atas dominasi hubungan suku bangsa setempat, bila ada, dengan cara-cara yang biasanya dilakukan oleh anggota-anggota kelompok suku bangsa pendatang dalam berhubungan dengan suku-suku bangsa setempat dan penggunaan kebudayaan masing-masing serta pengartikulasiannya. *Ketiga*, keberadaan dari kekuatan sosial dan pendistribusian di antara berbagai kelompok suku bangsa yang hidup dalam latar tersebut.

Jenkins (1997) mendalami konsep kesukuan dengan memusatkan perhatian terhadap identitas etnis. Konsep identitas etnis dari Jenkins ini dipengaruhi oleh pemikiran Anthony Gidden dan Erving Goffman yang berhubungan dengan interaksi individu dalam struktur atau organisasi. Menurut Jenkins (1997 : 56) di dalam masyarakat terdapat hubungan yang saling mempengaruhi di antara dan di dalam tiga tatanan berikut ini, yaitu : *pertama*, tatanan individu, yaitu pengetahuan individu mengenai dunia luar. *kedua*, tatanan interaksi, yaitu wujud hubungan antara individu dengan orang-orang (*people*) dan *ketiga*, tatanan institusional yang berkaitan dengan sistem pada organisasi atau hubungan simbolik yang berhubungan dengan cara-cara untuk melakukan sesuatu.

Pemikiran Jenkins ini mempertegas bahwa identitas etnis sebagai sebuah konstruksi sosial yang diwujudkan dalam ruang publik, termasuk dalam konteks perubahan pola sosialisasi dalam kehidupan keluarga, seperti terlihat gambar mengenai kategorisasi etnis dibawah ini.

Diagram 1. Contexts of ethnician categorization (Jenkins, 1997:63)

Most informal



Most formal

Identitas etnis yang digambarkan oleh Jenkins (1997) dalam konteks kategorisasi etnis menurut kontinum informal-formal akan menentukan derajat

identitas etnis dalam pertarungannya (interaksi) antara kedirian (*self*) dan masyarakat (*society*) yang membentuk *self*. Pengetahuan terhadap derajat identitas etnis ini dapat pula digunakan untuk melakukan analisis terhadap intensitas konflik yang melahirkan kekerasan atau sebagai upaya mengendalikan konflik untuk menciptakan proses transformasi dalam kehidupan masyarakat, atau suatu perencanaan sosial (*social design*) untuk menciptakan kehidupan bersama (*living together*) dalam ruang publik.

Penjelasan yang lebih spesifik datang dari Pelly (1999:28) menyebutkan kekerasan etnis dengan istilah tabrakan antar kelompok etnis. Kondisi ini terjadi bukan karena kelompok etnis tertentu ingin kembali menegakkan superioritas etnis (*ethnocentrism*) dalam pengertian yang sempit (*return to the tribe or the particular culture*), atau memisahkan dari kehidupan masyarakat majemuk (*separatism*). Akan tetapi tabrakan itu merupakan suatu protes budaya terhadap ketidakadilan, kecurangan dan penindasan yang diderita oleh kelompok-kelompok etnis tertentu. Kecurangan dan penindasan tersebut telah menghancurkan tatanan sosial (*social order*) yang telah ditegakkan bersama. Dengan demikian tabrakan antar etnis tersebut adalah akibat hancurnya tatanan sosial (*the broken of the social order*) masyarakat majemuk setempat, serta tuntutan untuk membangun kembali tatanan sosial yang baru (*rebuilding the new social order*), atas dasar kebersamaan, keadilan, dan solidaritas organik yang sehat.

Berkaitan dengan pemikiran Pelly ini, Alqadrie (1999:39) menyebutkan kekerasan etnis sebagai kesadaran etnis (*ethnic consciousness*) dan solidaritas etnis (*ethnically based solidarity*) untuk melakukan reaksi spontan terhadap kondisi keterpurukan dan keterpinggiran kelompok etnis setempat. Kondisi itu terjadi tidak saja melalui dominasi dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam yang membuat mereka menjadi penonton, tetapi juga melalui pengusuran, pemerasan dan

pengambilalihan kepemilikan alat-alat produksi dengan cara intimidasi oleh sekumpulan anggota kelompok etnis pendatang atau kelompok kepentingan lainnya.

Abdullah (2000:6) menyebutkan bahwa keseimbangan hubungan antar etnis di Sampit Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh ketimpangan dan penguasaan sumberdaya antara penduduk etnis lokal dan penduduk pendatang. Ketimpangan penguasaan sumber daya ini kemudian meluas ke dalam akses politik yang menyebabkan lahirnya dominasi suatu etnis. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang berbahaya, yaitu ketika ketika kelompok etnis dominan mendapat *privilege* dari berbagai agen sosial khususnya pemerintah dan ketika kesadaran tentang batas-batas budaya (*cultural boundries*) mulai muncul. Etnis lokal mulai sadar bahwa tanah air mereka mulai dijajah.

Berkaitan dengan pemberian hak istimewa (*privilege*) terhadap suatu kelompok etnis, Feagin (1996:494) melihat kekerasan etnis sebagai warisan kolonial. Dalam kekerasan antara etnis Hutu dengan etnis Tutsi di Rwanda, pemerintah kolonial menempatkan etnis Tutsi sebagai kelompok etnis yang *superior* dan etnis Hutu sebagai kelompok yang *inferior*. Perbedaan tersebut terus dikonstruksikan menjadi "diri" dan orang lain (*the self and the others*) selanjutnya istilah orang lain diberi makna sebagai inferior, budak, malas, biadab, dengan tujuan untuk menguasai orang lain.

Pemikiran ini menempatkan kelompok etnis yang tertindas sebagai objek yang harus patuh terhadap pemerintah, seperti pada masa pemerintah Orde Baru yang dikenal dengan pemerintah otoriterisme birokrasi (*bureaucratic authoritarianisme*). Liddle dan Mujadi (2000:136) yang merujuk pada pemikiran O'Donnel menyebutkan bahwa pemerintah yang otoriter birokrasi mensyaratkan adanya stabilitas politik dengan komando militer untuk mengamankan pembangunan ekonomi dan modal kapitalis mancanegara. Tindakan rejim otoriter terebut menurut O' Donnel dan Schmitter

(1995:57) merupakan tanggung jawab negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan represif secara sistematis terhadap partai politik, organisasi sosial dan individu. Kondisi ini dapat pula dijadikan sebagai alasan untuk mengendalikan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat dan menyembunyikan tindakan korupsi yang mereka lakukan.

Pada saat monopoli kekuasaan mulai menurun, maka konflik dan kekerasan mulai bertebaran di Indonesia sebagai suatu kebangkitan etnis lokal untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi pusat. Dalam praktek penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru ini, Nordholt (2002:104) menyebutkan bahwa konsep etnis, agama, ras dan kelas yang merupakan barang tabu telah melahirkan monster yang telah menimbulkan tindakan kekerasan di negara kesatuan Republik Indonesia. Terhadap kondisi ini, Nordholt melihatnya bahwa beberapa konflik regional, agama dan suku dimasukkan ke dalam wacana kekerasan persuasif yang memobilisasi sejumlah kelompok dan memotivasinya untuk menghancurkan musuh. Kasus Kekerasan etnis antara kelompok etnis Dayak dan Madura di Kalimantan dianggap sebagai alat untuk meredam kebangkitan kelompok etnis Dayak dengan memotivasi kelompok etnis Madura untuk menghancurkan etnis Dayak.

Dampak kapitalisme global, dominasi informasi dan komunikasi global telah mendorong munculnya suatu bentuk masyarakat baru yang disatukan dalam jaringan kerjasama berdasarkan identitas kolektif (*collective identity*). Identitas kolektif ini menurut Castell (1997:6) merupakan konstruksi sosial yang dibentuk dengan menggunakan atribut-atribut budaya yang penuh dengan makna dan hadir dalam realitas subjektif. Identitas ini merupakan sumber pengalaman baru yang dibentuk, dipelihara, dimodifikasi atau dibentuk kembali dalam interaksi sosial.

Dalam merespon dampak negatif dari kapitalisme global ini, identitas kolektif ini dapat menjadi resistansi identitas, yaitu identitas etnis, agama dan komunitas yang dikonstruksikan dalam bentuk perlawanan kolektif terhadap dominasi kelompok dari luar (*out group*), ketidakadilan (*injustice*) dan ancaman terhadap eksistensi kelompok. Biasanya dasar pembentukan identitas ini diambil dari sejarah, geografi atau biologi yang sangat memudahkan untuk memberikan batas - batas etnis.

Pemikiran Castell ini cenderung melihat konflik dan kekerasan etnis sebagai proses pembentukan identitas kolektif yang muncul dari kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh kapitalisme global yang merugikan kelompok etnis. Sebaliknya Crawford (1998:12) melihat identitas kolektif itu muncul karena dibentuk oleh kelompok-kelompok *entrepreneurs* untuk mendukung kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Identitas kolektif yang merupakan pembeda terhadap kelompok etnis lain, dapat beraliansi dengan kelompok-kelompok kepentingan (*political entrepreneurs*) sehingga kelompok etnis dapat dimobilisasi untuk mendukung kepentingan mereka. Kekerasan etnis dapat terjadi akibat persekongkolan antar kelompok etnis dengan kelompok-kelompok *entrepreneurs* dengan menciptakan diskriminasi dalam perjuangan merebut sumber daya. Keadaan ini terjadi pada saat peranan institusi negara mulai melemah atau melonggarkan kontrolnya terhadap kehidupan warga masyarakat.

Kasus-kasus kekerasan etnis di Bosnia dan India menurut Barth (2000:32) erat kaitannya dengan manipulasi identitas yang diciptakan oleh kelompok-kelompok kepentingan (*political entrepreneurs*) untuk mendukung kepentingan-kepentingan politik mereka yang berimplikasi terhadap kekerasan etnis.

Dari pemahaman terhadap teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan etnis itu meliputi : *pertama*, kekerasan etnis yang bersumber dari dalam etnis itu sendiri, yaitu nilai - nilai budaya yang berpotensi menimbulkan kekerasan untuk memulihkan harga diri, seperti budaya *Siri* dan *Carok*. Kedua nilai budaya ini merupakan identitas etnis yang dikonstruksikan oleh para pelaku budaya sehingga dapat menjadi batas-batas budaya (*cultural boundaries*) yang tidak boleh dilanggar.

Teori di atas mengandung kelemahan karena masih berkiprah pada pelanggaran batas-batas budaya (*cultural boundries*) sebagai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi terdahulu atau sebagai faktor bawaan. Namun di sisi lain teori ini memiliki keunggulan dari pemahamannya terhadap nilai budaya suatu etnis, sehingga dapat melihat wilayah sensitif etnis yang tidak boleh dilanggar, baik dalam kerangka hubungan antar etnis, maupun dalam penentuan kebijakan pembangunan bagi masyarakat yang pluralistik.

Kedua, kekerasan etnis yang bersumber dari luar etnis, yaitu manipulasi etnisitas bagi kepentingan ekonomi dan politik. Dalam hal ini negara dan kelompok-kelompok kepentingan menggunakan identitas etnis untuk mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Teori ini mengandung kelemahan karena mengabaikan kesadaran etnis lokal, untuk melakukan perlawanan terhadap struktur yang membelenggu kehidupan mereka. Walaupun demikian, teori ini memiliki keunggulan karena mampu mengungkapkan faktor - faktor di luar etnis yang mendorong terjadinya konflik dan kekerasan etnis.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa konflik dan kekerasan etnis adalah akibat bangkitnya identitas etnis ketika mereka melakukan respon terhadap kesenjangan ekonomi dan politik yang mereka alami, sehingga mempertajam perbedaan-perbedaan etnis. Dengan kata lain, konflik dan kekerasan etnis tersebut

sebagai sebuah penguatan identitas etnis, ketika terjadi interaksi dengan etnis lainnya, maupun terhadap perlakuan negara dan kelompok - kelompok kepentingan yang menimbulkan ketimpangan ekonomi dan politik yang merugikan kelompok etnis lokal.

1.2.3. Gerakan Keagamaan

Penjelasan kekerasan etnis dari segi keagamaan terkait dengan pandangan warga masyarakat Dayak mengenai kebangkitan (*revivalisme*) budaya *mengayau* (pemenggalan kepala) yang terjadi kurang lebih satu abad yang lampau. Gerakan keagamaan dipahami sebagai gerakan radikal, yaitu upaya untuk melakukan perubahan pada struktur kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang telah melahirkan tindakan kekerasan sehingga mengakibatkan korban tewas, kehilangan harta benda, pengusiran dan dampak psikologis khususnya bagi anak-anak. Kartodirjo (1984:38) menjelaskan bahwa gerakan keagamaan sebagai gerakan radikal yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kelompok yang memiliki hak istimewa dan yang berkuasa. Keanggotaan gerakan-gerakan sosial yang radikal seperti itu terbatas pada struktur sosial rendah, kaum tertindas atau orang - orang yang kurang mampu.

Menurut Mulkan (1995:90-91) gerakan radikal akan memunculkan secara potensial ketika modernisasi yang diterapkan secara kaku dengan mengabaikan dialog-dialog kultural. Istilah radikal dipergunakan sebagai simbol suatu fenomena sosial yang menunjukkan pada perilaku sosial tertentu. Sesuatu perilaku sosial yang mengandaikan kekerasan atau militansi dalam merealisasikan sesuatu doktrin dalam kehidupan sosial. Radikalisme akan muncul setiap saat ketika interaksi dialogis (demokrasi) tidak lagi berlaku di antara berbagai komponen suatu tatanan kehidupan masyarakat. Radikalisme biasanya menjadi semakin kental ketika doktrin rujukannya bersumber pada suatu

keyakinan keagamaan. Hal ini karena keyakinan keagamaan banyak berhubungan dengan dunia transedental sehingga doktrin-doktrin yang dibangun a historis, setidaknya tidaknya menurut kaca pandang penganutnya.

Kartodirjo (1984:10-14) menyebutkan gerakan keagamaan dengan berbagai cara, yaitu gerakan juru selamat (*mesianisme*), Ratu Adil (*millenarialisme*), pribumi (*nativisme*), kenabian (*prophetisme*), penghidupam kembali (*revitalisme*), atau menghidupkan kembali (*revivalisme*). Gerakan keagamaan ini dilandasi asumsi kultural mengenai zaman keemasan yang akan datang, zaman tentram karta raharja. Tujuan dasarnya ialah untuk menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat agar zaman keemasan di masa mendatang itu segera kembali. Mereka berkeyakinan bahwa zaman yang akan datang lebih baik dari zaman kini : zaman yang penuh dengan kesulitan, rakyat dibebani pajak yang lebih berat, kelaparan dan penyakit dan wabah penyakit dimana - mana.

Unsur-unsur pokok gerakan ini adalah : *pertama*, seorang pemimpin keagamaan yang merupakan seorang prophet atau guru, atau dukun, tukang sihir atau utusan (*mesianisme*), pemimpin-pemimpin ini mengaku diilhami oleh wahyu ; *kedua*, penolakan terhadap situasi yang ada dan harapan akan datangnya *millenium*. Di samping hidupnya kembali nilai-nilai tradisional, era *millenium* biasanya mengidamkan suatu masyarakat yang ideal dan meromantiskan zaman yang akan datang sebagai zaman keemasan.

Pada bagian lain, Kartodirdjo (1984:19) menyebutkan bahwa dalam gerakan keagamaan terdapat dua buah ciri yang sangat penting tampak jelas jika kita membuat tujuan umum tentang gerakan keagamaan ini, yaitu aspek pemujaan terhadap nenek moyang dan *magico-misticisme*. Wilson (1973:23) menyebutkan sebagai gerakan

thaumaturgical yang lebih menitikberatkan pada cara-cara magic atau kekuatan supernatural yang bersifat personal dan lokal untuk melakukan penyelamatan yang cepat untuk mengatasi penderitaan manusia atau menentramkan hati. Dalam hal ini keajaiban - keajaiban dan ramalan - ramalan merupakan prinsip baru mengenai hidup sebagai alat penyelamatan.

Realitas yang diperlihatkan dalam gerakan keagamaan menurut pemahaman Kartodirjo ini sangat tergantung pada kemampuan dari para pemimpin untuk menyampaikan agitasi yang bersifat praktis dan masuk akal (*plausible*) untuk memperoleh dukungan massa. Contoh agitasi praktis tersebut adalah pelanggaran hak-hak rakyat dan penghinaan terhadap agama atau identitas etnis. Seperti Gerakan Nyuli yang terjadi pada kelompok Dayak Lawangan di Kalimantan Tengah pada tahun 1910 dijelaskan Crodt (1984:23) sebagai gerakan *Millenarisme* yaitu kebangkitan ro-roh kembali ke desa-desa untuk memulihkan surga dunia, kembalinya ke leluhur, dan dipertahankannya adat istiadat yang diharuskan oleh pemimpin dari penegak adat.

1.2.4. Negara Sebagai Mesin Produksi Tindakan Kekerasan

Gurr (1970: 3-4) yang memusatkan perhatian pada kekerasan politik mendefinisikan kekerasan sebagai :

"all collective attacks within a political community against the political regime, its actor - including competing political groups as well as incumbents or its policies. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence, but the explanation is limited to that property. The concept subsumes revolution, Ordinarily defined as fundamental socio-political change accomplished through violence. It also included guerilla wars, coups de tat, rebellions and riot. (Semua serangan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, para aktor politik yang bersaing, maupun para pejabat atau kebijakan - kebijakannya. Konsep ini menggambarkan suatu kejadian sebagai milik bersama yang memilih tindakan dengan ancaman kekerasan. Tetapi penjelasannya tidak terbatas pada kepemilikan

bersama, tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan tekanan dan ancaman penggunaan kekerasan, dalam bentuk revolusi, perang gerilya, kudeta dan kerusuhan.).

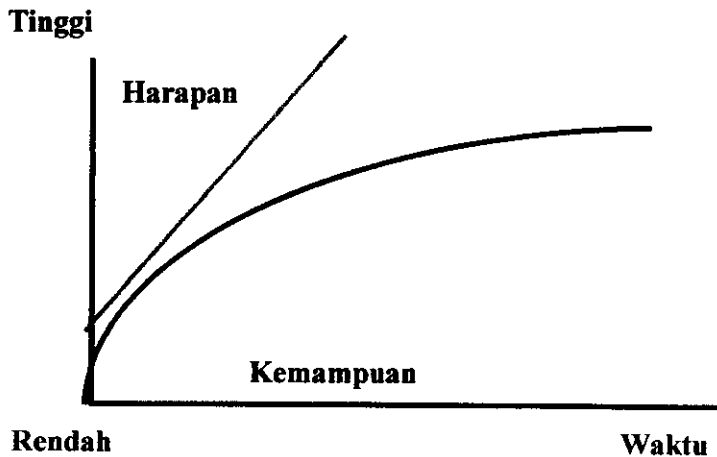
Konsep kekerasan politik menurut Gurr di atas, adalah ancaman atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok orang yang tidak puas terhadap tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui elite-elite penguasa. Sebaliknya konsep ini menjelaskan pula bahwa negara dengan kebijakannya dapat melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan kewenangannya dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menangani tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Kekerasan kolektif lebih jauh dijelaskan oleh Gurr (1970:24) sebagai akibat kesenjangan antara nilai pengharapan (*value expectation*) dan nilai kemampuan (*value capabilities*) yang disebut sebagai deprivasi relatif. Nilai pengharapan adalah barang-barang kebutuhan hidup yang dipercayai sebagai hak milik mereka; dan nilai kemampuan adalah barang-barang dan kondisi yang menurut mereka mampu diperoleh dan dipelihara.

Pada bagian lain Gurr (1970:46) menyebutkan bahwa deprivasi relatif ini dapat terjadi dalam tiga pola yaitu : *decremental deprivation* yaitu suatu kondisi dimana nilai pengharapan dalam masyarakat relatif konstan, namun nilai kemampuan makin menurun; *aspirational deprivation*, yaitu suatu keadaan dimana nilai kemampuan relatif statis, namun nilai pengharapan dalam masyarakat mengalami peningkatan; *progressive deprivation*, yaitu kondisi yang terjadi ketika nilai pengharapan meningkat, bersamaan dengan menurunnya kemampuan secara substantatif dalam memenuhi harapan. Ketiga pola tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab atau faktor pendorong (*predisposition factors*) terjadinya kekerasan politik.

Pada masa pemerintahan Ode Baru, tuntutan atas ketidakadilan dan eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah pusat, telah menimbulkan kekecewaan beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Papua, Riau, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut akibat perampasan terhadap hak-hak adat dan hilangnya sumber matapencaharian penduduk yang terkait dengan hasil hutan. Beramaan dengan itu, kemampuan mereka untuk mendapatkan sumberdaya yang seharusnya mereka dapatkan, terhalang oleh tindakan militer yang menganggap masyarakat sebagai pengganggu kesinambungan eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh investor. Gambaran mengenai kondisi deprivasi relatif di atas cenderung berada pada pola *progressive deprivation*, dimana tuntutan (harapan) yang meningkat dari kelompok masyarakat, berbarengan dengan menurunnya kemampuan untuk memenuhi nilai harapan tersebut. Konsep deprivasi relatif ini dapat juga dijelaskan pada saat bangsa Indonesia memasuki era transisi menuju demokratisasi, khususnya pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Kecenderungan ini dapat dijelaskan mulai terbukanya sumbatan demokrasi di Indonesia yang telah mendorong meningkatnya harapan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, namun kondisi ini berlangsung pada saat melemahnya peran negara. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat itu disebut *anomie*, yaitu kondisi yang membabibuta (*normlessness*). Keadaan seperti ini dijelaskan oleh Gurr (1970:55) sebagai perubahan yang cepat sehingga terjadi ketidakmampuan lembaga sosial dan politik untuk menyesuaikan dengan kondisi perubahan tersebut.

Kondisi di atas digambarkan oleh Gurr (1970:53) sebagai *progressive deprivation* seperti terlihat pada grafik 1. dibawah ini.

Grafik 1. Model deprivasi progresif

Sumber : Ted Robert Gurr (1970:59)

Dalam memahami kekerasan politik, Gurr (1995:124-130) menyebutkan bahwa kekerasan kolektif itu akan terjadi jika: *pertama*, meningkatnya keresahan dalam masyarakat akibat tekanan-tekanan ekonomi dan politik. *Kedua*, meluasnya kerugian komunal (*collective disadvance*), yaitu : Kesenjangan ekonomi dan politik, diskriminasi kelompok dan tekanan demografis dan ekologis. *Ketiga*, terdapat tiga faktor eksternal yang mendistribusikan identitas kelompok yaitu, besarnya ketidakberuntungan antar kelompok dalam masyarakat, meluasnya perbedaan budaya di antara kelompok dalam interaksinya dengan kelompok lain, intensitas konflik dengan kelompok lain dan dengan negara. *Keempat*, meluasnya kohesi kelompok (*cohesi group*) dan mobilisasi kelompok.

Kuatnya kohesi kelompok ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan koalisi dengan kelompok - kelompok lain. Efektivitas mobilisasi dalam kelompok - kelompok yang terpecah tergantung dengan bentuk koalisi di antara kelompok dan kegigihan perjuangan para pemimpin. *Kelima*, kesempatan melakukan tindakan politik (*political oportunity*) tergantung dengan sentral isu yang sangat berpengaruh dalam pengambilan

keputusan komunal. Sentral isu tersebut merupakan faktor-faktor internal : meluasnya keresahan, identitas kelompok, jaringan kerja antar anggota dan elemen dari pimpinan (*leader*) untuk melakukan gerakan politik.

Teori Gurr ini menempatkan orang-orang yang tidak puas terhadap kondisi yang ada, yaitu orang-orang yang dirugikan atau orang-orang yang tertindas mudah dimobilisasi untuk melakukan tindakan yang bersifat radikal. Dalam hal ini, peran subjek dan pimpinan-pimpinan kelompok (*group leader*) sangat penting dalam mematuhi tindakan yang dilakukan.

Dari sudut pandang yang lebih luas Galtung (1980:67) mendefinisikan kekerasan sebagai sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Berdasarkan konseptualisasi ini Galtung membedakan dua jenis yaitu kekerasan langsung (*direct violence*) dan kekerasan struktural (*structural violence*).

Pemikiran Galtung di atas menempatkan negara secara struktural sebagai pencipta kekerasan. Terdapat empat aspek yang termasuk dalam kategori tindakan monopoli sebagai bentuk penjajahan terhadap suatu komunitas. Keempat aspek itu adalah, *pertama*, aspek *eksploitasi* yang dipahami sebagai relasi pertukaran antara dua orang atau kelompok, di mana terdapat jurang antara orang-orang yang mendapat keuntungan paling banyak dengan orang yang paling sedikit terus meningkat. *Kedua*, aspek *penetrasi* berupa pemaksaan masuknya gagasan dari kelompok yang berkuasa kepada kelompok yang dikuasai. *Ketiga*, aspek *fragmentasi* sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperkuat ketimpangan untuk mengokohkan dominasi. *Keempat* aspek *marjinalisasi* yaitu memberi stigma terhadap suatu komunitas pinggiran sebagai orang yang bodoh atau terbelakang. Bentuk-bentuk kekerasan yang nampak

sebagai implikasi dari keempat aspek tersebut adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya, distribusi pendapatan, pendidikan, pelayanan kesehatan serta wewenang dalam pengambilalihan keputusan menyangkut sumber daya.

Kekerasan struktural ini juga dapat terjadi pada tatanan *mind* dan *nature* ketika pembangunan dengan penonjolan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pinjaman luar negeri dengan politik utang dan membenarkan tindakan eksploitasi sumber daya hutan oleh pengusaha HPH secara besar-besaran tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat adat; hilangnya mata pencaharian penduduk yang sangat tergantung pada hasil-hasil hutan; dan degradasi lingkungan yang mengganggu arena kehidupan manusia. Kekerasan struktural dari Galtung ini bukan hanya dilakukan anggota masyarakat, tetapi juga oleh pejabat negara dan pengendali kapital swasta.

Tabel 1.1

Karakteristik Tindak Kekerasan dalam Masyarakat

Aras	Pelaku	Dimensi	Medium / Sarana	Ruang Lingkup
Negara	Aparat Negara	Fisik, Non Fisik (teror mental)	Senjata dan organisasi tentara dan polisi kebijakan publik	Komprehensif
Struktur Sosial	Aparat Negara	Non Fisik (Politik, ekonomi, sosial, budaya)	Kebijakan publik. Proses dan sarana Produksi / akumulasi Kapital	Komprehensif
Personal / Komunitas	Individu. Kelompok.	Fisik	Kelompok anomie Tindakan individual	Terbatas

Sumber : Mochtar Mas' oed (2001 : 6)

Tabel 1.1 di atas, menggambarkan kekerasan politik sebagai proses yang berlangsung pada tiga arus : negara, struktur sosial, dan personal atau komunitas. Dalam masing-masing aras tindak kekerasan itu dilakukan oleh aktor yang berbeda, dengan dimensi, medium, dan ruang lingkup yang berbeda. Pada aras negara, kekerasan

dilakukan oleh aparat negara dan bersifat komprehensif. Kekerasan juga bisa terjadi pada tingkat struktur sosial, seperti ketika pelaku bisnis HPH yang demi mengejar akumulasi kapital secara cepat membuat penduduk lokal kehilangan tanah garapannya dan menjadi marjinal di kampungnya sendiri. Kekerasan yang lebih banyak diperhatikan adalah kekerasan pada tingkat personal/komunal, sebagai refleksi dari kondisi ketidakpastian yang dialaminya. Kekerasan personal/komunal ini memiliki cakupan yang sangat terbatas dan tidak didukung oleh pengorganisasian yang canggih.

Sebagai mesin produksi dalam tindakan kekerasan, negara dapat dilihat sebagai struktur yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan warga masyarakat. Terhadap kewenangan tersebut, negara dapat melakukan pemaksaan melalui legitimasi pemaksaan, seperti pendekatan keamanan (*security approach*) untuk membenarkan tindakan militer dalam mengamankan proses pembangunan

1.2.5. Kajian Teori Struktural

Salah satu cara untuk menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan adalah dengan menggunakan teori struktural konflik. Pada prinsipnya teori ini berbeda dengan teori struktural fungsional Parsons yang menitikberatkan pada tertib sosial bagi interaksi individu dalam struktur atau dunia sosial. Perbedaan pandangan tersebut adalah sebagai berikut : : *pertama*, teori fungsionalis menempatkan semua elemen masyarakat sebagai penyumbang terjadinya stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya teori konflik berpandangan bahwa elemen masyarakat akan memberikan kontribusi terhadap terjadinya integrasi dan konflik dalam kehidupan masyarakat; *kedua*, para fungsionalis cenderung melihat masyarakat dalam suasana kehidupan bersama yang diatur oleh norma-norma dan nilai-

nilai. Sebaliknya para pengikut teori konflik berpandangan bahwa integrasi merupakan pemaksaan (*coercion*) kelompok masyarakat yang dominan dalam kehidupan masyarakat; *ketiga*, para fungsionalis lebih fokus pada perekat (*cohesion*) yang dibangun dari sistem nilai-nilai dan norma-norma, sebaliknya teori konflik lebih menitik beratkan pada peranan kekuasaan dalam memelihara tertib sosial.

Salahsatu tokoh yang mengembangkan teori konflik adalah Ralf Dahrendorf yang dikenal sebagai sosiolog konflik karena kritiknya terhadap struktural fungsional yang dianggap mengabaikan konflik yang merupakan bagian yang melekat (*inherent*) dalam kehidupan masyarakat. Dahrendorf (1959:162) berpendapat bahwa : *pertama*, setiap masyarakat selalu mengalami proses perubahan; dan perubahan sosial merupakan gejala yang melekat dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, setiap masyarakat selalu menunjukkan adanya konflik dan ketidaksepakatan (*dissensus*); konflik sosial selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. *Ketiga*, setiap unsur dari masyarakat memberi andil bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. *Kempat*, setiap masyarakat terintegrasi berdasarkan paksaan (*coercion*) oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain.

Konflik dan perubahan sosial di atas, bersumber dari perebutan atas sumber daya yang langka, sehingga terjadi pembagian sumber daya yang tidak merata. Akibatnya dalam kehidupan masyarakat terdapat kelompok yang punya dan kelompok yang tidak punya. Kondisi tersebut dalam aliran pemikiran Marxist disebabkan oleh kepemilikan faktor produksi, sehingga menimbulkan kelas *borjuis*, yaitu kelompok pemilik faktor produksi dan kelas *proletar* yang tidak memiliki faktor produksi; sedangkan aliran non Marxist memandang bahwa konflik disebabkan oleh perbedaan dalam kepemilikan kewenangan (*authority*), yaitu antara kelompok yang memiliki kewenangan dan yang tidak memiliki kewenangan.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat, menurut Dahrendorf (1959:176) bersumber dari adanya perbedaan posisi kewenangan (*authority*), yaitu satu pihak sebagai kelompok dominan yang berusaha memelihara struktur sosial melalui kewenangannya yang sah (*legitimate*) dan kelompok yang tidak memiliki kewenangan (*subjection*) yang berusaha melakukan perubahan terhadap kondisi sosial yang dirampas oleh pihak kelompok dominan.

Dengan struktur masyarakat seperti di atas, terdapat kelompok masyarakat yang secara hirarki mengontrol kehidupan kelompok masyarakat lainnya yang disebut kelompok masyarakat yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinated association*). Konteks pemikiran Dahrendorf ini menempatkan negara sebagai kelompok yang memaksa terhadap warga negara untuk mengikuti kehendak para penguasa sehingga terjadi stabilitas dalam kehidupan masyarakat.

Peran negara yang kuat dan represif di negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, menurut O'Donnell (1979) dalam konsepnya mengenai otoriterisme-birokrasi (*bureaucratic authoritarianism*) adalah sebagai syarat untuk mengamankan pembangunan ekonomi dan modal kapitalis mancanegara. Apa yang paling memungkinkan untuk menciptakan stabilitas politik ini adalah negara di bawah komando militer. Karena itu, pembangunan ekonomi di negara-negara terbelakang bukannya mendorong demokrasi, tapi sebaliknya menjauhi demokrasi, di mana peran negara menjadi sangat sentral, sementara massa disingkirkan dalam proses politik (Liddle dan Mujadi, 2000:136).

Pengalaman pembangunan pada masa Orde baru, digambarkan oleh Mas'ood (2008:140-146) sebagai kekuatan negara dan pasar. Negara yang diwakili oleh para elite penguasa telah merumuskan tujuan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan

ketertiban politik. Untuk mendukung proses pembangunan tersebut dibutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Pada bidang ekonomi diberlakukan mekanisme pasar dengan memberikan peran yang besar kepada pelaku aktor swasta sebagai unit ekonomi yang dominan dalam pasar bebas.

Konteks pemahaman mengenai hubungan antara negara dengan pasar ini telah mendorong negara sebagai kekuatan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan melibatkan pelaku ekonomi pasar untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Bertemunya dua kelompok kepentingan ini, yaitu elite penguasa dan pelaku pasar digambarkan oleh Dahrendorf sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) dan kepentingan semu (*quasi group*) yang berkualitas karena memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini, setiap kelompok semu baik yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan dapat melahirkan kelompok kepentingan nyata (*manifest interest*).

Menurut Dahrendorf, kelompok semu harus memenuhi tiga persyaratan untuk dapat terorganisir dalam bentuk kelompok kepentingan nyata. *Pertama*, kondisi teknis suatu organisasi (*technical condition of organization*), yaitu adanya kelompok kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir kepentingan terpendam dari kelompok semu menjadi kepentingan nyata. Kepentingan nyata tersebut dirumuskan sebagai sistem nilai dan menjadi pedoman bagi perjuangan organisasi. *Kedua*, kondisi politik suatu organisasi (*political condition of organization*), yaitu adanya kebebasan yang diberikan oleh kelompok dominan untuk mengorganisir kepentingan semu menjadi kepentingan nyata. *Ketiga*, kondisi sosial suatu organisasi (*social condition of organization*), yaitu adanya kesempatan bagi anggota kelompok semu untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Tanpa adanya kondisi sosial ini, maka

tersedianya pemimpin dan kesempatan untuk berkomunikasi tidak menjamin untuk merekrut anggota kelompok semu menjadi kelompok kepentingan. (Turner, 1978:152)

Ketiga persyaratan di atas, merupakan variabel antara (*intervening variable*) yang berpengaruh terhadap munculnya intensitas konflik dan tindakan kekerasan, sesuai penjelasan Dahrendorf pada proposisi berikut ini : *pertama*, semakin lemah kondisi teknis, politik dan sosial, maka intensitas konflik semakin meningkat (keterlibatan pelaku, dana dan pikiran). Kondisi ini mencerminkan bahwa demokratisasi masih belum berjalan dengan baik, dilihat dari belum tersedianya media komunikasi yang menyediakan ruang dialog untuk memberikan pemahaman bersama mengenai masalah yang dihadapi, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan sebagai pengaturan konflik. *Kedua*, Semakin lemah kondisi teknis, politis dan sosial, maka akan mendorong konflik menjadi tindakan kekerasan (sarana yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan). *Ketiga*, semakin rendah kemampuan kelompok konflik mengembangkan kesepakatan dalam pengaturan konflik, maka konflik akan meningkat menjadi tindakan kekerasan. Pengaturan konflik ini dapat dilakukan dalam bentuk mediasi, yaitu pengaturan konflik yang melibatkan pihak ketiga, tetapi keputusan pihak ketiga (*mediator*) tidak mengikat pihak-pihak yang berkonflik; dan arbitrase, yaitu pengaturan konflik yang melibatkan pihak ketiga (*arbitrator*) dengan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang bertikai.

Tokoh lain yang mengembangkan teori konflik adalah Lewis A.Coser yang merupakan murid dari Simmel. Coser (1956:31) mengutip pendapat Simmel menyebutkan bahwa konflik adalah suatu bentuk sosialisasi, dengan pengertian bahwa tidak ada yang sama sekali harmoni dalam proses sosial dan struktur. Mereka membutuhkan harmoni sama dengan disharmoni, kekompakan dan perpecahan. Dalam

hal ini konflik bukan sebagai sebagai faktor pengganggu tetapi konflik merupakan fungsi sosial yang melahirkan kerjasama sehingga konflik merupakan elemen penting dalam kehidupan kelompok dan keberlangsungan kelompok.

Mendukung pernyataannya di atas, Simmel menyebutkan bahwa konflik akan membangun dan memelihara identitas dan garis-garis batas masyarakat dan kelompok masyarakat. Selain itu, konflik akan membangun pengakuan terhadap identitas kelompok dan memelihara batas-batas budaya yang bertentangan di sekeliling dunia sosial. (Cosser, 1964:38).

Pandangan Cosser mengenai konflik ini menurut Ritzer dan Smart (2001:146-147) saling memperkuat (*convergence*) dengan pendapat Dahrendorf mengenai teori konflik, yaitu hubungan antara kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Hubungan ini akan mendorong ke arah keseimbangan yang mengarah pada konsensus, sementara Cosser melihat konflik sebagai upaya untuk mendorong konsensus dan perubahan. Dengan demikian mereka berpandangan bahwa konflik dalam konsekuensi yang positif dapat mengurangi ketegangan dan mendorong ke arah keberlangsungan sistem.

Pada bagian lain, Cosser (1964:37-38) berpendapat bahwa konflik dapat disebabkan oleh adanya ketegangan dalam masyarakat. Tetapi ketegangan tersebut tidak selalu menimbulkan konflik, walaupun meningkatnya intensitas ketegangan dapat mendorong ke arah terjadinya konflik. Dalam hal ini konflik ketegangan hanya merupakan tindakan antara (*trans action*). Tetapi dalam suasana ketegangan, ketika terjadi distribusi yang tidak merata seperti pemberian hak-hak istimewa kepada kelompok lainnya, akan meningkat rasa ketegangan yang akan menimbulkan konflik. Dalam hal ini, Cosser juga sependapat dengan Dahrendorf bahwa negara mempunyai

andil yang besar atas terjadinya konflik, yaitu memperbesar ketegangan-ketegangan dalam masyarakat dengan menciptakan pembagian distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan sosial.

Menurut Turner (1978:185), Coser dan Dahrendorf memiliki kesamaan pandang bahwa konflik disebabkan oleh distribusi yang tidak merata terhadap sumber daya yang langka dalam sistem sosial. Sebaliknya konflik juga dapat menata kembali organisasi (*reorganized*) atau mendorong integrasi dari kelompok-kelompok masyarakat melalui penyesuaian (*adaptability*) dan kelenturan (*flexibility*).

Pada bagian yang lain, Turner (1978:190-191) melihat adanya perbedaan, antara Dahrendorf dan Coser dalam menjelaskan terjadinya intensitas konflik dan kekerasan. Coser menyebutkan bahwa bahwa akibat distribusi yang tidak merata, menyebabkan kelompok masyarakat yang tidak menerima sumberdaya secara proporsional akan menarik diri dari sistem. Kondisi ini akan meningkatkan emotional dari kelompok masyarakat yang dirugikan akibat tidak efektifnya mekanisme kontrol sosial dalam menekan peningkatan emosional tersebut dan tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh para aktor. Selanjutnya, ledakan emotional dan kekecewaan juga akan meningkat, jika kontrol sosial dan sosialisasi dilakukan secara kasar (*harsh*) dan dalam situasi tekanan-takanan yang tinggi (*highly repressive*). Akhirnya, terjadi peningkatan intensitas yang dilakukan oleh aktor sebagai pendorong kelompok orang-orang yang emotional ke dalam konflik.

Bagi Dahrendorf, tahapan terjadinya kekerasan dalam konflik mulai keluarnya kelompok masyarakat dari sistem, kepedulian terhadap kepentingan mereka, meningkatnya emotional dan kekecewaan, berhubungan dengan upaya melibatkan mereka ke dalam organisasi. Kemampuan organisasi tersebut meliputi ketersediaan

para pemimpin dan menyatukan kepercayaan (*technical condition*), adanya toleransi dari organisasi politik untuk mengatur distribusi sumber daya yang langka dalam kehidupan masyarakat (*political condition*) dan kemampuan untuk mengkomunikasikan keluhan-keluhan dan memasukan mereka ke dalam organisasi (*social condition*).

Turner (1978:195) menggabungkan teori konflik Coser dan Dahrendorf dengan menawarkan tiga proposisi terjadinya kekerasan dalam konflik, yaitu

(a) jika *technical, political and social condition* tidak bisa dilakukan secara bersamaan (b) kegagalan dalam mendefinisikan kepentingan yang sebenarnya dari kelompok masyarakat (c) sistem yang tidak memiliki aturan secara formal dalam menangani konflik dan tidak dilakukannya mediasi oleh aktor, akan meningkatkan kekerasan dalam konflik.

1.2.6. Teori yang digunakan

Upaya menjelaskan terjadinya konflik etnis di Sampit tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang tetapi merupakan perpaduan dari beberapa faktor yang saling memperkuat terjadinya konflik. Karenanya, penelitian ini menggunakan teori konflik dari Dahrendorf dan Coser dan gabungan teori konflik dari Dahrendorf dan Coser.

Dahrendorf menyebutkan bahwa sumber konflik adalah akibat adanya otoritas yang mendorong adanya kelompok superordinat (yang mengatur) dan kelompok subordinat (yang diatur). Pemikiran ini menempatkan masyarakat berada dalam posisi yang dikontrol oleh pihak pemegang otoritas, yaitu negara (*imperatively coordinated association*). Posisi kontrol dari negara ini dapat bersifat memaksa, sehingga kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dan cenderung memihak dan bergabung dengan kelompok kepentingan. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan sosial dan

ekonomi yang dapat menimbulkan konflik yang bersifat vertikal dan mendorong terjadinya konflik yang bersifat horizontal.

Pada sisi lain Coser (Ritzer, 1996:132) menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang berstruktur secara longgar. Dalam masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dengan kelompok masyarakat lain dapat memperbaiki integrasi dalam komunitas masyarakat yang bersangkutan.

Konteks pemikiran Coser di atas, menunjukkan bahwa konflik dapat diciptakan untuk memperkuat solidaritas kelompok masyarakat dan merupakan propaganda untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang membelenggu kehidupan mereka. Kondisi ini terkait pula dengan fungsi konflik yang dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

Konflik dapat juga membantu fungsi komunikasi untuk memperjelas batas-batas antar kelompok yang bertikai, sehingga individu dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap lawan mereka. Dengan konflik, memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai kekuatan relatif mereka dan memungkinkan untuk saling mendekati atau saling berdamai.

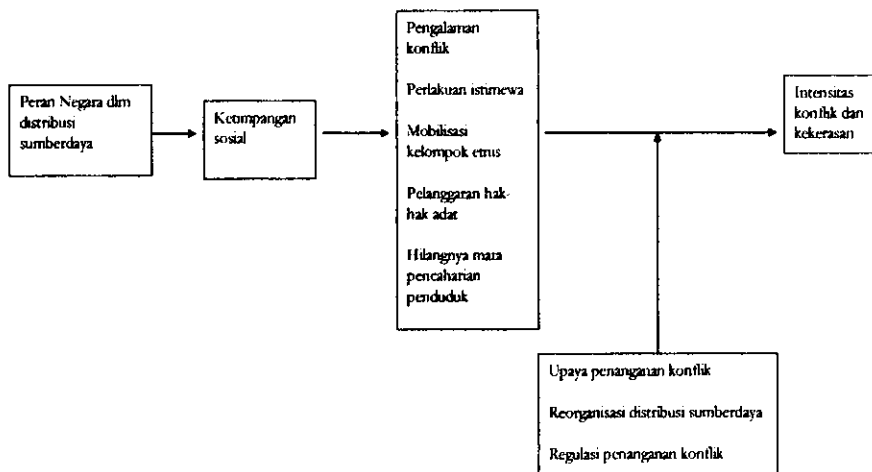
Pemikiran Coser di atas memperlihatkan kecenderungan teorinya pada konflik dan perubahan sosial, dimana konflik dianggap sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi yang positif untuk memelihara keberlangsungan sistem.

Dalam konteks teoritis, konflik etnis di Sampit dapat dijelaskan dengan menggunakan teori struktural konflik dari Dahrendorf dan Coser; dan gabungan teori konflik Dahrendorf dan Coser, yang menawarkan tiga proposisi terjadinya kekerasan dalam konflik, yaitu : (a) jika *technical, political and social condition* tidak bisa

dilakukan secara bersama-sama (b) kegagalan dalam mendefinisikan kepentingan yang sebenarnya dari kelompok masyarakat (c) sistem yang tidak memiliki aturan secara formal dalam menangani konflik dan tidak dilakukannya mediasi oleh aktor, akan meningkatkan kekerasan dalam konflik.

Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, maka tinjauan sosiologis dari konflik etnis di Sampit ini akan memperlihatkan peranan negara melalui otoritasnya dalam mengatur kehidupan masyarakat, berpotensi menimbulkan konflik serta konsekuensi konflik yang mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Diagram 2
Modifikasi Model Turner (1978)
Gabungan Teori Konflik Dahrendorf dan Coser



1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya konflik etnis antara orang Dayak dengan orang Madura di Sampit dan menemukan faktor struktural yang menyebabkan terjadinya konflik etnis di Sampit.

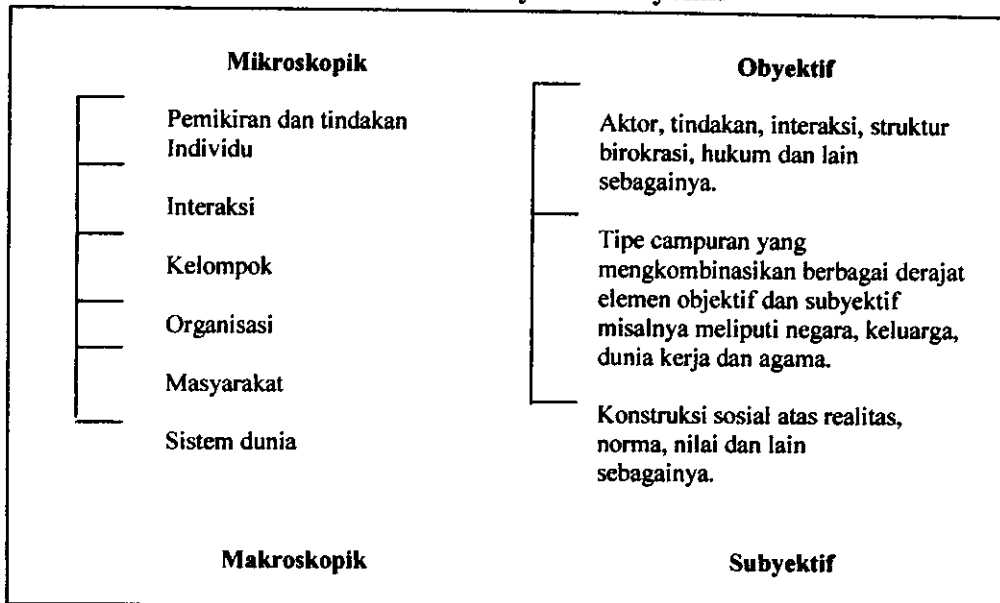
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan paradigma fakta sosial, karena dunia sosial yang ingin dikaji berhubungan dengan struktur sosial dalam skala luas, institusi serta efeknya terhadap pemikiran-pemikiran dan aksi individu.

Menurut Ritzer (1996:515) pendekatan struktur yang didasarkan pada paradigma fakta sosial terdapat kualitas historis dan dinamika struktur yang membentuk makro struktur. Dalam konteks ini, interaksi dan aksi aktor setiap hari turut berperan dalam dalam memproduksi dan mereproduksi makro-struktur (makro subyektif) atau struktur yang lebih luas.

Sedangkan pada pendekatan konstruksi sosial yang menggunakan paradigma definisi sosial terfokus pada tindakan, interaksi dan konstruksi sosial, terdapat peran aktor yang sangat berpengaruh dalam memproduksi dan mereproduksi mikro struktur (mikro-subyektif). Berdasarkan pemikiran di atas, dibutuhkan pendekatan alternatif yang memadukan *levels of analysis* antara pendekatan makroskopis dan mikroskopis sehingga melahirkan metateori, seperti terlihat pada diagram 3 berikut ini:

Diagram 3.

Kesatuan Makroskopis-Mikroskopis dan Kesatuan Obyektif-Subyektif



sumber : Ritzer (1996)

Pendekatan terpadu dalam pandangan Guba dan Lincoln (1994:112-113) disebut sebagai pendekatan alternatif dengan nama teori kritis. Pada tataran penyelidikan, pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki transformasi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang membentuk dinamika struktur. Sedangkan pada tataran pengetahuan, meliputi keadaan struktur dan historis yang telah mengalami perubahan akibat dinamika struktur yang dibentuk oleh dialektika antara aktor dan struktur.

Pendekatan kritis ini, menurut Harvey dan MacDonald mengarahkan pentingnya melihat keterbatasan aktor dalam berbuat dan berpikir yang disebabkan oleh *the nature of the social world* di mana mereka tinggal. Dengan demikian, pendekatan kritis mengajak kita untuk memperhatikan *social context* baik secara historis maupun keterkaitannya dengan struktur sosial. (Sugandi, 2002:111)

Sejalan dengan pemikiran Sugandi ini, Guba dan Lincoln (1994) menyebutkan bahwa untuk memahami (*understanding*) dialektika antara aktor dan struktur tersebut

harus dibangun dengan cara dialogis serta memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada tingkat analisisnya.

1.3.2. Lokasi Penelitian

Kota sampit yang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Sampit sebagai tempat terjadinya konflik antar etnis yang terbesar di Kalimantan Tengah. Kota Sampit juga dikenal sebagai kota pelabuhan yang banyak menerima pendatang baik melalui pelabuhan Surabaya, pelabuhan Semarang, maupun jalur darat melalui jalan trans Kalimantan poros selatan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Data penduduk berdasarkan etnis di Sampit yang diperoleh dari *International Crisis Group* (ICG) bahwa komposisi penduduk di kota Sampit didominasi oleh kelompok etnis Madura, yaitu : Madura 60 %, Banjar 20%, Jawa 10 %, dan Dayak 10 %. Penduduk etnis Madura tersebut sebagian besar berusaha dibidang perdagangan, pelayanan jasa dan transportasi. Dengan demikian kontak dengan etnis Madura menjadi semakin intensif.

Bagi pemerintah daerah Kotawaringin Timur, para pendatang adalah aset daerah dalam mempercepat pembangunan dan ambisi pemerintah daerah untuk menjadikan kota Sampit sebagai pintu gerbang perekonomian bagi daerah Kalimantan Tengah. Percepatan pembangunan tersebut telah menghasilkan konsentrasi pembangunan yang terpusat di kota Sampit dan menciptakan kesenjangan terhadap masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai Mentaya, Seruyan dan Katingan. Sebagai kelompok yang terpinggirkan, solidaritas masyarakat di Tiga DAS tersebut semakin kuat untuk mewujukan kabupaten baru berdasarkan UU No.22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah. Dalam konflik dan kekerasan etnis di sampit, kelompok masyarakat di tiga DAS

ini merupakan kekuatan utama untuk mengembalikan kota Sampit dari penguasaan kelompok etnis Madura.

Kasus konflik dan kekerasan etnis di Sampit merupakan masalah nasional yang akan dipahamai dari narasi-narasi lokal untuk mengetahui sejauhmana intensitas konflik itu memiliki kecenderungan melahirkan tindakan kekerasan. Narasi-narasi lokal ini bersumber dari pengalaman-pengalaman individu atau kelompok masyarakat ketika merespon permasalahan yang dihadapinya. Kondisi ini terus berlangsung hingga melahirkan konflik dan kekerasan antara etnis Dayak dan Madura. Salah satu narasi lokal yang diproduksi ketika berlangsungnya konflik tersebut adalah bangkitnya budaya *ngayau (revivalisme)* yang sudah hampir punah sejak Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1984. Bangkitnya budaya *mengayau* ini terkait pula dengan hadirnya roh-roh leluhur untuk memberikan *hambaruan* (semangat dan kekuatan) di kalangan warga Dayak untuk berperang melawan kelompok etnis Madura sebagai upaya *mambaleh* (membalas) atas pelanggaran terhadap *utus* (harga diri) orang Dayak.

1.3.3. Pemilihan Subjek Penelitian

Guna mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu fakta sosial yang melihat dunia sosial sebagai sesuatu yang nyata yang tidak dapat diamati secara langsung, data yang dibutuhkan adalah : *pertama*, data sekunder dalam bentuk dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang berasal dari Dinas Sektoral, Badan Pusat Statistik, Bappeda dan Pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur serta data pendukung lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. *Kedua*, tuntutan metodologis, menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif untuk memahami dinamika struktur dan historis yang mendorong terjadinya perubahan dalam struktur. Dinamika

struktur dan konteks historis tersebut dilakukan melalui cara-cara dialogis untuk memahami dialektika aktor dalam struktur.

Dengan demikian, diperlukan sejumlah subjek (aktor) yang dipilih dengan menggunakan model pilihan bertujuan (*purposive*). Pertimbangan yang dilakukan dalam pemilihan subjek (aktor) meliputi (a) kepeduliannya terhadap konteks informasi yang hendak digali, (b) pemahamannya terhadap proses terjadinya konflik dan kekerasan (c) mengetahui cara-cara menangani konflik dan kekerasan (d) bersifat terbuka untuk memperkaya informasi hingga pada tingkat kejenuhan (*saturation*), dan (e) kemampuannya dalam mengembangkan kepribadian selama kegiatan penelitian berlangsung (f) adanya perimbangan jumlah subjek yang berasal dari etnis Dayak dan Etnis Madura.

Berdasarkan kriteria pemilihan subjek di atas, dilakukan wawancara terhadap subjek penelitian yang terdiri atas etnis Dayak sebanyak 7 orang, dan etnis Madura 7 orang. Orang-orang yang dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang tersebar berdasarkan keterlibatan dan peranannya dalam konflik dan kekerasan etnis di Sampit.

Dari kalangan agama Hindu Kaharingan adalah Lewis KDR (65 Thn) yang memiliki jabatan sebagai ketua Badan Pertimbangan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Kalimantan Tengah. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Lewis secara konsisten mempertahankan kepercayaan Kaharingan dari tekanan-tekanan yang merendahkan orang-orang penganut Kaharingan dan intervensi dari agama lain yang berdampak menurunnya jumlah penganut Kaharingan. Pada tahun 1980, perjuangan Lewis dan kawan-kawannya telah berhasil mengangkat kepercayaan Kaharingan sebagai Agama, walaupun berintegrasi dengan agama Hindu dan menjadi agama Hindu

Kaharingan. Dalam dunia politik, Lewis pernah menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah periode 1999 –2004 dan memperjuangkan keseimbangan kekuasaan berdasarkan penganut agama Islam, Kristen dan Kaharingan.

Sebagai tokoh masyarakat, ia memahami bahwa nilai-nilai kepercayaan Kaharingan sangat berpengaruh dalam tindakan orang-orang Dayak. Oleh karena itu, pemahaman tersebut akan digali dan didiskusikan bersama untuk memperoleh suatu penjelasan mengenai pandangan hidup orang Dayak dalam kehidupan bersama, sehingga orang dapat memahami mengapa orang Dayak melakukan suatu tindakan tertentu untuk merespon masalah yang dihadapinya.

KMA. M. Usop (70 Thn) yang berasal dari kalangan akademisi adalah budayawan dan pimpinan tertinggi (ketua presidium) Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) yang memiliki kepengurusan pada tingkat propinsi, kabupaten, hingga kecamatan dan desa-desa. Ia dikenal sebagai tokoh nasionalis yang menjembatani aspirasi politik masyarakat Dayak yang menghendaki gubernur putera daerah, termasuk jabatan bupati, kepala dinas dan instansi teknis di Kalimantan Tengah. Salah satu gerakan sosial yang dilakukannya bersama-sama dengan masyarakat adalah menentang dropping gubernur oleh pemerintah pusat dan menggagalkan Karna Suhandi sebagai Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1996. Dalam berbagai pertemuan, seminar, kongres, Usop mengangkat dan memperjuangkan nasib masyarakat Dayak yang termarginalisasi oleh proses pembangunan serta tekanan-tekanan politik yang menjadikan orang Dayak menjadi asing di negeri sendiri.

Sebagai tokoh masyarakat, ia selalu siap membantu memberikan bimbingan dan nasehat kepada masyarakat. Dalam suasana konflik dan kekerasan yang terjadi di

Sampit, peranannya sangat besar dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut, bahkan pernah ditahan di tahanan Mabes Polri dengan tuduhan sebagai dalang terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit. Pemahaman yang akan digali terfokus pada isolasi politik yang dialami oleh masyarakat Dayak dan upaya-upaya yang dilakukan dalam merespon tekanan-tekanan politik tersebut.

Fedlik Aser (45 Thn) yang pernah di tahan di Markas Polda Kalteng berkaitan dengan konflik dan kekerasan etnis di Sampit, adalah seorang akademisi yang bekerja sebagai Kepala Bidang Penelitian Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dan Sekretaris LMMDD-Kotim. Dia dikenal sebagai tokoh pemuda yang mewakili kelompok masyarakat yang berasal dari DAS Seruyan. Aser banyak mengetahui tentang pembangunan di Kotawaringin Timur, khususnya ketertinggalan masyarakat di DAS Seruyan, Katingan dan Mentaya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999, Aser sudah mulai mempersiapkan terbentuknya wilayah DAS Seruyan sebagai Kabupaten Pemekaran.

Pada pasca konflik dia berhasil menggerakkan masyarakat untuk mendirikan tugu peringatan tragedi Sampit yang dipahaminya sebagai tugu perdamaian untuk mengingatkan segenap insan sepanjang masa bahwa sikap egois saling menindas dan menekan terhadap sesama manusia hanya akan melahirkan bentuk-bentuk perlawanan manusia terhadap manusia. Pemahamannya mengenai pembangunan di Kabupaten Kotawaringin, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan implikasinya terhadap masyarakat masih banyak yang terbungkus oleh kepentingan-kepentingan penguasa dan memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok pendatang. Oleh sebab itu, fokus pemahaman yang akan digali dari Fedlik Aser ini, di samping penjelasannya mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok etnis

Dayak terhadap kelompok etnis Madura, juga meliputi kebijakan pembangunan dan tekanan-tekanan ekonomi yang dialami oleh kelompok masyarakat Dayak dan bagaimana mereka merespon tekanan-tekanan ekonomi yang sedang dihadapi pada waktu itu.

Dewin Marang (55Thn) adalah penganut agama Hindu Kaharingan dan memiliki jabatan sebagai Ketua Majelis Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkedudukan di Sampit. Sebagai penasehat adat, pemikiran dan pertimbangannya terkait dengan konflik dan kekerasan etnis sangat diperlukan oleh warga masyarakat Dayak. Pertimbangan-pertimbangan adat ini akan banyak digali dari Dewin Marang untuk memahami tindakan orang-orang Dayak yang menggunakan atribut-atribut budaya etnis dalam konflik melawan etnis Madura. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, dia berusaha menegakkan suatu pemisahan antara ritual untuk keagamaan dan ritual yang bersifat adat, sehingga masyarakat Dayak dapat memanfaatkan dan mengembangkan adat Dayak sebagai bagian dari kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah. Pengembangan kebudayaan Dayak ini, akan dilakukannya melalui pendirian miniatur Dayak untuk memberi informasi mengenai kebudayaan Dayak dan bagi generasi muda dapat digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan identitas Dayak serta terjalin integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang pluralis. Sebagai subjek penelitian, informasi yang akan dipahami bersama-sama dengan Marang adalah pemahaman mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga masyarakat Dayak dan nilai-nilai kebudayaan Dayak serta atribut-atribut budaya etnis yang digunakan dalam melakukan tindakan tersebut.

Hendrick (25 Thn) adalah masyarakat akar rumput yang berasal dari DAS Seruyan dan terlibat langsung dalam konflik dan kekerasan etnis di Sampit. Dia juga

pernah mengerahkan massa pada tahun 2002 untuk melakukan demo menentang pelanggaran tanah adat dan tempat-tempat keramat oleh HPH Erna Djuliawati yang berkedudukan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Seruyan. Sebagai orang yang terdidik, lulusan Fakultas Non Gelar Teknologi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Palangka Raya, Hendrick di tempat asalnya telah menjadi tokoh pemuda yang mampu menggalang massa untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang semakin sulit akibat eksploitasi sumberdaya hutan. Pemahaman yang digali dari Hendrick adalah mengenai pemanfaatan sumberdaya hutan dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Dayak yang berada di DAS Seruyan serta responnya terhadap kehadiran HPH. Pemahaman lainnya yang akan dibahas adalah mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak terhadap warga Madura.

Khusus mengenai masalah pemanfaatan sumberdaya hutan dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat ini akan dipahamai dari Wahyudi K. Anwar, Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur yang banyak mencurahkan perhatiannya pada hasil hutan sebagai penyumbang terbesar pendapatan daerah. Anwar adalah seorang yang ambisius untuk menjadikan kota Sampit sebagai pintu gerbang perekonomian Kalimantan Tengah. Terhadap pemerintah pusat, Anwar menentang pengelolaan sumberdaya hutan yang dianggapnya banyak merugikan masyarakat dan daerah, dimana Kotawaringin Timur merupakan salah satu sapi perahan bagi pemerintah pusat. Salah satu kebijakannya yang sangat kontroversial dan mengundang kecaman dari pemerintah pusat adalah Perda Nomer 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Industri Kayu, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.

Esra Pahan adalah ketua umum LMMDD-Kotim dan pemilik hotel Rama yang dijadikan markas oleh orang-orang Dayak ketika terjadi konflik etnis. Sebagai ketua

Umum LMMDD-Kotim, Pahan sering mendiskusikan dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan mengenai kondisi kota Sampit sebelum terjadinya konflik. Dia menyarankan agar konflik yang terjadi antara orang Dayak dengan orang Madura dan berbagai kasus perampokan yang telah meningkat di kota Sampit harus diselesaikan secara tuntas, sehingga tidak menimbulkan dendam dan ekecewaan dari masyarakat.

During (40 Thn) adalah salah satu pasukan khusus yang terlibat langsung dalam konflik etnis di sampit. Keterlibatannya dalam konflik tersebut dianggapnya sebagai kewajiban untuk membela *utus* (harga diri) orang Dayak. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlibat dalam tindakan kekerasan, tetapi karena semangat yang kuat untuk membela *utus* (harga diri) orang Dayak, tanpa disadari dia masuk dalam dunia roh yang menyeretnya dalam konflik etnis tersebut.

Sebagai subjek perbandingan untuk memberikan keseimbangan informasi serta menghindari agar penelitian ini tidak bias Dayak, maka peneliti juga memasukan beberapa orang warga Madura sebagai subjek penelitian, yaitu : Tumi, H.Abdul Wahid, Sjahriansyah, Martijo, Lorat. Dilengkapi juga dengan pendapat dari dua orang tokoh Madura, yaitu Moch. Noor dan H. Marlinggih.

Tumi, adalah ibu rumah tangga yang bersuamikan orang Dayak, hidup dengan tiga orang anak dan kedua orang tuanya. Pada waktu konflik terjadi, kedua orang tuanya mengungsi ke Madura, sedang dia dan anak-anaknya tidak ikut mengungsi dengan jaminan suaminya dan lingkungan tetangga setempat. Terhadap Tumi ini akan dimintakan tanggapannya mengenai konflik etnis di Sampit.

H. Abdul Wahid (41 Thn) warga Madura Kelahiran Sampit dan jabatan sekarang adalah ketua Forum Komunikasi Korban Kerusakan Kalimantan Tengah. Sebelumnya, dia sebagai anggota DPRD Kotawaringin Timur periode 1999–2004,

sehingga secara umum dia banyak mengetahui mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan konflik etnis di Sampit, seperti konflik di tingkat elit lokal.

Sjahriansyah (37 Thn) pengurus Mesjid dan Pesantren Sabilih adalah salah satu korban konflik yang menewaskan orang tuanya (H. Muhamad Sabilih). Sebelumnya dia tidak percaya akan adanya konflik etnis di Sampit, sehingga perintah untuk mengungsi yang disampaikan pihak keamanan samasekali tidak dihiraukannya. Perasaan prihatin yang mendalam atas kematian orang tuanya tersebut menjadi awal pembicaraan dan sekaligus mendorong diskusi terhadap konflik yang terjadi di Sampit.

Martijo (48 Thn) sehari-hari bekerja sebagai buruh. Selain itu, secara berkelompok dia berusaha memelihara ternak sapi dan kambing di samping pekarangan rumahnya. Saat ini, ia sedang berperkara dengan orang Dayak yang telah membangun rumah di atas tanah miliknya. Namun ia sangat berhati-hati untuk mengambillalih tanah tersebut dan menghindar agar tidak terjadi konflik dengan orang Dayak.

Lorat (55 Thn) sehari-hari bekerja sebagai petani. Dia sangat berhati-hati menerima kunjungan peneliti yang dia ketahui adalah orang Dayak. Namun dengan alasan untuk pendidikan, maka ia bersedia menerima peneliti, tetapi tetap dengan berhati-hatian dalam menjawab pertanyaan yang di khawatirkan akan menyulitkan posisinya sebagai orang Madura. Terhadap Lorat ini, pada awalnya peneliti lebih berdiskusi mengenai lingkup pekerjaannya sehari-hari sebagai petani.

Dua orang tokoh Madura yaitu Muhamad Nur mantan Gubernur Jawa Timur dan H. Marlinggih ketua Ikatan Madura (IKAMA) di Sampit. Kedua tokoh tersebut tidak diwawancarai langsung, tetapi dikutip dari pernyataannya melalui media Kalteng Pos.

1.3.4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bersifat makro-obyektif, dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data berlangsung pada tanggal 20 September – 30 September 2008 di Sampit. Data yang dikumpulkan berasal dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Badan Pusat Statistik, Bappeda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk mendapatkan data yang bersifat makro-subyektif, yaitu yang berkaitan dengan historis dan dinamika struktur untuk memahami (*understanding*) dialektika aktor yang mempengaruhi aktor untuk melakukan perubahan terhadap struktur, dilakukan langsung oleh peneliti. Sebagai peneliti yang meneliti sukunya sendiri (*insider researcher*), dan bertindak langsung sebagai instrumen, maka diperlukan upaya untuk menghindari bias dalam penelitian ini. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut adalah: *pertama*, melakukan triangulasi data dengan menampilkan data pembandingan dari kelompok etnis Madura sebagai korban dalam konflik etnis di Sampit, sehingga terjadi perimbangan informasi yang tidak menyudutkan orang Madura; *kedua*, diperlukan juga penggunaan bahasa yang bersifat netral untuk memberikan kesan bahwa peneliti tidak terbawa ke dalam dunia emosional subjek, sehingga netralitas peneliti harus terkendali; *ketiga*, sedapat mungkin dalam pengumpulan data tidak memberikan pemahaman bahwa konflik etnis di Sampit hanya karena faktor orang-orang Madura.

Beberapa kesulitan yang ditemui dalam pengumpulan data ini adalah: *pertama*, pada saat wawancara dengan subjek orang-orang Dayak, umumnya mereka masih dalam suasana emosional, sehingga informasi yang disampaikan cenderung membenarkan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Dayak. *Kedua*, masyarakat Madura yang berasal dari Sampit, sangat berhati-hati dalam memberikan informasi

mengenai konflik etnis tersebut, karena ada kekhawatiran bahwa informasi yang disampaikan itu akan mengganggu keamanan mereka. Pengumpulan data telah dilakukan sejak bulan Juni sampai dengan September 2003.

Kegiatan penelitian, pada awalnya dilakukan terhadap Lewis KDR, yaitu pada tanggal 10 – 30 Juni 2003 dengan jumlah pertemuan sebanyak lima kali. Wawancara dilakukan di lobi Kantor DPRD propinsi Kalimantan Tengah yang dibangun dengan desain khas ornamen Dayak dan bentuk bangunan rumah Betang yang merupakan bangunan khas Dayak. Situasi konflik ini telah membenamkan kami dalam dialog terbuka, dengan melibatkan unsur emosional untuk memahami masyarakat Dayak dalam konteks historis maupun kejadian-kejadian yang dialami masyarakat Dayak hingga terjadinya konflik dan kekerasan terhadap etnis Madura.

Dengan KMA. M. Usop, wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni hingga 15 Juli 2003 di rumah kediamannya, dengan jumlah pertemuan yang efektif sebanyak sepuluh kali. Wawancara mengenai konflik dan kekerasan etnis di Sampit dilakukan di rumah kediaman Usop, yaitu di ruang terbuka yang dihiasi dengan lukisan-lukisan, barang-barang kerajinan dan senjata-senjata khas Dayak. Selain itu, peneliti juga mempelajari pikiran, respon melalui makalah yang disampaikan pada kongres dan seminar-seminar serta pernyataan-pernyataannya yang dimuat di media massa. Wawancara dan pemahaman dari dokumen dan pernyataan yang terhimpun terfokus pada konstruksi politik yang terbangun secara historik dan transformatif yang terkait dengan semakin kuatnya identitas Dayak Kalimantan Tengah dalam merespon masalah yang mereka hadapi, baik pada tingkat nasional, regional dan lokal.

Di Sampit, peneliti langsung melakukan observasi di daerah tempat terjadinya konflik, yaitu Kecamatan Bamang Tengah. Di sini terdapat Hotel Rama yang dijadikan

markas oleh kelompok masyarakat Dayak dan dikenal pula sebagai tempat mengumpulkan kepala manusia. Terdapat pula pemukiman Kelompok Madura di jalan Kamar Duapuluh dan kelompok pemukiman orang-orang Dayak di pinggiran sungai Mentaya.

Di beberapa tempat kejadian konflik etnis tersebut, peneliti lebih berkonsentrasi pada rekonstruksi terjadinya konflik dan kekerasan, dengan melakukan wawancara terhadap kelompok masyarakat yang banyak mengetahui dan mampu menjelaskan mengenai kejadian tersebut, di antaranya seorang ibu sukarelawan yang melayani konsumsi bagi kelompok Masyarakat Dayak yang ikut berperang, anggota Pasukan Khusus (Paus), pemilik warung sekitar kejadian dan petugas Hotel Rama. yang banyak terlibat dalam kejadian tersebut. Observasi juga dilakukan pada lingkungan tempat pemukiman warga Madura dan rumah-rumah warga Madura yang dirusak dan dibakar oleh warga Dayak.

Wawancara yang dilakukan di Sampit ini adalah dengan Fedlik Aser, Dewin Marang, Hendrick dan Anwar. Mereka menerima kehadiran peneliti dengan sangat hangat karena membicarakan masalah yang sangat penting bagi masyarakat Dayak dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wawancara dengan Fedlik Aser, dilakukan pada tanggal 4–15 Agustus 2003 dengan frekuensi pertemuan sebanyak tiga kali. Wawancara dilakukan di rumah kediamannya yang berada di belakang kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada waktu peneliti datang ke rumahnya, selalu saja ada tamu yang berasal dari masyarakat akar rumput DAS Seruyan dan Katingan, sehingga dalam wawancara mereka juga ikut terlibat memberikan informasi.

Pembicaraan diawali dengan pendirian *pantar* (tugu) peringatan tragedi Sampit yang langsung di laksanakan oleh Aser dengan mengerahkan masyarakat setempat. Pendirian *pantar* ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah berkaitan dengan isu yang menyatakan bahwa tugu yang dibangun adalah tugu perdamaian, sementara masyarakat masih menolak kehadiran warga Madura di Sampit.

Pembicaraan dengan Dewin Marang dilakukan di rumah kediamannya pada tanggal 5 – 15 Agustus 2003 dengan jumlah pertemuan sebanyak tiga kali. Wawancara diawali dengan menanyakan mengenai kedudukan dan perannya selaku ketua Majelis Adat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai ketua Majelis adat yang merupakan wadah koordinasi para Damang dan Mantir adat, perannya masih dibatasi pada keinginan yang tertuang dalam Perda Nomor 14 Tahun 1998 Tentang Kedamaian di propinsi Kalimantan Tengah, namun dalam implementasinya institusi Kedamaian tersebut belum mendapat perhatian dari pemerintah. Hasil pembicaraan ini telah merangsang pemikiran dan emosinya untuk lebih jauh membahas mengenai nilai-nilai budaya Dayak dalam konteks integrasi dan potensi-potensi yang dapat menimbulkan konflik sosial dengan menggunakan atribut-atribut etnis Dayak dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Madura.

Terhadap Hendrick, dilakukan wawancara sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 20-21 Agustus 2003 di rumah Dewing Marang yang juga berfungsi sebagai kantor Majelis Adat Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana Hendrick adalah salah satu pengurus organisasi tersebut.

Meledaknya konflik etnis yang melibatkan massa, berkaitan dengan isu-isu dan informasi yang menyudutkan dan merendahkan harga diri orang Dayak sehingga

munculah perlawanan untuk melakukan pembalasan dan gerakkan spontanitas untuk mengembalikan *utus* (harga diri) orang Dayak dengan melibatkan roh-roh leluhur yang dipelopori oleh masyarakat Dayak yang berasal dari Das Seruyan, Katingan dan Mentaya termasuk kelompok atau perorangan dari DAS lainnya di Kalimantan Tengah, seperti DAS Barito dan Kapuas merupakan pembicaraan awal yang dilakukan dengan Hendrick untuk merangsang pemikiran dan emosinya dalam memberikan respon terhadap kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat Dayak, termasuk kekerasan etnis yang dilakukan terhadap warga Madura.

Wawancara dengan Wahyudi K. Anwar, dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 25 – 27 Agustus 2003. Pada awalnya wawancara dilakukan di Kantor Bupati Kotawaringin Timur yang dimulai dengan latar belakang kelahiran Perda No. 14 Tahun 2000 Tentang Retribusi Industri Kayu, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan yang menimbulkan kontroversial dengan pemerintah pusat. Bagi Pemerintah Daerah, Lahirnya Perda tersebut merupakan respon terhadap pemerintah pusat yang selama ini telah menjadikan Kabupaten Kotawaringin sebagai sapi perahan dan merugikan masyarakat lokal, namun pemerintah pusat berpendapat Perda tersebut telah menambah maraknya praktek-praktek ilegal logging yang dapat mempercepat kerusakan hutan. Wawancara berikutnya dilakukan di rumah Jabatan Bupati dengan fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Esra pahan berhasil di wawancarai pada tanggal 7 September 2003 di rumah kediamannya, karena sebelumnya dia sering tidak ada di rumah dan agak sulit dihubungi pada waktu itu. Suasana di rumahnya memberi kesan kelimpahan dengan banyaknya guci-guci dari cina, dan ornamen rumah moderen yang tidak menggambarkan unsur etnisitas, namun pemikirannya sangat konservatif dalam

menjelaskan konflik etnis di Sampit. Pahan mengatakan bahwa orang Madura harus mengubah perilakunya untuk bisa bertahan tinggal di kota Sampit.

Wawancara dengan During dilakukan pada tanggal 30 September 2003 di Mes Kalteng, Jakarta. Pertemuan kami pada awalnya mengenai pesanan kaos pakaian dengan tulisan dan motif Dayak yang akan di kirim ke Sampit. Pembicaraan akhirnya meluas sampai dengan pembicaraan konflik etnis di Sampit, khususnya mengenai proses *mengayau* yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Dayak di Sampit.

Dari kalangan warga Madura adalah Tumi yang di wawancarai pada tanggal 10 September 2003 di rumahnya berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga Dayak terhadap warga Madura.

Dengan H. Abdul wahid wawancara dilakukan di rumahnya pada tanggal 15 september 2003. Di lingkungan rumahnya terdapat barak-barak yang menampung orang-orang Madura yang belum memiliki rumah dan musholla yang biasanya ada dalam pemukiman orang-orang Madura. Di ruang tamunya, terdapat foto-foto penyelenggaraan pertemuan antara orang Dayak dengan Orang Madura asal Sampit dengan tema “ Berdamai dengan sejarah” pada tanggal 27 Pebruari 2003 di Surabaya, sehingga topik inilah yang mengawali wawancara peneliti dengan Wahid.

Sjahriansyah yang ditemui di rumahnya pada tanggal 16 September 2006 adalah di Musholla, ketika kami bersama-sama sholat ashar. Disinilah dia menceritakan sejarah berdirinya pesantren Sabilih yang mengambil nama Ayahnya yang meninggal akibat terbunuh dalam konflik etnis di Sampit.

Terhadap Martijo, dilakukan wawancara pada tanggal 17 September 2006 dirumah kediamannya yang memiliki halaman yang luas. Di samping sebagai buruh, dia bersama dengan warga Madura memelihara ternak sapi dan kambing, sebagai persiapan

menghadapi hari raya korban. Martijo pada awalnya lebih banyak menceritakan mengenai tanah miliknya yang diambil oleh orang Dayak untuk membangun rumah tempat tinggal.

Demikian juga dengan Lorat, perbincangan lebih banyak mengenai pekerjaannya sehari-hari untuk memulihkan ekonomi keluarga setelah kembali ke Sampit. Sebagai petani, dia lebih banyak berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan orang Dayak dalam menjual hasil-hasil kebunnya, seperti sayur dan buah-buahan. Oleh karena itu ia sangat berhati-hati untuk memberikan responnya terhadap konflik etnis di Sampit untuk menghindari salah pengertian akibat ucapannya yang dikhawatirkan akan merugikan kelompok masyarakat Madura yang tinggal di Sampit.

Selanjutnya, berkaitan dengan upaya memahami kondisi masyarakat yang termarginalisasi akibat kebijakan pembangunan dan kehadiran HPH dan perkebunan, peneliti juga telah melakukan penelusuran pada DAS Seruyan mulai bagian hilir hingga kebagian hulu sungai Seruyan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat lokal berkaitan dengan taraf hidup dan perkembangan masyarakat, serta responnya terhadap masalah-masalah pembangunan dan kehadiran HPH. Di Bagian hulu DAS Seruyan ini terdapat *Camp* HPH PT. Erna Djulawati yang megah dengan fasilitas perkotaan dan sangat kontras dengan masyarakat perdesaan yang berada di sekitarnya. Disini saya jumpai pluralitas masyarakat dari sub-sub etnis Dayak dengan bahasa yang berbeda dan kuatnya ikatan yang bersumber dari komunitas DAS dan identitas kedayakan yang berinduk dari Dayak Ot Danum dengan bahasa Dohoi, namun dapat memahi bahasa Dayak Ngaju yang merupakan *lingua franca* (bahasa sehari-hari) masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

Di Wilayah bagian tengah, yaitu di DAS Mentaya, peneliti juga berusaha untuk melihat secara langsung wilayah strategis pengembangan di Kecamatan Parenggean dengan komunitas perkebunan dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Di sana, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat lokal yang berada disekitar perkebunan dan lingkungan pemukiman pabrik pengolahan minyak kelapa sawit.

1.3.5. Analisis Data

Data yang didapatkan adalah berupa dokumen, laporan dan tulisan-tulisan yang relevan dengan masalah penelitian berhubungan dengan konflik etnis di Sampit, kemudian diolah dalam bentuk tabel dan memberikan penjelasan sesuai dengan kecenderungannya untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu yang berhubungan dengan faktor struktural yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit. Penjelasan dari analisis dengan menggunakan data sekunder tersebut merupakan hasil analisis pada tataran macro-objektif. Hasilnya adalah beberapa dimensi struktural yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit.

Data yang diperoleh melalui pendekatan dialogis dengan subjek, untuk memahami (*understanding*) tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak terhadap orang-orang Madura dan pengalaman sejarah masyarakat Dayak dalam merespons marjinalisasi dan isolasi politik yang mereka alami, dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan mengenai pemahaman peneliti mengenai kondisi sosial dan budaya, ekonomi, politik dan respon masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pemahaman dari perspektif historis mengenai pengalaman masyarakat Dayak dalam merespons marjinalisasi dan isolasi politik

yang mereka alami ini merupakan analisis pada tataran macro-subjektif yang merupakan hubungan dialektika antara aktor dengan struktur.

Pendekatan terpadu dalam analisis ini adalah menjelaskan *social context*, yaitu dengan menggabungkan antara pemahaman historis mengenai marginalisasi dan isolasi politik yang dialami oleh orang Dayak dengan dimensi struktural yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit.



BAB II
GAMBARAN UMUM
KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibu kota Sampit, memiliki kedudukan yang strategis sebagai pintu gerbang perekonomian Kalimantan Tengah. Dengan luas kawasan 50.700 km, 67 % adalah kawasan hutan dengan hutan produksi mencapai 80 %, sehingga dalam Pendapatan Daerah Tahun 2000 sektor kehutanan ini menyumbang sebesar 36 % jauh lebih besar dari sektor yang lainnya. Sementara itu, terhadap pendapatan daerah Kalimantan Tengah, kabupaten Kotawaringin Timur menyumbang sebesar 18,53k%.

Selain sektor kehutanan, pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mempersiapkan penambahan pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 1999 telah terdapat 27 pengusaha perkebunan yang melakukan investasi di kabupaten tersebut. Dalam upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit ini, pemerintah daerah telah mencadangkan 1.287.500 hektar untuk tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa.

Terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit ini, terdapat dua kawasan yang diharapkan akan mengalami perkembangan yang strategis, yaitu kawasan Sampit-Pangkalan Bun (Sambun) dan kawasan Parenggean. Di kedua kawasan tersebut terdapat pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang didukung oleh pelabuhan laut Ujung Pandaran.

Selain kedua kawasan di atas, pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengembangkan tiga kawasan perwilayahan yang akan mendukung pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah. Pengembangan perwilayahan

tersebut meliputi bagian utara dengan pusat wilayah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Seruyan, di Bagian selatan di DAS Katingan dan Di Bagian Tengah di DAS Mentaya.

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringi Timur pada tahun 2000 adalah sebesar 519.315 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang besar adalah pada tahun 1995–1999, melalui program transmigrasi umum dan transmigrasi spontan dari kelompok masyarakat Madura sejak dibukanya pelayaran dari Sampit ke Surabaya dengan kapal Krakatau pada tahun 1995.

Distribusi sumber daya etnis, disajikan pula berdasarkan kelompok usaha dan keanggotaan kelompok etnis pada DPRD kabupaten Kotawaringin Timur. Pembicaraan mengenai penduduk berdasarkan etnis ini akan memperlihatkan adanya ketegangan hubungan antara kelompok masyarakat Dayak dan kelompok masyarakat Madura. Ketegangan ini bersumber dari kelompok elit politik yang mengkonstruksikan identitas etnis untuk mendukung kepentingan ekonomi dan politik mereka.

Ketegangan tersebut terkait pula dengan kegagalan dari model pembangunan perwilayahan yang menimbulkan kesenjangan antara penduduk yang tinggal di bagian Hulu DAS Seruyan, Katingan dan Mentaya dengan penduduk perkotaan di Sampit. Terjadi pula konflik dengan perusahaan pemegangan HPH dan Pengusaha perkebunan dengan Masyarakat lokal.

2.1. Kondisi Wilayah

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibu kota Sampit memiliki luas wilayah 50.700 km² yang didominasi hutan belantara dengan potensi kayu yang merupakan andalan dalam penerimaan pendapatan daerah. Besarnya potensi hutan ini mengundang pengusaha untuk melakukan eksploitasi sumber daya hutan dan meningkatnya mobilitas

penduduk yang berdampak terhadap terbukanya perdagangan dan pelayanan jasa di kota Sampit. Kondisi ini merupakan salah satu motivasi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menjadikan kota Sampit sebagai pusat perdagangan Kalimantan Tengah. Perincian mengenai luas wilayah ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur

Uraian	Luas (Km ²)	% Terhadap luas
Hutan Belantara	35.244,96 Km ²	69,52
Rawa – rawa	2.420,00 Km ²	4,77
Sungai dan Danau	2.025,38 Km ²	3,99
Pertanahan lainnya	11.009,66 Km ²	21,72
Jumlah	50.700,00 Km ²	100.00

Sumber : Kotim dalam Angka Tahun 2000

Dari luas wilayah kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, diarahkan untuk tanaman pangan seluas 357.516 hektar dan lahan perkebunan 1.287.000 hektar. Selain itu, dengan luas perairan yang mencapai 4.806 km², perairan laut dengan garis pantai 321 km dan hutan bakau 28.796 hektar memiliki potensi untuk pengembangan usaha perikanan.

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) terdapat luas hutan produksi tebang sebesar 956.430 hektar, hutan produksi yang dapat dikonversi 1.041.930 hektar dan hutan lindung dan suaka alam seluas 488.710 hektar. Luasan areal hutan produksi tersebut merupakan dasar pertimbangan untuk pengembangan sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk memelihara kawasan hutan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat tiga buah sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di laut Jawa, yaitu : (1) Sungai Katingan, dengan panjang 650 km, kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata adalah 300 meter, serta memiliki enam anak sungai (2) Sungai Seruyan, dengan panjang 400 Km, kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 400 meter, serta memiliki enam anak sungai (3) Sungai Mentaya dengan panjang 350 Km, kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata adalah 300 meter serta memiliki enam anak sungai.

Penduduk yang tinggal di tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) di atas, merupakan komunitas masyarakat Dayak yang memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap masing-masing DAS sehingga berpengaruh terhadap solidaritas dan penyebutan identitas diri mereka sebagai orang Seruyan, Katingan dan Mentaya, walaupun mereka termasuk dalam etnis Dayak Ngaju dan Dayak Ot Danum. Kuatnya solidaritas komunitas masyarakat DAS ini ada hubungannya dengan keterbatasan sarana jalan darat yang belum menjangkau masyarakat di bagian hulu DAS, sehingga membatasi interaksi sosial dengan orang di luar komunitas mereka.

Penduduk yang bermukim disepanjang aliran sungai memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sungai, baik sebagai sarana transportasi, sarana angkutan barang, termasuk sarana mandi, cuci, kakus (MCK) dan air minum. Disamping itu mereka pun menerima tingkat kemahalan barang yang cukup tinggi, karena mereka sangat tergantung dengan kapal dagang dari Banjarmasin yang membawa barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk membeli hasil produksi penduduk.

Pada kondisi ini berkembang batas-batas wilayah pemanfaatan masyarakat yang disebut mereka dengan *eka malan mana satiar*, yaitu tempat berladang, berburu, mencari hasil hutan non kayu, mencari ikan. Wilayah pemanfaatan masyarakat ini

ditentukan berdasarkan adat yang berlaku yaitu sekitar 5 km kiri kanan sepadan sungai tempat pemukimn mereka. Batasan 5 km kiri kanan sungai ini sangat terkait dengan sebaran hak-hak masyarakat adat, tempat keramat dan situs-situs budaya yang merupakan gambaran dari kebudayaan dan identitas masyarakat. Berdasarkan tempat pemukiman inilah muncul wilayah-wilayah adat yang mereka sebut dengan *kaleka*, *pahewan*, *petak bahu* dan situs-situs budaya. Masuknya investor seperti HPH ternyata menimbulkan konflik dengan masyarakat terkait dengan hak-hak masyarakat adat tersebut.

Luasnya bentang hutan dan sungai ini menimbulkan adanya kawasan hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat sebagai wilayah *pali* (pantangan) yang tidak boleh diganggu karena banyak dihuni oleh roh-roh. Wilayah keramat ini ditandai dengan adanya pohon yang paling besar dan berdaun lebat dan hutan yang banyak aneka satwa dan fauna. Salah satu adalah *pahewan* Amin klaru di hulu DAS Katingan. (Usop, SR, 2007).

Kuatnya ikatan masyarakat dengan sungai ini, tidak serta merta merubah kebiasaan masyarakat untuk mengakses jalan trans Kalimantan yang sudah terbuka, tetapi sungai masih efektif bagi masyarakat sebagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil produksi seperti karet, rotan dan hasil-hasil non hutan. (Usop, SR dkk. 1999).

Gambaran mengenai kondisi fisik wilayah di atas berhubungan dengan perencanaan pembangunan kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengembangkan pusat-pusat pembangunan menurut karakteristik wilayah tersebut. Terdapat tiga wilayah pembangunan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan, yaitu wilayah bagian tengah dengan pusat pertumbuhan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Mentaya, wilayah

bagian utara dengan pengembangan pada DAS Scruyan dan wilayah bagian selatan dengan pengembangan pada DAS Katingan.

Secara administratif Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas 24 kecamatan dan 2 wilayah pembantu bupati, yaitu Seruyan dan Katingan. Luas masing-masing kecamatan tersebut adalah sebagai berikut (Tabel 2.2)

Tabel 2.2

Luas Wilayah Katawaringin Timur Menurut Kecamatan

	Kecamatan	Luas (Km2)	% Terhadap Luas Kotawaringin Timur
1	Seruyan Hilir	6087	12,01
2	Mentaya Hilir Selatan	928	1,83
3	Pulau Hanaut	619	1,22
4	Mentaya Hilir Utara	723	1,43
5	Danau Sembuluh	2424	4,78
6	Hanau	1135	2,24
7	Mtw. Baru / Ketapang	722	1,42
8	Baamang	774	1,53
9	Kotabesi	2177	4,29
10	Cempaga	2424	4,78
11	Perenggean	1774	3,50
12	Mentaya Hulu	3364	6,64
13	Antang Kalang	2991	5,90
14	Seruyan Tengah	2012	3,97
15	Seruyan Hulu	4746	9,36
16	Katingan Hulu	2604	5,14
17	Marikit	2178	4,30
18	Sanaman Mantikay	3030	5,98
19	Katingan Tengah	1089	2,15
20	Pulau Malan	805	1,59
21	Tewang Sg, Garing	568	1,12
22	Katingan Hilir	663	1,31
23	Tasik Payawan	804	1,59
24	Kamipang	2793	5,51
25	Katingan Kuala	1425	2,81
26	Mendawai	1826	3,60

Sumber : Kotim dalam Angka Tahun 2000

Dari 26 Kecamatan tersebut, baru 12 Kecamatan yang dapat dijangkau melalui jalan darat, sedangkan kecamatan lainnya masih sangat tergantung dengan transportasi sungai dan merupakan wilayah yang terisolir dari pusat pembangunan. Sepuluh kecamatan tersebut tersebar pada DAS Seruyan dan DAS Katingan.

Tabel 2.3
DAS yang belum Terjangkau Jalan Darat dan Komunitas Penduduk

No.	Kecamatan	DAS	Komunitas
1.	Seruyan Hulu	Seruyan	Dayak Kaharingan
2.	Katingan Hulu	Katingan	Dayak Kaharingan
3.	Marikit	Katingan	Dayak Kaharingan
4.	Pulau Malan	Katingan	Dayak Kaharingan
5.	Tewan Sg. Garing	Katingan	Dayak Kaharingan
6.	Sanama Mantikei	Katingan	Dayak Kaharingan
7.	Tasik Payawan	Katingan	Dayak Kaharingan
8.	Kamipang	Katingan	Dayak Islam
9.	Katingan Kuala	Katingan	Dayak Islam
10.	Mendawai	Katingan	Dayak Islam

Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2003/Profil Kab.Kotim Tahun 2000

Kecamatan yang belum terjangkau dengan transportasi darat tersebut adalah kecamatan yang berada di bagian hulu DAS dan sebagian besar menganut agama Hindu Kaharingan. Kelompok Dayak OtDanum yang menganut kepercayaan Kaharingan ini

biasanya masih kuat mempertahankan adat dan tradisi yang berlaku dalam wilayah adat mereka masing-masing. Oleh karena itu keberadaan perusahaan HPH yang sebagian besar berada di bagian hulu DAS ini sering konflik dengan masyarakat, yang disebabkan oleh pelanggaran tanah adat dan tanah yang dikeramatkan oleh masyarakat.

Masyarakat yang berada di bagian hulu DAS ini, biasanya menerima pendapatan yang tidak seimbang dengan daya beli mereka, karena berkembang ekonomi DAS dengan mata rantai perdagangan yang panjang, sehingga harga ditingkat masyarakat petani lebih tinggi, sebaliknya nilai jual produksi masyarakat petani lebih rendah. Munculnya “kapal dagang” yang membawa barang dagangan dari Banjarmasin dan menjualnya kepada masyarakat yang berada dipinggiran sungai, termasuk membeli produk masyarakat seperti roran dan karet. Keadaan ini menjadikan daya beli terhadap barang-barang kebutuhan sehari-hari menjadi lebih rendah

2.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Terbukanya jalan Trans Kalimantan telah membuka ruang bagi penduduk pendatang dan berkembangnya pusat-pusat pemukiman seperti pemukiman Asam Baru, Kerengpangi dan Parenggean. Kecepatan perkembangan pemukiman baru ini berhubungan dengan penyediaan fasilitas dari pemerintah, karena terkait dengan usaha penduduk seperti pemukiman Asam Baru sebagai pusat transit perjalanan dari Sampit ke Pangkalan Bun; Kereng Pangi didukung oleh adanya pertambangan rakyat; dan Parenggean berhubungan dengan usaha perkayuan.

Berkembangnya pusat-pusat pemukiman baru tersebut didukung pula dengan penyediaan fasilitas listrik, air bersih, sarana ibadah dan sarana pendidikan. Kondisi ini menyebabkan perbedaan yang sangat menyolok antara desa-desa di Daerah Aliran

Sungai (DAS) yang banyak dihuni oleh penduduk etnis Dayak dengan pemukiman di sepanjang Jalan Trans Kalimantan yang banyak dihuni oleh penduduk pendatang.

Dalam upaya percepatan pembangunan, Kabupaten Kotawaringin Timur dibagi dalam tiga wilayah pembangunan, yaitu wilayah bagian utara dengan pusat pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Seruyan, wilayah bagian tengah dengan pusat pengembangan DAS Mentaya dan wilayah bagian selatan dengan pusat pengembangan DAS Katingan.

Bagian utara Kabupaten Kotawaringin Timur yang berbatasan dengan Kalimantan Barat merupakan wilayah pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) Seruyan dengan potensi sumber daya hutan yang diberikan konsesi penggarapan kepada pengusaha dengan ijin Hak perusahaan Hutan (HPH), di antaranya adalah PT. Erna Djuliawati dan PT.Sari Bumi Kusuma yang berkedudukan di Pontianak, Kalimantan Barat. Kedua perusahaan ini berada di bagian hulu DAS Seruyan dengan Kamp dan pemukiman karyawan yang megah di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang subsisten. Dalam interaksinya dengan masyarakat sering berbenturan, akibat pelanggaran terhadap tanah adat dan tanah yang dianggap keramat oleh masyarakat..

Masyarakat yang tinggal di DAS Seruyan ini merupakan komunitas dari etnis Dayak Ot Danum yang terbagi lagi ke dalam sub-sub etnis Sebaung, Kuhin, Pangin dan Kaninjal. Kelompok etnis ini berbeda dari tempat pemukiman pada anak-anak sungai dan dari bahasa, tetapi masih dalam rumpun bahasa Ot Danum, sehingga mereka masih dapat berkomunikasi dengan sub-etnis lainnya dengan menggunakan bahasa Ot Danum atau bahasa Dayak Ngaju yang merupakan bahasa pergaulan sehari-hari (*lingua franca*) bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Disamping itu, karena letaknya yang jauh dari pusat pembangunan, maka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari umumnya

mereka memanfaatkan jalan perusahaan yang menembus kecamatan Nanga Pinuh yang berada dalam wilayah kabupaten Sangau Kalimantan Barat.

Pada bagian timur, Kabupaten Kotawaringin Timur yang berbatasan dengan Palangka Raya, ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah terdapat jalan Trans Kalimantan poros selatan yang menghubungkan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kota Sampit merupakan daerah transit dan penampungan mobilitas penduduk dari Jawa dan Madura yang memanfaatkan sekitar jalan Trans Kalimantan sebagai tempat pemukiman, khususnya pada lokasi-lokasi yang dekat dengan pertambangan emas, perkebunan dan jalur penebangan dan pengangkutan kayu.

Pada wilayah perbatasan bagian timur ini, terdapat DAS Mentaya yang merupakan wilayah pengembangan Bagian Tengah dengan fokus pengembangan pada usaha perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kelapa sawit yang terdapat di Kecamatan Parenggean. Kegiatan perkebunan dan Industri kelapa sawit ini merupakan pendorong bagi mobilitas pendatang ke Sampit, baik secara musiman maupun untuk tujuan bertempat tinggal permanen. Keberhasilan penduduk pendatang ini telah meningkatkan arus mobilitas penduduk ke kota Sampit, sehingga pemerintah daerah berusaha menambah armada angkutan laut untuk melayani kebutuhan penumpang yang semakin meningkat.

Selain itu, krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998 telah menjadi berkah bagi penambang emas dan penebang kayu karena harganya menjadi meningkat dan kondisi ini menjadi alternatif usaha yang menarik bagi kelompok pendatang untuk mengadu nasibnya di kota Sampit. Pada waktu itu di wilayah kecamatan Cempaga sepanjang jalan trans Kalimantan dari Palangka Raya menuju

sampit terdapat pabrik pengolahan kayu dan areal pertambangan rakyat, seperti kereng Pangi yang merupakan tempat awal terjadinya konflik etnis di Sampit.

Bagian selatan yang berbatasan dengan laut Jawa dipersiapkan sebagai pelabuhan samudera untuk bongkar muat barang ke luar negeri, khususnya minyak kelapa sawit yang diproduksi oleh PT. Makin di wilayah Kecamatan Parenggean dan industri kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengolah kelapa sawit dari produksi proyek SAMBUN yang ada diperbatasan sebelah barat yaitu antara Sampit dengan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kehadiran Pelabuhan Samudera dan industri pengolah minyak kelapa sawit ini, telah mendorong rekrutmen tenaga terampil, teknisi dan mekanik yang siap kerja untuk mendukung kedua perusahaan tersebut.

Kondisi di atas telah memperbesar ruang bagi kelompok pendatang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur, karena pemerintah daerah masih mengutamakan pembangunan fisik daripada pembangunan sumber daya manusia. Akibatnya, penduduk lokal tidak memiliki daya saing untuk masuk dalam ruang publik dan tersingkir menjadi kelompok marginal dari suatu proses pembangunan yang mengabaikan kontribusi masyarakat lokal dalam suatu kehidupan masyarakat yang pluralis.

Pada bagian selatan yang merupakan wilayah pengembangan DAS (Daerah Aliran Sungai) Katingan adalah daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi pasang surut merupakan lahan yang sangat strategis sebagai lumbung padi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengembangkan tanaman padi sawah; bagian tengah dengan tanaman perkebunan dan bagian utara dengan tanaman perkebunan dan hasil hutan.

Pengembangan wilayah Bagian Selatan yang berpusat di DAS Katingan, difokuskan pada usaha pertanian tanaman pangan khususnya produksi padi yang bersumber dari sawah dan perladangan.

Tabel 2.4

Luas Lahan dan Produksi Padi di Kabupaten Kotawaringin Timur

Jenis Produk	1999		2000	
	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
Sawah	11.455	30.581	14.147	42.172
Ladang	16.324	26.926	19.422	39.330

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II Kotim 2000.

Luas lahan perladangan : 19.422 Ha lebih besar dibandingkan dengan luas lahan sawah : 14.147 Ha pada tahun 2000, menunjukkan bahwa penduduk lokal masih sangat tergantung dengan padi yang bersumber dari usaha perladangan. Ketergantungan pada usaha perladangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih dalam kehidupan ekonomi yang sangat rendah (*subsisten*).

Michael Dove (1981:84-85) menyebutkan bahwa sistem perladangan bagi peladang selalu masuk akal dalam bentuk kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri. Dalam hal ini istilah yang tepat bagi peladang adalah sistem pertanian dengan masa bera panjang (*Long fallow cultivation*), yaitu memberikan kesempatan agar terjadi penghutanan kembali untuk memulihkan kesuburan lahan. Keadaan ini memberikan gambaran mengenai kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam, bahkan pada pembukaan lahan baru selalu diikuti dengan upacara *nyanggaran*, yaitu meminta ijin kepada roh leluhur yang menghuni hutan tersebut. Bagi masyarakat Dayak, tanah adalah sakral sehingga lahan bekas ladang yang ditinggalkan menjadi tanah adat yang

harus diperlakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS). Pelanggaran terhadap tanah adat sering terjadi pada saat eksploitasi sumberdaya hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan.

Secara keseluruhan sektor pertanian ini masih memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan regional setelah usaha kehutanan. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari jumlah 188.952 penduduk berusia 10 tahun ke atas, terdapat 45,70% yang bekerja di sektor pertanian.

Gambaran mengenai kondisi wilayah ini menjadi dasar pemikiran pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin yang ingin menjadikan kota Sampit sebagai pintu gerbang perekonomian bagi Propinsi Kalimantan Tengah. Ambisi pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur ini didasarkan atas letak geografis yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan kota Palangka Raya dengan Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaingin Barat. Di sepanjang jalan Sampit-Pakalan Bun terdapat perkebunan kelapa sawit dengan skala besar yang merupakan proyek pusat

Pada bagian selatan yang berbatasan dengan laut jawa, terdapat pelabuhan Ujung Pandaran yang merupakan pintu masuk dan keluarnya arus barang dan jasa, serta arus penduduk pendatang yang akan mendukung pengembangan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, dari 50.700 km luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 67% kawasan hutan dengan hutan produksi mencapai 80% dari luas kawasan hutan dan masih merupakan sumber pendapatan daerah yang terbesar (36%), dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pada arah jalur selatan yang menghubungkan Palangka Raya-Sampit, terdapat pula areal pertambangan rakyat di

kawasan pemukiman Kereng Pangi yang dikenal dengan “Texas Sampit”. Daerah pertambangan ini merupakan daya tarik bagi mobilitas penduduk pendatang untuk mencari usaha di Sampit.

Sebagai pusat perekonomian, Sampit akan dikembangkan menjadi pusat perdagangan, pariwisata dan berkembangnya agrobisnis dan agroindustri yang akan mengkaitkan dengan usaha masyarakat yang bermukim di Daerah Aliran Sungai. Interaksi kota Sampit dengan Wilayah DAS Seruyan, Katingan dan Mentaya akan menjadikan wilayah ini sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang akan mendukung daerah-daerah pinggirannya (*hinterland*). Melalui kebijakan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), maka hasil-hasil pembangunan secara spontanitas akan menetes kebawah (*trickledown effects*) dan menyebar (*spread effects*) ke dalam masyarakat, sehingga menimbulkan efek ganda (*multiflier effects*) bagi perkembangan ekonomi rakyat.

Rasionalisasi dari model pertumbuhan ini adalah membiarkan persaingan antar kelompok masyarakat, eksploitasi sumber daya hutan sebagai konsekuensi politik utang dan kemampuan sumberdaya manusia untuk menangkap peluang yang tercipta akibat proses pembangunan, sehingga menjadi sumber usaha yang akan menghasilkan pendapatan bagi perbaikan taraf hidup. Sebaliknya, jika kemampuan sumberdaya manusianya masih terbatas, maka yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kondisi ini akan semakin sulit, kalau tidak didukung oleh sarana dan prasarana jalan yang memadai untuk menjangkau masyarakat yang berada di DAS. Bagi masyarakat Dayak yang jauh dari jangkauan pembinaan sudah terbiasa hidup dalam kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kehidupannya, sehingga cara-cara persaingan dianggap bertentangan dengan cara hidup *habaring hurung* (kebersamaan)

dan eksploitasi sumber daya hutan dianggap sebagai pelanggaran tanah adat dan merusak keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam sekitar yang memiliki *gana* (roh).

2.3. Struktur Ekonomi Wilayah

Berdasarkan distribusi persentasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga yang berlaku menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2000 – 2001 masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 48,41 % dan 48,65%. Sub sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB tersebut adalah sub sektor kehutanan sebesar 18,26 % seperti terlihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku, 2000 – 2002
(persen)

SEKTOR		2000	2001	2002
1	Pertanian	48,41	48,65	47,83
2	Pertambangan & Penggalan	0,52	0,53	0,49
3	Industri Pengolahan	7,70	8,34	8,86
4	Listrik, Gas & air Bersih	0,26	0,35	0,39
5	Bangunan	4,04	3,13	3,14
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	20,98	20,54	3,14
7	Pengangkutan & Komunikasi	11,83	11,89	21,51
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,97	1,87	1,83
9	Jasa – jasa	4,29	4,70	4,56
TOTAL		100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS dan Bappeda Kotim, 2002

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pada sub sektor perkebunan, yaitu 5,71 % pada tahun 2000 menjadi 9,36 % pada tahun 2002. Sebaliknya pada sub sektor kehutanan terjadi penurunan, yaitu dari 18,26% pada tahun 2000 menjadi 12,59% pada tahun 2002 (tabel 2.6)

Tabel 2.6
Distribusi persentase PDRB Sektor Pertanian
Atas Dasar Harga Berlaku 2000 – 2002
(persen)

Sektor / Sub Sektor	2000	2001	2002
PERTANIAN	48,41	48,65	47,83
1 Tanaman Bahan Makanan	13,23	13,43	13,39
2 Tanaman Perkebunan	5,71	6,77	9,36
3 Peternakan dan Hasil-hasilnya	3,73	4,16	3,99
4 Kehutanan	18,26	14,33	12,59
5 Perikanan	7,49	9,96	8,50

Sumber :BPS dan Bappeda Kotim,2002

Besarnya kontribusi pendapatan yang bersumber dari sektor pertanian khususnya pada usaha perikanan, mencerminkan bahwa, *pertama*, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur masih berorientasi pada eksploitasi sumberdaya alam dan belum mengembangkan industri dan jasa yang berorientasi ke luar (*outward looking*), sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah dan efek ganda (*multiplier effects*) bagi pengembangan ekonomi rakyat. Akibatnya adalah memperbesar jumlah penggunaan lahan yang memperkecil ruang pemanfaatan masyarakat dan melanjutkan konflik pertanahan dengan masyarakat terkait dengan hak-hak masyarakat atas tanah.

Pendapatan perkapita yang merupakan salah satu ukuran yang secara umum mencerminkan pendapatan setiap penduduk di suatu wilayah, belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi atas dasar harga berlaku yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2000 pendapatan regional perkapita Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar Rp. 4.260.313,56 naik 19,93 % menjadi 5.109.449,05 pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 kembali naik sebesar 10,63 % yang menempatkan pendapatan regional perkapita Kabupaten Kotawaringin Timur pada angka Rp. 5.652.359,09.

Tabel 2.7
Perkembangan Pendapatan Perkapita ADH Berlaku &
Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2000 – 2002

URAIAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU		
	2000	2001	2002
1. Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku (juta Rp.)	1.508.644,03	1.803.525,81	1.983.092,22
2. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Rupiah)	5.389.111,45	6.463.230,94	7.149.988,53
3. Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	4.260.313,56	5.109.449,05	5.652.359,09
URAIAN	ATAS DASAR HARGA Konstan 1993		
	2000	2001	2002
1. Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan (juta Rp.)	684.682,11	665.965,86	685.180,28
2. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (Rupiah)	2.112.743,43	2.399.349,54	2.461.374,78
3. Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	1.670.210,70	1.896.784,19	1.945.817,68

Sumber: BPS dan Bappeda Kotim, 2002

Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah, kontribusi kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berada pada peringkat ketiga (18,53%) setelah Kapuas (23,28) dan Kobar (19,80%).

Tabel 2.8
Total PDRB Perkapita, Pendapatan Perkapita Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Se Kalimantan Tengah.

Kabupaten & Kota	Total PDRB (Jutaan Rp.)	% Distribusi	PDRB Perkapita (Rp.)	Pendapatan Perkapita (Rp.)	Laju Pertumbuhan
Kobar	1.611.788	19,80	3.598.741	2.771.459	13,80
Kotim	1.508.644	18,53	5.389.111	4.260.313	10,86
Kapuas	1.895.753	23,28	5.269.068	4.952.556	9,50
Barsel	1.345.128	16,52	3.124.951	2.784.681	8,85
Batara	1.057.286	12,99	6.666.868	6.622.908	11,88
P.Raya	722.806	8,88	4.097.538	3.829.191	6,55
Kalteng	8.141.192	100,00	5.294.292	4.173.882	8,90

Sumber : Kalteng dalam Angka tahun 2000

Besarnya kontribusi pendapatan terhadap PDRB provinsi Kalimantan Tengah ini, belum menjamin distribusi pendapatan yang merata terhadap penduduk di kabupaten Kotawaringin Timur, karena pendapatan perkapita masyarakat di kabupaten Kotawaringin Timur tergolong lebih rendah dibandingkan dengan besarnya pendapatan perkapita kabupaten Batara.

Ketergantungan terhadap sektor kehutanan ini terlihat pula pada besarnya penerimaan pendapatan provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa jenis penerimaan yang bersumber dari kegiatan kehutanan.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Propinsi Kalimantan Tengah
dari Sub sektor Kehutanan

Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PBB	15.000.000	19.277,179	16.00.000	14.865.502
IHH	35.000.000	45.275.268	37.000.000	47.133.592
IHPH	1.500.000	1.077.193	1.050.000	1.202.575
Uang Atas Pemakaian Tanah	150	244.831	200	172.910
Bagi Hasil	1.500.000	1.077.193	1.050.000	1.202.575
Total	53.150.000	66.975.667	56.650.000	65.222.575
Prosentase Kehutanan	96,90	98,03	97,79	9,89

Sumber : Kalimantan Tengah dalam Angka 2000, dalam Tim ARuPA, 2002

Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah, kabupaten Kotawaringin Timur memiliki penerimaan terbesar dari sektor kehutanan dan terbesar kedua setelah kabupaten Kotawaringin Barat untuk penerimaan sektor perkebunan.

Tabel 2.10
Penerimaan Kalimantan Tengah dari sektor/sub sektor Kehutanan, Tambang dan Perkebunan menurut Kabupaten, 1994/1995 – 1998/1999

Kabupaten	Hutan	Tambang	Perkebunan Sawit
Kotawaringin Barat	6,503,018	3,274,935	1,301,573
Kotawaringin Timur	19,092,946	4,936,222	1,109,333
Kapuas	9,110,102	6,688,494	10,000
Barito Selatan	3,945,720	23,598,429	84,882
Barito Utara	13,871,152	13,656,679	10,000
Palangkaraya	2,768,918	3,065,001	

Sumber : Kalimantan Tengah dalam Angka tahun 2000/ Tim AruPa, 2002

Besarnya penerimaan pemerintah terhadap sumberdaya hutan, menurut Cornelis Rintuh (2000) belum menjamin pendapatan tersebut terdistribusi bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat, karena kurang lebih 70 % hingga 80 % pendapatan tersebut menguap keluar (*capital flight*). Akibatnya penerimaan tersebut tidak memiliki efek ganda (*multiplier effects*) untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Dalam hal ini pemerintah masih melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan belum sepenuhnya memperhatikan distribusi pendapatan terhadap masyarakat. Pada sisi lain, Anwar (2001) menyebutkan sebagai akibat pembagian hasil yang tidak seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebabkan pemerintah daerah hanya menjadi “sapi perah” bagi pemerintah pusat.

Pergeseran mengenai besarnya penerimaan daerah dari sektor kehutanan ke sektor perkebunan memberi makna perluasan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. Kolaborasi ini memperbesar eksploitasi sumberdaya alam lebih berorientasi pada produksi dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah pada sisi pemerintah dan pemupukan modal bagi pihak pengusaha. Keadaan ini mencerminkan besarnya intervensi modal/kapital yang terjadi di Kabupaten kotawaringin Timur, tetapi tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitar hutan.

Kondisi di atas juga dapat dipahami sebagai pengabaian terhadap pembangunan manusia sebagai bagian dari proses pembangunan yang perlu ditingkatkan kualitas hidupnya, sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan kehidupannya secara mandiri. Keadaan ini menuntut tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) perusahaan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berada disekitar hutan.

Pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam menggambarkan suatu model pembangunan yang berorientasi jangka pendek. Kondisi

ini biasanya mengabaikan dampak kerusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat.

Dampak dari model pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi ini mengembangkan rasio modernisasi yang menjauhkan masyarakat dari akar budayanya. Termasuk didalamnya adalah pandangan yang menyatakan bahwa pluralisme merupakan ancaman bagi integrasi sosial bangsa Indonesia. Keadaan ini juga akan mencerminkan perlunya jaminan keamanan untuk mengamankan investasi dan jalannya roda pembangunan.

2.4. Pembangunan Kehutanan

Kebijakan pembangunan sumberdaya hutan bersumber dari Undang-undang Nomer 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Hutan. Kebijakan ini merupakan upaya mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sejak tahun 1965, terutama ketidakmampuan membayar utang luar negerinya. Oleh karena itu dasar pemikiran pembangunan tersebut adalah memperbesar pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan untuk memperbesar devisa negara.

Melalui kebijakan tersebut telah terjadi eksploitasi sumberdaya hutan secara besar-besaran pada tahun 1979 -1990. Puncak eksploitasi sumberdaya hutan tersebut adalah pada tahun 1980 yang dikenal dengan “banjir kap” di Kalimantan. Pada tahun 1990, nilai ekspor produk kayu menyumbang terhadap devisa negara sebesar US \$ 3,5 milliar yang merupakan 15,6% dari total ekspor dan 25% dari total ekspor non-migas.

Dampak dari kebijakan pemerintah tersebut telah menimbulkan konflik antara pengusaha HPH dengan masyarakat lokal. Sebagian besar konflik yang terjadi di Indonesia adalah konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang HPH.

Tabel 2.11

Rekapitulasi Konflik sumberdaya alam tahun 1990 - 1996

Sumber konflik	Jumlah kasus	Jenis konflik	Pelaaku konflik
HPH	8.741	Pembakaran areal, tumpang tindih status lahan dan konflik sosial	Perusahaan, masyarakat lokal dan pemerintah pusat/daerah
HTI	5.757	Perubahan status penggunaan kawasan, mark up dana reboisasi dan konflik sosial	Perusahaan. Masyarakat lokal dan pemerintah pusat/daerah
Perhutani	3.097	Pencurian kayu, penjarahan lahan, penyerangan petugas	Perhutani, komplotan petani dan masyarakat lokal
Tanah Perhutani	1.492	Sengketa lahan dan tanah, penyalahgunaan HGU	BPN, masyarakat lokal, pemerintah daerah dan perusahaan
perkebunan	405	Penjarahan hasil kebun, penyerobotan lahan masyarakat	Perusahaan negara, perusahaan swasta, perusahaan daerah dan masyarakat lokal
Taman Nasional	1.492	Penebangan liar, tumpang tindih status lahan	Taman Nasional, PKA, masyarakat lokal
Etnis	331	konflik sosial antara pendatang dan penduduk asli	Berbagai macam kelompok etnis, perusahaan dan pemerintah

Sumber : KpSHK, 2000

Sebagian besar konflik di atas adalah konflik pertanahan antara masyarakat lokal dengan pengusaha HPH yang disebabkan perluasan areal Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang masuk dalam wilayah masyarakat lokal, hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat lokal dengan pengusaha HPH dan konflik sosial antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang.

Dilihat dari sisi kepemilikan usaha Perakayuan di Indonesia, terdapat sepuluh kelompok besar yang menguasai perakayuan di Indonesia. Sepuluh kelompok tersebut menguasai 47 % dari total areal seluas 51.251.052 ha dan dengan penguasaan terbesar oleh perusahaan Brito Pasifik (tabel 10).

Tabel 2.12
Peringkat 10 Kelompok Besar Usaha Perakayuan
menurut Pemegang HPH, 1997 / 1998

Kelompok Usaha Perakayuan	Luas HPH (Ha)
Barito Pasifik	5.403.067
Djajanti	3.365.357
KLI	2.806.600
Alas Kusuma	2.661.376
Inhutani 1	2.609.785
Bob Hasan Group	2.131.360
ABRI / AL	1.819.600
Korindo	1.589.228
Kodeco	1.081.700
Sumalindo	1.057.678
Sub Total	24.165.751
Total (Termasuk Kelompok Lainnya	51.251.052
Prosentase penguasaan 10 kelompok perusahaan dalam total HPH	47%

Sumber : Tim AruPa, 2002

Penguasaan area seluas 24.165.751 hektar kepada 10 kelompok pengusaha besar di Indonesia merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka, karena Kalimantan Tengah dengan luas hutan produksi 8,86 juta hektar dibebani oleh 56 perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan luas 7,587 hektar. Di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Tengah dibebani oleh 20 perusahaan pemegang HPH dengan luasan 3,17 juta hektar.

Produksi kayu yang dihasilkan selama tahun 2000 sebesar 876.064, 14 m³ dengan penerimaan PSDH sebesar 56,23 miliar rupiah dan dana reboisasi sebesar US \$ 13.213.021,13. Jenis usaha yang terkait dengan sektor kehutanan ini meliputi kayu log, kayu gergajian, plywood dan moulding.

Pengembangan sektor kehutanan dengan produksi kayu log dan kayu olahan telah terjadi penurunan dari tahun 1996/1997 hingga tahun 1998/1999, namun masih merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang besar bagi sumber pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur dan bagi masyarakat yang mengantungkan hidupnya dari penebangan kayu.

Usaha penebangan kayu ini merupakan alternatif usaha yang cepat menghasilkan uang dan sangat dibutuhkan oleh pengusaha kayu gergajian dan moulding menjadi bahan olahan. Kelompok penebang kayu ini dijuluki sebagai “penebang liar” karena tidak memiliki ijin penebangan. Selama satu minggu di hutan, kelompok penebang yang berjumlah dua sampai empat orang mampu menghasilkan 15-20 meter kubik kayu log. Dengan harga Rp. 100.000,- per meter kubik, maka penghasilan mereka selama seminggu berkisar Rp. 1.500.000, - Rp.2.000.000,-. Kemudahan mendapatkan uang melalui usaha penebangan kayu ini, menyebabkan daya tarik mobilitas pendatang ke Sampit. Selanjutnya, data mengenai meningkatnya produksi kayu olahan ini dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Produksi kayu bulat (LOG). Kayu gergajian, Plywood dan Moulding

Rincian	1996/1997	1997/1998	1998/1999
Kayu Log			
- Produksi RKT HPH	458.094,24	740.042,23	244.852,16
- Pruduksi IPK (Land Clearing And HTI Trans	465.168,86	452.664,98	89.521,87
- Produksi Trace Jalan	34.862,68	452.664,98	5.232,66
Kayu Gergajian	99.158,75	89.992,81	90.492,80
Plywood	40.980,75	35.450,03	31.294,68
Moulding/Dowel	40.183,69	38.421,85	44.520,12

Sumber : Dinas Kehutanan Mentaya Tingkat II Kotim, 2000.

Mengacu pada undang-undang Nomer 22 tahun 199 tentang Otonomi daerah, maka kehadiran Undang-Undang Nomer 41 tahun 1999 mengisyaratkan bahwa sektor kehutanan diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Implikasi kebijakan tersebut belum mampu mengakomodir kesejahteraan rakyat, karena pengaturan yang masih sentralistik dari pemerintah pusat dan kuatnya aliansi antara pemerintah dengan pengusaha HPH

Kontribusi sektor kehutanan yang bersumber dari eksploitasi sumber daya hutan, khususnya kayu, pada satu sisi telah menguntungkan pemerintah daerah melalui pungutan iuran hasil hutan. Pada sisi lain, masyarakat disekitar hutan telah dirugikan, karena selama beropersinya HPH ini, masyakat desa di sekitar HPH telah merasakan kesulitan mencari hasil-hasil ikutan hutan seperti damar, tengkawang, jelutung, rotan dan kayu ulin yang merupakan sumber penghasilan masyarakat. Dari hasil hutan ikutan

ini, masyarakat di sekitar hutan biasanya memperoleh penghasilan sekitar Rp. 500.000 s/d Rp. 1000.000.- per bulan, namun dewasa ini masyarakat tidak dapat lagi menggantungkan penghasilan dari hasil hutan ikutan tersebut, akibat eksploitasi hutan yang dilakukan secara besar-besaran oleh pengusaha HPH.

Sebagai akibat eksploitasi hutan secara besar-besaran ini, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak dapat lagi menggantungkan penghasilannya dari hasil hutan non kayu, dan sebagai alternatifnya mereka telah ikut pula menebang kayu sebagai sumber penghasilan. Beberapa hasil hutan non kayu yang tidak dapat diperoleh sebagai sumber pendapatan adalah jelutung, damar, kulit gemor dan buah tengkawang. Selain itu, terdapat pula penurunan jumlah produksi rotan yang merupakan penghasil pendapatan terbesar bagi masyarakat Dayak, sehingga pada waktu itu alternatif menebang kayu belum dilakukan oleh kelompok masyarakat Dayak. Dengan berkurangnya hasil pendapatan dari usaha non kayu, alternatif penebangan kayu merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2.14
Produksi Hasil Hutan Ikutan Sumber Penghasilan Keluarga
Di Kabupaten Kotawaringin Timur

Jenis Produksi	Satuan	Tahun		
		1996/97	1997/98	1998/99
Rotan	Ton	1.536.000	2.993.025	553.800
Jelutung	Ton	0	0	0
Damar	Ton	0	30.000	0
Kulit Gemur	Kg	232.000	166.561	0
Buah Tengkawang	Ton	0	0	0
Sirap	Keping	0	0	0

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Kotim, 2000

Pada usaha perladangan, terjadi pula penghancuran sistem rotasi perladangan yang sangat tergantung dengan lahan yang luas untuk proses penghutanan kembali,

sehingga mereka dapat berladang kembali setelah sepuluh tahun pada lokasi perladangan pertama yang biasanya mereka tanami dengan tanaman keras seperti karet dan buah-buahan yang digunakan untuk menambah penghasilan dan juga sebagai penanda kepemilikan lahan.

Dalam hal kepemilikan lahan ini, terdapat hukum adat yang mengatur pelanggaran hak-hak anggota masyarakat ini, berupa *singer* (denda) yang biasanya diikuti dengan upacara adat untuk mendamaikan kedua orang yang bersengketa. Demikian juga pada pelanggaran tanah adat dan areal hutan yang dianggap kramat oleh masyarakat seperti *tajahan*, *pahewan*, *sepan*, *kaleka betang* dan kuburan leluhur seperti *sandung* dan *sapundu*.

Pelanggaran terhadap kasus yang terakhir ini harus diikuti dengan upacara adat *nyanggaran* untuk mengembalikan kesucian tempat tersebut sekaligus meminta izin kepada roh-roh leluhur karena telah menggunakan lahan tersebut. Misalnya pasal 49 dari hukum adat Dayak menyebutkan bahwa "*singer kehun sandung pantai dan kaleka lewu*" membakar kuburan atau batang pantar bekas tempat rumah orang yang ada tanamannya, hingga banyak yang rusak. Hukumannya adalah jipen 2 sampai 6 dan upacara adat dengan *saki palas* daging babi atau sapi yang dipotong-potong dan dimakan beramai-ramai di dibawah *sandung pantar* tersebut. Jipen 2 dan Jipen 6 digunakan digunakan untuk menetapkan besarnya ganti rugi sesuai dengan perkembangan nilai uang yang berlaku pada saat itu.

Beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran tanah adat oleh pengusaha HPH di Sampit, dapat di lihat pada tabel 2.15 berikut ini.

Tabel 2.15
Kasus Pelanggaran Hak Adat di DAS Seruyan

No	Perusahaan	Tahun	Kecamatan	Kasus
1.	PT. Arta	2000	Seruyan Tengah	Pelanggaran Hutan Tangkawang milik adat
2.	PT. Montrado	2000	Seruyan Tengah	Penebangan hutan milik adat
3.	PT. Erna Djuliawati	2000	Seruyan Tengah	Pelanggaran tanah adat / benda yang di keramatkan oleh masyarakat seperti Sandung, Pantar & Sapundu
4.	PT. Cipta Tani Kumai Sejahtera	2000	Seruyan Tengah	Pelanggaran tanah adat
5.	PT. Kalimantan Central Abadi	1999	Seruyan Tengah	Pelanggaran tanah adat
6.	PT. Hutan Indo Lestari	2000	Seruyan Tengah	Pelanggaran tempat Pemujaan

Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2003

Ketika terjadi tuntutan dari masyarakat terhadap pengusaha HPH, jarang sekali pemerintah mengambilalih persoalan tersebut. Praktek yang sering terjadi adalah pengusaha HPH berhadapan langsung dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pihak HPH cenderung menerapkan pendekatan keamanan dan tindakan represif dalam menanggapi tuntutan masyarakat tersebut, namun pada akhir-akhir ini pihak HPH mulai menerapkan pendekatan adat dengan mengakomodir hak-hak adat, dan model pendekatan dialog, walaupun masih dalam hubungan yang bersifat superior dan inferior.

Pendekatan kesejahteraan seperti yang tertuang dalam Kepmenhut No.691/Kpts/II/1991 tentang peranan Pemegang HPH dalam pembinaan masyarakat di

sekitar hutan, lebih sekedar bantuan yang bersifat simbolik kepada masyarakat, sehingga sering menimbulkan ketergantungan dan tidak mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Empat tahun kemudian Menteri Kehutanan menerbitkan Kepmenhut No.69/Kpts-II/1995 tentang kewajiban pemegang HPH dalam pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Program ini mencakup (1) pendidikan, tenaga kerja, dan kewiraswastaan, (2) Penyediaan infra struktur (kesehatan, koperasi, sekolah) dan (3) pemberian ekstensi pelestarian dan melibatkan masyarakat dalam proyek konservasi. Program ini juga mengalami kegagalan karena terkendala oleh kehidupan sosial ekonomi yang melibatkan anak sebagai unit produksi dan tersedianya alternatif usaha bagi orang Dayak, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk ikut dalam program yang sifatnya menetap, seperti pertanian menetap.

Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengikutkan masyarakat adat untuk: (1) Mengumpulkan hasil hutan untuk keperluan sehari-hari. (2) Mengelola hutan berdasarkan hukum adat yang ada (3) Menerima bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditindaklanjuti dengan PP No.6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Hasil Hutan, dan Kepmenhut No. 317/Kpts-II/1999 tentang pengusahaan hasil hutan oleh masyarakat adat.

Di dalam hutan produksi masyarakat adat diperkenankan mengumpulkan kayu dan non kayu dalam jumlah yang ditentukan dengan izin Bupati telah melahirkan perda No.14 tahun 2000 tentang retribusi Industri Kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu olahan serta pengganti nilai tegakan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi yang dilakukan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur. Kehadiran Perda tersebut mempunyai tujuan untuk mengamankan aset daerah, dan menjadi solusi penghentian ketidakberdayaan daerah dalam mengupayakan potensi hutan secara maksimal, serta

memberikan jaminan berjalannya usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Alasannya adalah karena selama ini peraturan perundangan lebih berorientasi kepada pusat sehingga daerah hanya menjadi penonton dan sapi perahan. Secara tidak langsung, Perda ini diharapkan dapat memangkas praktek KKN yang selama ini banyak menghantui tata niaga per kayu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Anwar, 2002:101).

Dalam prakteknya Perda tersebut telah mendorong pbenaran berdirinya pabrik-pabrik pengolahan kayu. Dampak dari Perda ini adalah meningkatnya penebangan kayu tanpa ijin dan meningkatnya mobilitas penduduk ke Sampit. Perda No. 14 tersebut pada satu sisi telah berhasil mengamankan aset daerah sebesar 21 triliun rupiah pada akhir tahun 2000, pada sisi lain telah mengoncangkan kehidupan masyarakat desa yang diserbu oleh pendatang dari luar untuk berlomba-lomba menebang hutan.

Bagi orang Dayak, keadaan ini dianggap sebagai gangguan keseimbangan hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam, termasuk gangguan terhadap kehidupan roh-roh leluhur.

Gangguan terhadap hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam ini telah mendorong reaksi dari masyarakat Dayak. Pada masa Orde Baru respon tersebut masih bersifat simbolik seperti ungkapan ketidakberdayaan menghadapi aliansi pengusaha HPH dengan birokrasi dan militer " *ikei tuh mana galingah, tasarah dengan keton ji hunjun*" kami ini kemana gelindingnya saja (seperti kayu bulat yang digelindingkan ke air), semuanya kami serahkan kepada yang di atas (pejabat). Memasuki era Otonomi Daerah, bentuk perlawanan kelompok masyarakat Dayak lebih

terbuka melakukan demo dengan menuntut ganti rugi atas pelanggaran tanah adat oleh HPH PT. Erna Djuliawati.

Pada bagian ini, telah terjadi kekerasan struktural yang bersumber dari ideologi pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan membenarkan tindakan eksploitasi sumberdaya hutan oleh HPH yang telah merampas hak-hak adat dan menghancurkan sistem mata pencaharian penduduk lokal. Pengamanan investasi tersebut, telah pula melibatkan aliansi birokrasi, pengusaha dan militer melalui tindakan administrasi yang tidak mengakui adanya hak-hak adat, tindakan represif untuk membungkam masyarakat.

Kondisi objektif ini telah diterima oleh kelompok masyarakat Dayak sebagai realita yang melahirkan kesadaran kolektif (*collective conciousness*) untuk merespon tantangan dengan membangkitkan identitas kelompok, sebagai rumput kering yang siap terbakar jika ada orang yang menyulutnya.

Undang - undang No. 5 Tahun 1967 yang memberikan landasan hukum Hak Pengusahaan Hutan (HPH) bagi pengusaha untuk melakukan eksploitasi sumberdaya hutan telah menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat lokal. Eksploitasi sumberdaya hutan oleh pengusaha HPH telah menghancurkan sistem mata pencaharian masyarakat Dayak yang sangat tergantung dari hasil hutan , hancurnya tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Dayak dan pelanggaran hukum terhadap tanah adat.

Tabel 2.16
Dampak Eksploitasi Hutan Oleh HPH Terhadap Masyarakat

No	Sumber Daya	Dampak
1.	Hasil Hutan Ikutan : Rotan Damar, Kayu Ulin, Tengkwang, Jelutung,	Hilangnya sumber pendapatan masyarakat

2.	Ladang	Menurunnya produksi Padi Ladang akibat berkurangnya rotasi perladangan.
3.	Benda – benda keramat : <i>sandung, pahewan, kaleka.</i>	Rusaknya tempat- tempat atau benda yang di anggap keramat oleh masyarakat.
4.	Tanah Adat	Hilangnya tanah adat dan tanaman yang ada diatasnya

Sumber : pengolahan data lapangan (2003)

Tindakan ini dianggap oleh masyarakat sebagai aliansi antara pemerintah dengan pengusaha HPH dalam mempertahankan kebijakan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, walaupun harus melakukan tindakan represif melalui tangan militer untuk mengamankan investasi dan hubungan pemerintah dan pengusaha. Dinas Kehutan Kabupaten Kotawaringin di Sampit, sebagai salah satu instansi sektoral yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah sekaligus berfungsi untuk mengamankan kebijakan pemerintah, merupakan “lahan basah” yang diperebutkan untuk jabatan-jabatan strategis.

Dampak dari eksploitasi hutan ini terlihat pula dari banyaknya lahan kritis yang terjadi di Kalimantan Tengah. Di bawah ini ditampilkan jumlah lahan kritis di propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2005/2006 yang merupakan akumulasi dari kerusakan hutan pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.17
Data Lahan Kritis Di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2005/2006

NO	KAB/KOTA	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	JUMLAH
1	Lamandau	23.326	81.059	184.248	288.633
2	Sukamara	67.009	30.876	61.209	159.094
3	Kotawaringin Barat	35.129	54.678	212.660	302.467

4	Seruyan	356.827	172.799	362.320	891.946
5	Kotawaringin Timur	226.248	406.434	320.614	953.296
6	Katingan	197.729	153.077	227.742	578.548
7	Palangka Raya	34.448	8.163	47.809	90.420
8	Gunung Mas	42.557	184.401	184.276	411.234
9	Pulang Pisau	46.033	73.309	363.625	482.967
10	Kapuas	78.948	130.455	387.325	596.728
11	Murung Raya	1.195.670	192.650	15.652	1.403.972
12	Barito Selatan	21.344	112.910	226.411	360.666
13	Barito Utara	50.876	209.387	78.153	338.415
14	Barito Timur	7.779	289.849	114.836	412.464
JUMLAH		2.383.923	2.100.046	2.786.880	7.270.850

Segah – Hearth of Borneo (2007)

Kerusakan lahan yang terbesar adalah di Kabupaten kotawaringin Timur, yaitu seluas 953.296 hektar dan 2 wilayah pemekarannya, yaitu kabupaten Seruyan 891.946 hektar dan kabupaten Katingan 578.296 hektar.

2.5. Pembangunan Perkebunan

Pada wilayah pengembangan Bagian Tengah yang di pusatkan di DAS Mentaya, telah dicadangkan luas areal lahan potensial untuk perkebunan seluas 1.287.500 hektar untuk tanaman kelapa sawit, karet dan kelapa. Sebanyak 50% dari luas areal tersebut telah ditanami dengan kelapa sawit oleh 27 pengusaha perkebunan yang telah mendapat ijin pengelolaan perkebunan.

Tabel 2.18
Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah Beroperasi
Di Kabupaten Kotim

Nomor	Nama Perusahaan	Luas (Ha)
1.	Samba Sakti Perkasa , PT.	10.000
2.	Lestari Unggul Jaya, PT.	30.000
3.	Indo Truba Tengah , PT.	5.000
4.	Sapta Karya Damai, PT.	17.500
5.	Kerry Sawit Indonesia, PT.	17.500
6.	Surya Barukah, PT.	17.500
7.	Kridatama Lancar, PT**)	17.500
8.	Teguh Sampoerna, PT.	17.500
9.	Agro Indomas, PT**)	12.000
10.	Mustika Sembuluh, PT**)	17.500
11.	Bumi Hutani Lestari, PT.	17.500
12.	Bina Sawit Abadi Pratama, PT**)	25.000
13.	Musirawas Citraharpindo, PT**)	12.500
14.	Windu Nabatindo Lestari, PT	17.500
15.	Wanasawit Subur Lestari, PT**)	10.000
16.	Bangkit Giat Usaha Mandiri, PT	15.000
17.	Karya Makmur bahagia, PT	12.500
18.	Indo Truna Timur, PT	10.500
19.	Bisma Dharma Kencana, PT	15.000
20.	Lestari Unggul Jaya PT	15.920
21.	London Sumatra Int., PT*)**)	8.000
22.	Trasindo Bhakti Pertiwi,*)	25.600
23.	Ciptatani Kumai Sejahtera, PT*)	10.000
24.	Uni Primacom, PT*)	7.500
25.	Hati Prima Agro, PT*)**)	7.000
26.	Jaya Citra Persada, PT	15.000
27.	Suka Jati Sawit Mekar, PT	15.000

Sumber : Profil Kab. Kotim Tahun 2000

Untuk mendukung keberhasilan sektor perkebunan ini, terdapat dua kota strategis yaitu kota Sampit dan Parenggean. Kota Sampit menjadi kota strategis karena di dukung oleh pelabuhan dan fasilitas pelabuhan yang memadai untuk pengapalan ke luar negeri. Sedangkan Parenggean merupakan sentral produksi yang di dukung oleh pabrik pengolahan kelapa sawit.

Faktor pendukung lainnya yang sangat penting pada wilayah pengembangan Bagian Tengah yang dipusatkan pada DAS Mentaya adalah pengembangan jalan Trans Kalimantan. Pada jalan Trans Kalimantan poros selatan telah menghubungkan Kalimantan Selatan - Palangka Raya – Sampit -Pangkalan Bun dan Kalimantan Barat. Jalan Trans Kalimantan poros tengah akan menghubungkan Palangka Raya - Kabupaten Barito Utara - Kabupaten Barito Selatan dan Kalimantan Timur. Jalan Trans Kalimantan poros selatan menempatkan kota Sampit sebagai kota yang strategis baik sebagai wilayah transit maupun sebagai pusat pengembangan wilayah karena meningkatnya arus barang, manusia dan jasa.

Pada usaha perkebunan ini terjadi pula konflik antara masyarakat lokal dengan pengusaha perkebunan sawit seperti terlihat pada tabel 2.19 berikut ini.

Tabel 2.19
Data Sebaran Konflik Perkebunan Kelapa Sawit
Di Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Perusahaan	Lokasi	Izin	Luas Areal (HGU)	Konflik
1.	PT. Agro Indomas (1996)	Kecamatan Danau Sembuluh	HGU	12,104 ha (12/HGU/BPN/98-6 April 1998)	Konflik Tanah
2.	PT. Mustika Sembuluh	Kecamatan. Mentaya Hilir (Kuala Kuayan) Kotim	SK-Pelepasan Kawasan	15,994 ha (895/Kpts-II/1996.4/11/1996) 3 thn 9 bln	Konflik Tanah
3.	PT. Indotruba Timur	Kecamatan Pмбуang Hulu	Izin Prinsip	9,750 ha (895/Menhut-VII/97.8/8/1997)	Konflik Tanah

4.	PT. Salawati Makmur	Kecamatan Danau Sembuluh	Izin Prinsip	16,850 ha (487/Menhutbun-II/98. 8/4/1998)	Pengurusan Lahan Masyarakat
5.	PT. Rungau Alam Subur.	Kecamatan Danau Sembuluh	Izin prinsip	6,725 1625/Menhutbun-II/96.11 Nop.1996)	Belum mendorong namun sudah menimbulkan konflik Horizontal.
6.	PT. Salonuk Ladang Mas	Kecamatan Danau Sembuluh	Izin Prinsip	12,715 ha (951/Menhutbun-VII/97. 26/8/97)	Mendorong konflik horozontal
7.	PT. Sawit Mas Nugraha Perdana	Kecamatan Danau Sembuluh	Menyampaikan Permohonan.	12.000 ha (525/67/UT/1995.1 7/4/1995)	- Konflik Horizontal. - Kasus tanah belum tuntas.
8.	PT. Sukajadi Sawit Mekar	Desa Sehabi	HGU	2005	- Pelanggaran Tanah Adat dan kebun masyarakat
9.	PT. Unggul Lestari	Desa Tumbang Bobi, Kecamatan Antang kalang	Ijin lokasi	2005	- Penolakan masyarakat terhadap lokasi perkebunan
10.	PT. Argo Karya Prima Lestari		Ijin lokasi	2005	- Pelanggaran terhadap tanah adat, Kebun dan ladang mayarakat

Sumber : YTT dan LMMDD-KT (2005)

Sebagian besar konflik tersebut adalah konflik pertanahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan tanah-tanah adat. Salahsatu dari perusahaan di atas, yaitu PT. Agro Indomas adalah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang merupakan group perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari pengusaha Malaysia yang terdiri atas PT. Agro Sembuluh, PT. Agro Bukit, PT. Agro Indomas, PT. Kalimantan Hijau Santosa, PT. Perkebunan Sawit Al-Mukarram, PT. Nabatindo Karya Utama dan PT. Jaya Sawit Utama, PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Sinar Cemerlang, PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri, PT. Mustika Sembuluh, PT. Sarana Prima Multi Niaga, PT. Swadaya Sapta Putra dan PT. Trasindo Aspac Agro Niaga.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini menyebabkan wilayah Bagian Utara dan Selatan yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Dayak merasa

terpinggirkan oleh proses pembangunan. Berbagai istilah yang menggambarkan keterpinggiran mereka tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, gambaran terjadinya marjinalisasi terhadap warga Dayak, *tempon petak menana sare tempon kajang bisa puat* (yang memiliki tetapi tidak menikmati hasilnya). *Kedua*, kondisi psikologis yang menggambarkan kebingungan dan kekecewaan masyarakat, *kan ngawa dia kuman manuk dan kan ngaju dia kuman tabuan* (ke kota tidak makan ayam dan ke desa tidak makan burung). *Ketiga*, gambaran mengenai ketidakberdayaan masyarakat, *ikei tuh managgalingah* (kami ini ikut kemana gelindingnya saja) dan *benteng dereh* atau kehidupan yang serba pas-pasan (*subsisten*). *Keempat*, proses pembangunan yang dianggap merugikan masyarakat kecil, digambarkan dengan simbol *speed boat* yang melaju di sungai tanpa mengindahkan perahu-perahu kecil yang mungkin dapat terbalik akibat ombak yang besar yang menerpanya.

2.6. Kependudukan dan Distribusi Sumberdaya Etnis

2.6.1. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1999 – 2000 mengalami kenaikan yang cukup berarti yaitu 485.220 jiwa pada akhir tahun 1999 dan 521.287 jiwa akhir tahun 2000. Selama kurun waktu satu tahun penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kenaikan 36.067 jiwa (7,43 %).

Tabel 2.20
Penduduk Kotawaringin Timur Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin,
Sex Ratio, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk

Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Ratio	Luas Daerah (Km ²)	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1 Seruyan Hilir	16,898	15,966	32,864	106	6,087	5,40
2 Mentaya Hilir Selatan	15,895	15,219	31,114	104	928	33,53
3 Katingan Kuala	12,609	11,387	23,996	111	1,440	16,66
4 Mendawai	4,012	3,153	7,165	127	1,826	3,92
5 Pulau Hanaut	9,490	8,998	18,488	105	619	29,87
6 Mtw. Batu / Ketapang	39,160	36,961	76,121	106	722	105,43
7 Mentaya Hilir Utara	7,440	6,909	14,349	108	723	19,85
8 Danau Sembuluh	5,491	4,894	10,385	112	2,424	4,28
9 Hanau	9,249	8,137	17,386	11	1,135	15,32
10 Seruyan Tengah	12,204	10,822	23,026	113	2,012	11,44
11 Kotabesi	12,438	11,296	23,734	110	2,177	11
12 Baamang	22,766	22,225	44,991	102	774	58,13
13 Kamipang	3,341	3,135	6,476	107	2,793	2,32
14 Tasik Payawan	3,084	2,836	5,920	109	804	7,36
15 Katingan Hilir	8,849	8,205	17,054	108	663	25,72
16 Tewang Sg, Garing	4,452	4,157	8,609	107	568	15,16
17 Pulau Malan	3,185	3,172	6,357	100	805	7,90
18 Katingan Tengah	9,600	8,424	18,024	114	1,089	16,55
19 Cempaga	15,028	13,598	28,626	111	2,424	11,81
20 Perenggean	13,477	11,370	24,847	119	1,774	14,01
21 Mentaya Hulu	10,818	9,519	20,337	114	3,364	6,05
22 Seruyan Hulu	4,433	4,296	8,729	103	4,746	1,84
23 Antang Kalang	13,730	11,866	25,596	116	2,991	8,56
24 Katingan Hulu	4,716	4,624	9,340	102	2,604	3,59
25 Marikit	2,795	2,626	5,421	106	2,178	2,49
26 Sanaman Mantikey	6,437	5,895	12,332	109	3,030	4,07
Kotawaringin Timur	271,597	249,690	521,287	109	50,700	10,28

Sumber : Kotim dalam Angka Tahun 2000

Sebaran penduduk yang terbesar adalah di Kecamatan Mentawa Baru / Ketapang yaitu 76.121 jiwa, kecamatan Baamang 44.991 jiwa dan kecamatan Seruyan Hilir 32.864. Kedua kecamatan tersebut, yaitu kecamatan Mentawa Baru dan kecamatan Baamang adalah bagian dari kecamatan yang berada dalam wilayah kota Sampit. Besarnya jumlah penduduk yang dekat dengan akses pembangunan kota Sampit terlihat

pula dalam pengelompokan penduduk berdasarkan pengembangan wilayah, seperti terlihat pada tabel 2. 21 berikut ini.

Tabel 2.21
Penduduk Hasil SP 2000, Menurut Sektor Pengembangan Wilayah Kotawaringin Timur.

Sektor Pengembangan Wilayah	Luas (Km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan / Km ²	Pertumbuhan (%)
Wil. Utara	20.002	101.354	4,95	2,07
Wil. Tengah	16.651	281.696	16,93	3,82
Wil. Selatan	14.047	138.237	9,84	3,22
Kotim	50.700	521.287	10,24	3,31
Kalteng	153.564	1.801.504	11,73	2,67

Sumber : Kotim dalam Angka Tahun 2000

Pada sektor Pengembangan Wilayah Bagian Tengah terdapat persebaran jumlah penduduk yang besar yaitu 281.696 jiwa dibandingkan dengan Wilayah Bagian Utara 101.354 jiwa dan Wilayah Bagian Selatan 138.237 jiwa. Besarnya penduduk di Wilayah Bagian Tengah ini karena adanya migrasi penduduk dari Jawa dengan tujuan kota Sampit.

Pada Wilayah Bagian Utara dan Wilayah Bagian Selatan lebih banyak dihuni oleh penduduk etnis Dayak, namun pada daerah pantai lebih banyak dihuni oleh penduduk etnis Banjar, Jawa dan Dayak Islam. Pola penyebaran penduduk yang terjadi di Kabupaten kotawaringin Timur ini memposisikan kelompok masyarakat Dayak yang tinggal di Daerah Aliran Sungai sebagai kelompok yang terisolasi dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah kota Sampit dan wilayah pantai. Keterisolasian ini terakait dengan keterbatasan sarana jalan darat yang belum menjangkau desa-desa di Wilayah DAS ini (lihat tabel 2.3).

Dari aspek komposisi etnis, homogenitas masyarakat Dayak yang bermukim di wilayah DAS menyebabkan menguatnya tradisi kebersamaan yang menghambat

proses perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, identitas masyarakat DAS ini menjadi lebih menonjol ketika penduduk pendatang telah mulai masuk dalam wilayah DAS untuk menebang kayu tanpa mempertimbangkan wilayah hutan tanah adat atau tanah yang dianggap keramat oleh penduduk lokal.

Data jumlah penduduk kabupaten Kotawaringin Timur dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah menunjukkan jumlah terbesar, yaitu 521.287 jiwa, seperti terlihat pada tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.22
Penduduk Propinsi Kalimantan Tengah Hasil SP 2000
(Hasil Evaluasi SP2000 Kab / Kota Kalteng 8 – 12 Oktober 2000)

Kab. / Kota se Kalteng	Luas (Km ²)	Rumah Tangga	Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan	Kepadatan	Sex Ratio
Kobar	21000	65602	247035	4,21	11,8	109,7
Kotim	50700	139013	521287	3,31	10,28	109
Kapuas	34800	130	511995	1,55	14,7	104
Barsei	12664	46517	180105	1,75	14,2	102,8
Batara	32000	48042	183036	2,38	5,7	106,7
P.Raya	2400	41013	160018	3,71	66,7	103,7
Kalteng	153564	340317	1803476	2,67	11,7	106,3

Sumber : Kalimantan Tengah dalam Angka, BPS 2000

Besarnya jumlah penduduk kabupaten Kotawaringin Timur ini didorong oleh adanya program transmigrasi dan transmigrasi spontan (tabel 2.23 dan 2.24)

Tabel 2.23
Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun	Jumlah Kepala Rumah Tangga	Jumlah jiwa
1999/2000	419	899
1998/1999	896	3060
1997/1998	3700	12182
1996/1997	2176	7191
1995/1996	2533	9014

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Perambahan Hutan Kotawaringin Timur, 2000

Pertumbuhan jumlah penduduk melalui program transmigrasi ini diikuti pula oleh transmigrasi spontan yang didorong oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1998 dan daya tarik kota Sampit sebagai tempat berusaha. Mobilitas Penduduk ini dapat dilihat pada tabel 2.24 mengenai peningkatan jumlah armada kapal laut dan frekuensi pelayaran Sampit – Surabaya.

Tabel 2.24
Mobilitas Penduduk ke Sampit

Tahun	Banyaknya Kapal (unit)	Datang (orang)	Berangkat (orang)
1999	252	203351	213615
1998	132	117700	118399
1997	92	77794	85069
1996	104	79954	76620
1995	75	69849	80834

Sumber : Kotim dalam Angka, BPS 2000

Dari 521.287 jiwa penduduk Kotawaringin Timur terdapat 16,95% etnis Banjar, Jawa 17,87%, Dayak 51,89% dan Lain-lain 6,34% (BPS, 2000). Di kota Sampit komposisi penduduk Etnis adalah sebagai berikut : Madura 60%, Banjar 20%, Dayak 10% dan Jawa 10% (ICG, 2001).

2.6.2. Distribusi Sumberdaya Etnis

Ruang publik sebagai tempat pertemuan orang-orang dengan berbagai kepentingan telah menciptakan persaingan dalam memperebutkan sumber daya ekonomi dan terhadap akses politik yang tersedia. Kondisi ini dapat dipahami sebagai proses transformasi akibat dinamika masyarakat dalam mengejar kepentingannya masing-masing, termasuk peran pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan aparat sebagai pengambil keputusan. Masing-masing pelaku akan memberikan respon dan menempati perannya dalam dinamika kehidupan masyarakat. Pertarungan dalam memperebutkan sumberdaya ekonomi dan akses politik telah mendorong aliansi atau pengelompokan-pengelompokan sosial yang dapat mengarah pada perpecahan masyarakat (*divided society*).

Meningkatnya jumlah penduduk di Sampit ini, terkait pula dengan penguasaan sumber-sumber kegiatan ekonomi oleh kelompok etnis Madura dan Banjar. Sektor-sektor perdagangan yang dikuasai oleh etnis Madura adalah perdagangan sayur/buah/daging, tukang becak/ojek, buruh, jasa angkutan, pengusaha pemborong/kontraktor dan usaha perhotelan. Pada usaha perdagangan sembakau, warung makan dan minuman, dan usaha perdagangan kayu dikuasai oleh etnis Banjar, sedangkan orang Dayak lebih banyak yang bangga dengan status pegawai negeri.

Penguasaan orang-orang Madura pada sektor usaha di atas, merupakan kekuatan alami yang bersumber dari kebiasaan hidup berkelompok dari orang-orang Madura dan menguatnya hubungan antar sesama perantau, telah membentuk solidaritas antar sesama orang Madura. Kondisi ini didukung pula oleh faktor lingkungan sehingga memberi peluang kepada mereka untuk mengisi peluang usaha yang masih

belum banyak digarap oleh orang lain. Keberhasilan mereka pada bidang usaha tersebut semakin mengokohkan mereka sebagai pelaku ekonomi informal yang rajin dan ulet dalam suatu jaringan sosial. Kekuatan Jaringan sosial ini terletak pada kepercayaannya kepada Kiai, sehingga acara arisan yang dikaitkan dengan pengajian rutin setiap malam jumat merupakan kekuatan bagi anggotanya untuk menghimpun dana yang dapat diinvestasikan untuk memperluas bidang usaha mereka.

Keberhasilan mereka pada beberapa bidang usaha di atas, telah menimbulkan dorongan untuk menguasai dengan mengusir atau memperlakukan dengan kekerasan terhadap orang lain yang akan berusaha dibidang yang telah mereka kuasai. Dalam konteks inilah, muncul preman-preman Madura yang menjual jasa untuk mengamankan usaha-usaha mereka.

Data di bawah ini memperlihatkan penguasaan kelompok etnis berdasarkan jenis usaha di kota Sampit (tabel 2.25)

Tabel 2.25

Jenis Usaha Penduduk Berdasarkan Kelompok Etnis.

Jenis Kegiatan	Perbandingan pemilik/pelaku atas dasar etnis (%)				
	Dayak	Banjar	Madura	Jawa	Lain nya
1. Pedagang Sembako	10	50	20	10	10
2. Pedagang sayur/buah/daging	5	20	55	10	5
3. Tukang Becak / Gerobak	-	10	80	10	-
4. Buruh pelabuhan/jalan/bangunan.	-	10	80	10	-
5. Pemborong / Pengusaha	1	10	50	15	10
6. Angkutan Kota :					
a. Darat	5	20	55	15	5
b. Sungai / laut	5	10	75	5	5
7. Rumah makan / warung	5	55	15	20	5
8. Pemilik Hotel	5	25	35	25	5
9. Pengusaha kayu	25	45	10	20	5
10. Pegawai negeri	65	10	5	20	5

Sumber : Satia (2001:64)

Penguasaan sumber daya etnis pada tabel 2.25 di atas, menunjukan bahwa etnis Banjar lebih banyak menguasai usaha perdagangan sembako (50%), etnis Madura menguasai beberapa jenis usaha, yaitu : perdagangan sayur/buah/daging (55%), tukang becak/gerobak (80%), buruh pelabuhan/jalan/bangunan (80%) dan angkutan darat (75%). Sedangkan etnis Dayak lebih banyak sebagai pegawai negeri (65%).

Kondisi di atas, telah menimbulkan kesadaran kelompok etnis Dayak bahwa mereka telah tersingkir dari ranah ekonomi. Kesadaran ini telah meluas pula pada aspek politik yang melihat adanya ancaman terhadap gejala besarnya jumlah suara untuk PKB dan PPP di Kabupaten Kotawaringin Timur yang didukung oleh kelompok etnis Madura, dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah..

Tabel 2.26
Jumlah Suara Lima Partai Politik Kabupaten/Kota Pada Pemilu 1999 Untuk Anggota DPR TK II

Kabupaten/ Partai	Kotim	Kobar	Kapuas	Barut	Barsel	P. Raya
PDIP	89304	38792	66673	28240	26103	26619
Golkar	49005	44628	61978	18484	29820	16979
PPP	24888	12741	34219	5626	5857	6185
PAN	1656	4497	6519	5547	4559	4388
PKB	16949	8639	11910	3340	3995	4019

Sumber : Direktorat Sosial Politik Kalimantan Tengah, 1999

Gejala ini ditafsirkan oleh masyarakat Dayak dari kujungan Gus Dur ke Sampit, yang memberikan semangat dan keyakinan terhadap kelompok Madura sehingga mendorong meningkatnya mobilitas pendatang dari Madura ke sampit yang didukung oleh Ikatan Masyarakat Madura (IKAMMA) di Sampit. Kondisi ini merupakan

ancaman bagi orang-orang Dayak yang sedang memperjuangkan kedudukan yang strategis bagi putra daerah. Pada tabel 2.27 berikut ini memperlihatkan jumlah anggota DPRD kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan kelompok etnis.

Tabel 2.27
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur
berdasarkan kelompok Etnis

Etnis	1994-1999	1999-2004
Dayak Muslim	3	4
Dayak Kristen	14	9
Banjar	4	12
Jawa	8	4
Batak	1	1
Madura	0	4

Sumber : Sekwan DPRD Kabupaten Kotim, 2008

Data di atas memperlihatkan adanya pergeseran jumlah anggota DPRD yang berasal dari Dayak kristen dari 14 orang menjadi 9 orang, peningkatan jumlah etnis Banjar dari 4 orang menjadi 12 orang dan masuknya etnis Madura sebanyak 4 orang. Secara umum dapat dikatakan bahwa anggota DPRD kabupaten Kotawaringin Timur dikuasai oleh para pemeluk agama Islam yang berasal dari PKB dan PPP.

2.7. Kesejahteraan masyarakat

Salah satu upaya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihatnya dari Indek Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran IPM ini berdasarkan beberapa indikator yang meliputi angka harapan hidup (*life expectancy*

rate), angka melek hurup dari rata-rata lamanya sekolah, dan pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat (*purcchasing power parity*).

Dasar pemikiran dari Indeks Pembangunan Manusia ini menurut Soni dan Sahat (2008) adalah pengembangan dari model pengukuran indeks mutu hidup (*Physical Quality Life Index*) yang memiliki tiga parameter, yaitu : angka kematian bayi, angka harapan hidup waktu lahir dan tingkat melek hurup. Pembangunan manusia adalah model pembangunan tentang, untuk dan oleh penduduk. Hal yang paling mendasar dan strategis adalah indikator peluang hidup yang panjang dan sehat, mempunyai kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta hidup layak dengan kemudahan dalam memperoleh akses ekonomi.

Indek Pembangunan Manusia di kabupaten Kotawaringin Timur seperti terlihat pada tabel 2.28, menunjukkan angka terendah, yaitu 65.3 % dibandingkan dengan kabupaten Kapuas 67,1 % dan kota Palangkaraya 9,8 %.

Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 1999 Berdasarkan Kabupaten dan
Percentase Penduduk Kalimantan Tengah

Kabupaten	Angka harapan hidup	Angka melek hurup	Rata-rata lama pendidikan	Tingkat pendapatan per kapita	Indeks Pembangunan Manusia (IMP)
Kotawaringin Timur	67,9	93,4	6,8	563.7	65,3
Kapuas	69,6	95,0	6,6	571.4	67,1
Palangka Raya	72,1	98,1	9,8	582.2	72,3
Kalimantan Tengah	69,2	94,8	7,1	565.4	66,7

Sumber : *Human Development Report, 2004, LabSosio, 2005*

Rendahnya Indek Pembangunan Manusia menggambarkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kotawaringin Timur, dibandingkan dengan

kabupaten Kapuas dan kota Palangka Raya, dan secara umum dengan Indeks Pembangunan Kalimantan Tengah.



BAB III
PROSES TERJADINYA
KONFLIK DAN KEKERASAN
ETNIS DI SAMPIT

BAB III
PROSES TERJADINYA KONFLIK DAN KEKERASAN ETNIS
DI SAMPIT

Terjadinya konflik etnis di Sampit diawali dengan terjadinya perkelahian antara orang Dayak dengan orang Madura di Kereng Pangi pada akhir Desember 2000 yang menewaskan orang Dayak. Penanganan kasus tersebut tidak dilakukan secara tuntas oleh pihak keamanan, sehingga menimbulkan kekecewaan orang Dayak terhadap aparat kepolisian. Sejak peristiwa tersebut terjadi penguatan identitas etnis yang memosisikan budaya *belom bahadat* sebagai standar dalam interaksi antara orang Dayak dengan orang Madura. Dengan demikian, batas-batas budaya (*cultural boundaries*) sudah mulai dibangun sebagai pembeda dengan kelompok etnis lainnya.

Dampak konflik etnis di Sampit ini telah menimbulkan kerugian materi dan korban nyawa dari pihak orang-orang Madura, termasuk upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi dampak konflik tersebut. Selain itu, terdapat pula respon dari kelompok masyarakat Madura dan kelompok masyarakat Dayak untuk memberikan keseimbangan informasi sehingga tidak terkesan Dayak sentrisme yang memojokan kelompok etnis Madura, termasuk upaya peneliti untuk mencegah terjadinya bias dalam penelitian ini.

3.1. Kronologis Terjadinya Konflik Etnis

Kota Sampit yang dikenal sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan di Kalimantan Tengah, telah menjadi alternatif bagi migran dari pulau Jawa dan Madura untuk mengadu nasibnya di kota Sampit dan sekitarnya. Mobilitas penduduk pendatang ini semakin meningkat seiring dengan krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia dan menempatkan penduduk etnis Madura sebagai kelompok penduduk

terbesar (60%) di kota Sampit (ICG, 2001:1). Sebagai penduduk mayoritas di kota Sampit, kelompok etnis Madura mempunyai intensitas kontak dengan etnis lain, termasuk dengan etnis Dayak.

Kontak etnis Dayak dan Madura ini, pada satu sisi telah menciptakan pembauran etnis melalui perkawinan. Pada sisi lain, pengalaman etnis Dayak selama kontak dengan etnis Madura telah melahirkan pandangan yang negatif mengenai perilaku orang Madura di Sampit. Terjadinya pandangan negatif ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : *pertama*, riwayat konflik yang terjadi antara orang Dayak dengan orang Madura. Sejak tahun 1982, telah tercatat sebanyak lima belas kali konflik dengan sumber pertikaian antara lain pengambilalihan tanah milik orang Dayak, perkelahian, dan pemerkosaan gadis Dayak oleh orang Madura. *Kedua*, meningkatnya tindakan kriminal seperti perampokan, pencarian yang meresahkan warga Sampit, karena para pelakunya sering lepas dari jerat hukum. *Ketiga*, kebiasaan orang Madura yang membawa carok dan berperilaku kasar, telah membentuk pandangan orang Dayak bahwa orang Madura cenderung melakukan tindakan kekerasan.

Tabel 3.1
Kronologis Konflik Etnis di Sampit

No	Tahun	Tempat kejadian	Sumber konflik	Penyelesaian
1.	1982	Palangka Raya	Seorang gadis Dayak diperkosa	Perdamaian menurut hukum adat
2.	1982	-	Pembunuhan atas seorang suku Dayak	Tidak ada penyelesaian secara hukum
3.	1983	Bukit Batu Kasongan	Perkelahian antara 1 orang Dayak dikeroyok oleh 30 orang Madura sehingga menyebabkan 1 orang Dayak meninggal	Diadakan Upacara <i>Tiwah</i>
4.	1996	Palangka Raya	Pembunuhan dan pekosaan seorang gadis di Bioskop PANALA	Pembunuh hanya mendapat hukuman ringan

5.	1996	Palangka Raya	Perkelahian antara orang Dayak dan orang Madura sehingga menyebabkan 1 orang Dayak meninggal	Tidak ada penyelesaian secara hukum
6.	1997	Desa Karang Langit, Barito Selatan	Dua orang Dayak dikeroyok oleh empat orang Madura yang berakhir dengan kematian empat orang Madura.	Tindakan hukum terhadap orang Dayak dianggap sangat berat.
7.	1997	Tumbang Samba, Katingan	Seorang anak laki-laki mati dibunuh oleh orang Madura dengan 30 bekas tusukan ditubuh anak tersebut.	
8.	1998	Pangka Raya	Orang Dayak dikeroyok oleh 4 orang Madura, yang menimbulkan kematian orang Dayak.	Pelakunya belum dapat ditangkap karena melarikan diri sehingga tidak ada penyelesaian hukum.
9.	1999	Palangka Raya	Petugas ketertiban umum dibacok oleh orang Madura.	Pelakunya ditahan di Polresta Palangka Raya, namun besok harinya datang sekelompok Madura yang berdemonstrasi menuntut temannya dibebaskan, dan akhirnya pihak Polresta Palangka Raya membebaskannya tanpa proses hukum.
10.	1999	Palangka Raya	Dua orang Dayak meninggal karena dikeroyok oleh beberapa orang Madura	Pembunuhnya lolos. Pada kasus ini orang Jawa (suku Jawa) sebagai saksi mendapat hukuman 1,5 tahun dengan alasan fitnah karena menyebabkan pelakunya melarikan diri.
11.	1999	Pangkut, Arut Utara, Kotawaringin Barat	Perkelahian massal dengan suku Madura, disebabkan karena orang Madura memaksa untuk mengambil emas milik orang Dayak. Perkelahian tersebut	Tidak ada penyelesaian hukum.

			menimbulkan korban di kedua belah pihak	
12.	1999	Tumbang Samba	Penikaman terhadap pasangan suami-istri oleh 3 orang Madura, yang mengakibatkan suami-istri tersebut luka berat dan dirawat di RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya.	Pelaku tidak tertangkap "katanya" sudah lari ke Madura, sehingga tidak ada penyelesaian hukum.
13	2000	Pangkut Arut Utara Kotawaringin Barat	Satu keluarga Dayak mati dibantai oleh orang Madura,	Pelaku pembunuhan lari sehingga tidak ada penyelesaian hukum.
14	2000	Kereng Pangi, Kabupaten Kotawaringin Timur	Terjadi pembunuhan terhadap Sendung yang dikeroyok oleh orang-orang Madura	Pelaku kabur, dikatakan sudah kembali ke Madura, sehingga kasus ini tidak ada penyelesaian hukum
15	2000	Palangka Raya	Satu orang Dayak dibunuh oleh beberapa orang Madura di depan Gereja Imanuel Jalan Bangka	Para pelaku lari dan tidak ada proses hukum

Sumber : Buku Merah (2001)

Kekerasan etnis di Sampit pada awalnya hanya perkelahian antara orang Dayak dan orang Madura di Kereng Pangi kurang lebih 100 km dari kota Sampit, yaitu di daerah yang dikenal sebagai daerah pertambangan rakyat. Pada tanggal 16 Desember 2000, awal kejadian pembunuhan Sendung etnis Dayak Manyan oleh tiga orang etnis Madura telah menimbulkan kemarahan dari warga etnis Dusun, Manyan dan Lawangan (Dusmala) dan warga Dayak setempat dengan melakukan penghancuran rumah-rumah orang Madura pelaku pembunuhan Sendong, karena ketiga pelaku pembunuhan tersebut dikabarkan telah melarikan diri ke Madura.

Menyikapi keadaan di atas pada tanggal 19 Desember 2000, LMMDD-KT Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan hasil kesepakatan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

1. Menegakkan wibawa aparat keamanan, agar kasus Rantau Pulut, kasus Tumbang Samba, kasus Tangar dan lain-lainnya dapat diselesaikan.
2. Tindakan-tindakan anarkis oleh warga Madura seperti kasar, menyelesaikan perselisihan melalui kekerasan (pembunuhan), merampok dan mencuri, tidak pernah terjadi lagi terhadap etnis Dayak.
3. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh etnis Madura merupakan peringatan terakhir, dan sanksinya mereka akan diusir secara paksa melalui kekerasan untuk meninggalkan tanah Dayak.

Pada waktu yang bersamaan, forum pemuda Madura Kotawaringin Timur Sampit juga menyampaikan kesepakatan yaitu :

1. Mencari dan menindak tegas provokator, dalang dibalik peristiwa tersebut, tanpa pandang bulu sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Kasus Kereng Pangi adalah kasus kriminal murni akan tetapi oleh sebagian orang dibelokarakan menjadi isu konflik antar etnis.
3. Apabila kasus ini sampai ke tingkat nasional maka yang paling bertanggung jawab adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

Forum pemuda warga Madura yang menanggapi kasus Kereng Pangi dengan menyebutkan bahwa kasus tersebut dilakukan oleh provokator dan merupakan tindak kriminal murni, pada satu sisi dianggap meremehkan kasus Kereng Pangi dan pada sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kasus Kereng Pangi akan meluas menjadi konflik massal. Sejak peristiwa itu diketahui bahwa ada gerakan pasukan *Carok Gencar* yang

telah dilatih dan dipersenjatai, ditemukannya bom-bom rakitan di sepuluh tempat di kediaman orang Madura. Selain itu diketahui pula gencarnya tindakan-tindakan preman Madura untuk melakukan pencurian dan pemerasan terhadap etnis Dayak sebagai upaya untuk memancing kemarahan warga etnis Dayak. Di lain pihak, muncul gerakan-gerakan dari Kyai yang didatangkan dari Jawa Timur untuk melakukan pengrusakan terhadap Masjid dan Musholla di Sampit untuk menyulut terjadinya konflik agama di Sampit. Isu ini secara spontan ditanggapi oleh tokoh-tokoh agama di Sampit sehingga tidak menjadi konflik yang bernuansa agama

Perkelahian yang menewaskan orang Dayak tersebut, juga telah menimbulkan protes dari warga Dayak, di antaranya Sabran Akhmad dari unsur pengurus LMMDD-KT yang mengatakan bahwa Propinsi Kalimantan Tengah ini dilahirkan dengan perjuangan darah dari orang Dayak. Oleh karena itu, penduduk Madura pendatang hendaknya menyesuaikan diri dengan adat dan tradisi orang Dayak, yaitu *belum bahadat* atau dalam bahasa sehari-hari disebut dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Sebutan *belum bahadat* itu kemudian menjadi sakral karena dikaitkan dengan *pali* (pantangan) yang akan mengganggu kehidupan masyarakat Dayak pada masa yang akan datang dan dalam keadaan normal maka *pali* (pantangan) tersebut harus dihapuskan dengan upacara *manetes hinting bumu*.

Puncak kekerasan yang terjadi antara kelompok masyarakat Madura dan kelompok masyarakat Dayak adalah akibat meluasnya konflik pada tanggal 18 dan 19 Pebruari 2001 yang berakhir dengan penguasaan kota Sampit oleh kelompok etnis Madura. Pada waktu itu, warga etnis Madura menyerang dan membakar hidup-hidup tiga orang warga etnis Dayak, yaitu Dahur dan dua orang anaknya di jalan Tidar, membakar rumah Damang Suling di Jalan Padat Karya dan beberapa rumah orang

Dayak di jalan Mangga dua, jalan Darmo Sugondo, jalan Bamang Tengah, kompleks Dasmala dan merusak hotel Rama milik orang Dayak. Pada kejadian tersebut tiga orang dibakar dan lima orang dianiyaya di jalan Padat Karya.

Kota Sampit yang dikuasai oleh etnis Madura selama dua hari yaitu pada tanggal 18 dan 19 pebruari 2001, didukung pula oleh spanduk-spanduk yang bertuliskan “Selamat Datang di Kota Sampang Kedua” yang dipasang di Jalan S.Parman. Spanduk yang bertuliskan “Selamat Datang di Kota Madura” di jalan jawa-pelabuhan Sampit dan spanduk yang bertuliskan “Kota Sampit Serambi Mekah” di jalan S.Parman, serta teriakan dengan yel-yel “mana orang Dayak”.

Tanggal 20 Pebruari 2001, pasukan khusus Dayak yang datang dari Kasongan, Seruyan, Mentaya, langsung menuju markas orang-orang Dayak di Hotel Rama untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok etnis Madura yang telah menguasai kota Sampit. Sejak itu, dimulailah perburuan, pembunuhan, penghancuran dan pembakaran rumah-rumah milik orang Madura oleh orang-orang Dayak.

3.2. Dampak Konflik Etnis

Konflik dan kekerasan etnis di Sampit telah menimbulkan dampak yang luas, terutama terhadap kelompok yang bertikai, yaitu kerugian harta benda, masalah pengembalian pengungsi dan kesediaan masyarakat untuk menerima para pengungsi. Dampak konflik dan kekerasan etnis di Sampit ini telah mengakibatkan korban meninggal, kerugian harta benda dan pengungsian dalam jumlah besar dari warga etnis Madura. Selain itu terjadi pula perluasan konflik ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Perluasan konflik ini didasarkan atas solidaritas orang Dayak yang menganggap bahwa penduduk Madura telah melanggar budaya *belom bahadat* sebagai ancaman bagi kehidupan warga masyarakat Dayak.

Tabel 3.2
Korban dan Kerugian Harta Benda dalam Kekerasan Etnis Di Sampit

Korban dan Kerugian	Sampit	Palangka Raya	Kapuas	Kobar	Jumlah
1. Korban Jiwa					
- Meninggal	391	13	14	1	418
- Luka berat	14	8	7	-	29
2. Kerugian harta benda					
- Rumah dibakar	583	702	246	-	1531
- Rumah dirusak	190	-	27	-	217
- Toko dibakar	24	-	-	-	24
- Kios dibakar	12	-	-	-	12
- Kendaraan yang dirusak					
~ Mobil	6	11	-	-	17
~ Sepeda motos	47	-	-	-	47
~ Becak	-	201	-	-	201
3. Pengungsi					87.698

Sumber : *Satkorlak, 2002*

Tabel 3.2 di atas memperlihatkan bahwa penyebaran konflik tersebut ke beberapa wilayah di Kalimantan Tengah mengikuti jalur jalan Trans Kalimantan poros selatan, yaitu, Kapuas, Palangka Raya, dan Pangkalan Bun.

Meluasnya Konflik etnis ini adalah bagian dari solidaritas masyarakat Dayak yang tinggal di Palangka Raya yang menuntut dibebaskannya tigapuluh delapan orang warga Dayak yang ditahan di Polda Palangka Raya. Mereka ini dituduh sebagai provokator terjadinya kerusuhan di Sampit.

Masyarakat di Palangka Raya melakukan unjukrasa menuntut keadilan karena pihak keamanan dinilai bertindak kurang adil dengan menuduh peristiwa tersebut terjadi hanya dilakukan oleh masyarakat Dayak. Padahal yang melakukan tindakan yang brutal dan anarkis adalah warga etnis Madura. Di lain pihak, pada tanggal 24 pebruari 2001 ditemukan empatbelas Bom oleh warga masyarakat bersama aparat kepolisian di rumah warga Madura di Jl. Dr. Murjani Palangka Raya yang merupakan markas dari Ikatan

Keluarga Madura (IKAMA). Sejak itu, konflik etnis tersebut mulai meluas ke beberapa daerah di Kalimantan Tengah.

Konflik etnis di Sampit yang menimbulkan korban, kerugian harta benda dan pengungsian warga Madura asal Sampit, menimbulkan reaksi dari Ikatan Keluarga Madura Indonesia yang menyelenggarakan pertemuan di Hotel Ibis pada tanggal 2 Maret 2001 di Surabaya. Hasil pertemuan tersebut melahirkan beberapa pernyataan sebagai berikut :

1. Mendesak kepada pemerintah di Jakarta agar memberi sanksi yang keras terhadap suku Dayak karena telah melecehkan moral bangsa dan menghancurkan rasa persatuan dan kesatuan.
2. Memberikan perlindungan kepada suku Madura khususnya agar tetap bersama-sama dengan suku lain di Kalimantan sebagai kesatuan bangsa Indonesia.
3. Menyediakan bahan makanan yang cukup serta memperhatikan kesehatan mereka selama di pengungsian dan secepatnya mengembalikan mereka ke daerah asalnya Sampit dan Palangka Raya, karena pada hakekatnya mereka adalah warga keturunan Madura.
4. Menyerukan kepada suku Dayak agar tidak melakukan lagi tindakan biadab dan keji, karena perbuatan itu bukan merupakan ciri moral bangsa.
5. Memberikan peringatan keras kepada suku Dayak agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan tidak mengganggu lagi suku Madura yang berusaha dan bekerja di Sampit dan Palangka Raya (Kalimantan).
6. Mendesak kepada pemerintah daerah Kalimantan Tengah baik Provinsi maupun Kabupaten agar mengganti harta benda yang hilang dan habis dibakar termasuk menyediakan lapangan kerja serta menampung anak-anak dan perempuan

keturunan Madura yang tidak berdosa sebagai akibat dari perlakuan orang Dayak yang biadab dan tidak berperikemanusiaan serta tidak bermoral.

7. Mengutuk sekeras-kerasnya bahwa tindakan pengusiran terhadap suku Madura keluar dari Kalimantan adalah merupakan tindakan yang sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Cara-cara seperti itu, bukan ciri moral bangsa Indonesia yang bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika dan untuk itu kami mendesak kepada pemerintah untuk memberikan sanksi hukum yang seadil-adilnya kepada tokoh-tokoh suku Dayak atau aparat pemerintah daerah Kalimantan yang melakukan provokator.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Maret 2001, dilakukan pula pertemuan antara pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tokoh-tokoh Masyarakat dalam menyikapi hasil pertemuan antara utusan Pemerintah daerah Kalimantan Tengah dengan tokoh masyarakat Madura se Jawa Timur dan unsur pemerintah daerah Jawa Timur. Tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendukung keinginan warga Madura dalam situasi konflik tersebut untuk mengungsi (evakuasi) dan juga mendapat persetujuan dari Pemenritah Daerah Kotawaringin Timur maupun Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. Evakuasi ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan konflik antar keduabelah pihak (*cooling down*), melakukan penyelamatan jiwa guna mengurangi korban dan menciptakan rasa aman keduabelah pihak.
2. Dalam jangka pendek warga etnis Madura harus keluar dari wilayah Kalimantan Tengah untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif, seraya berupaya

mencari langkah-langkah rekonsiliasi yang arif dan bijaksana menuju integrasi daerah maupun integrasi nasional.

3. Disarankan untuk memberikan informasi yang sesungguhnya secara benar dan bertanggung jawab terhadap akar konflik antara warga Dayak dengan warga Madura, terutama dalam menghadapi pertemuan-pertemuan atau dialog-dialog yang bernuasa rekonsiliasi, maka diminta kepada pihak pemerintah daerah Kalimantan Tengah menerbitkan “buku Putih” sebagai media publikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat luas, guna mendapatkan pengertian pemahaman yang benar tentang akar konflik kedua warga yang bertikai.

Buku putih tersebut hendaknya berisikan tentang hal sebagai berikut : *pertama*, Sekilas konflik warga Dayak pada masa lampau sebelum Rapat damai Tumbang Anoi tahun 1894. *Kedua*, uraian singkat budaya Dayak menuju peradaban moderen kemanusiaan melalui perjanjian Tumbang Anoi. Dalam hal ini keterbukaan warga Dayak terhadap etnik lain dan pemberlakuan hukum adat untuk menyelesaikan konflik. *Ketiga*, akar sumber konflik dan peristiwa konflik antara etnis Dayak dengan etnis Madura di Kalimantan Tengah. *Keempat*, konsep pemikiran kedepan penyelesaian konflik menuju integrasi daerah maupun nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Kelima*, aneka aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah (Dayak dan etnis lain, di luar etnis Madura. *Keenam*, penutup dan lampiran yang berisikan bukti peristiwa konflik dan isi perjanjian perdamaian.

4. Mendorong dan menghimbau kepada aparat keamanan dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan tindakan hukum yang cepat dan kongrit terhadap warga etnis Madura yang menyimpan, memiliki, menyebarkan dan

menggunakan bom (bahan peledak) selama ini di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Tengah. Begitu juga terhadap pelaku pembunuhan warga etnis Dayak yang dilakukan oleh warga etnis Madura baik secara kelompok maupun perorangan diambil tindakan hukum secara tegas, tuntas, termasuk pelaku utama atau penggerak pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 pebruari 2001 di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.3. Respons Masyarakat Dayak Terhadap Konflik Etnis

Dewin Marang, ketua Majelis Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam merespon konflik etnis di Sampit ini, mengatakan bahwa terjadinya konflik etnis di Sampit adalah akibat proses peminggiran terhadap orang Dayak dan orang Madura dianggap terdepan dan langsung dalam melakukan proses peminggiran terhadap kelompok masyarakat Dayak. Keadaan ini disebutkannya sebagai "*tepon petak menana sare*" (yang punya tanah menanam dipinggiran). Oleh karena itu kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Madura bertujuan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat Dayak yang selama ini telah dirampas oleh orang Madura.

Menanggapi mengapa orang Dayak membangkitkan budaya mengayau dalam konflik dengan orang Madura, Marang mengatakan :

“orang Madura telah melanggar sumpah perdamaian yang dilakukan secara adat, lepas dari jeratan hukum atau mendapat hukuman yang ringan dibandingkan dengan tingkat kesalahannya. Upacara adat tersebut diantaranya adalah *menetes hinting ambun rutas* yaitu upacara ritual untuk mensucikan dari *pali* (pantangan) yang dapat menimbulkan malapetaka dan ketidakberuntungan akibat terjadinya kematian yang tidak wajar seperti mati berdarah akibat pembunuhan. Terhadap kematian yang tidak wajar ini selalu diingat dan menjadi peringatan kepada masyarakat Dayak, karena *Sandung* tempat penyimpanan tulang belulanganya hanya ditopang oleh satu tiang dan berbeda dengan sandung kematian wajar dengan empat tiang.”

Pada penjelasan Dewin Marang ini, terjadinya konflik etnis di Sampit ini adalah akibat proses peminggiran dan perampasan hak-hak orang Dayak serta pelanggaran perdamaian yang dilakukan secara adat Dayak. Sebagai kelompok masyarakat yang terpinggir, bentuk-bentuk perlawanan selalu terkait dengan budaya etnis yang bersangkutan, salah satunya adalah budaya mengayau (*beheading*).

Pada sisi lain, Esra Pahan melihat orang Madura sebagai orang yang *belum dia bahadat*, yaitu melanggar adat yang berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan alam yang kami yakini sebagai perwujudan dari penghormatan kepada roh leluhur dan Sang pencipta. Oleh karena itu, sebagai penduduk pendatang seharusnya mematuhi adat *belum bahadat* dari tuang rumah (*host*) dan ikut memelihara keseimbangan lingkungan alam seperti yang diamanatkan oleh leluhur "*ingat peteh tatu hiang akan petak danum kalunen*" ingat pesan leluhur untuk manusia penghuni alam. Terganggunya keseimbangan lingkungan alam ini, telah menimbulkan tindakan mengayau yang seperti penjelasan Pahan sebagai berikut :

"Tindakan mengayau adalah bagian dari perintah roh leluhur untuk mengembalikan manusia kepada kehidupan *belum bahadat* dan mengembalikan kehormatan orang Dayak yang tertindas akibat proses pembangunan yang telah menghancurkan tatanan adat dan tradisi orang Dayak. Salah satunya adalah institusi *Kadamangan* yang berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan hukum adat, termasuk pelanggaran adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat seperti memabat hutan *pahewan*, yaitu hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat karena tempat tersebut merupakan hunian roh-roh leluhur. Kondisi ini merupakan gangguan terhadap roh-roh leluhur atau *mampisik roh tatu hiang*, mengusik kehidupan roh leluhur sehingga membangkitkan mereka untuk mengembalikan keseimbangan alam.

Pejelasan Pahan ini mempertegas keterlibatan roh leluhur untuk mengembalikan kehidupan manusia pada tatanan adat *belum bahadat*, sebagai perwujudan keseimbangan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia

dengan alam. Kebangkitan roh-roh leluhur yang disebut sebagai *mampisik roh tatu Hiang*, adalah bagian dari tindakan mengayau yang menggunakan manusia sebagai media untuk mensucikan kembali lingkungan alam dan mengusir roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia.

Fedlik Aser menyoroti konflik etnis di Sampit sebagai akibat kebijakan publik yang menjauhkan masyarakat Dayak dari akses ekonomi dan politik. Dia mengatakan sebagai berikut :

“ Kebijakan publik yang diberlakukan dalam masyarakat yang pluralis ternyata telah menimbulkan diskriminasi dan proses pembodohan terhadap etnis Dayak. Kebijakan publik ini dianggap sebagai produk dari pemerintah, pengusaha HPH yang didukung oleh militer, sehingga konflik dan kekerasan yang dilakukan dengan cara mengayau itu, merupakan cara untuk melakukan perubahan dalam struktur yang telah melakukan proses pembodohan dan diskriminasi yang merugikan kelompok masyarakat Dayak. Kelompok Masyarakat Madura adalah bagian dari kebijakan publik, karena mereka adalah orang-orang yang diuntungkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, tindakan kekerasan yang sudah melekat dalam diri orang-orang Madura, tidak dapat dihilangkan dengan cara-cara diplomasi dan dialog, sehingga ditempuh cara *hatejep*, yaitu cara-cara kekerasan dengan menggunakan senjata untuk menyelesaikan masalah”

Penjelasan Aser ini, menempatkan negara dalam bentuk aliansi antara pemerintah, pengusaha dan militer sebagai pelaku tindakan kekerasan, karena secara struktural telah menjauhkan masyarakat Dayak dari akses politik dan ekonomi sehingga terjadi diskriminasi dan pembodohan yang menyebabkan kesenjangan sosial dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara ini, melekat pula pada kelompok masyarakat Madura dalam bentuk penguasaan sumberdaya ekonomi dan menyingkirkan masyarakat Dayak dari ruang publik. Oleh karena itu, tindakan mengayau merupakan tindakan yang bertujuan

untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.

Menyikapi mengenai keberhasilan orang Madura di Sampit, During menyebutkan bahwa orang Dayak tidak pernah mempersoalkan atas keberhasilan mereka dalam bidang ekonomi, karena memang mereka adalah pekerja ulet dan rajin, sehingga wajar kalau mereka menerima hasil kerja kerasnya. Masalah kami dengan orang-orang Madura adalah akibat perilaku yang kasar dan sangat berbeda dengan penduduk pendatang lainnya. Jika terjadi perkelahian dengan orang Dayak, orang-orang Madura lainnya ikut membantu atau melindungi untuk melarikan diri dan tidak ada upaya dari pihak keamanan untuk segera menyelesaikannya.

Berkaitan dengan tindakan-tindakan anarkis oleh warga Madura seperti kasar, menyelesaikan perselisihan melalui kekerasan (pembunuhan), merampok, dan mencuri, dikatakan oleh During sebagai berikut :

“Tindakan kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran adat serta hak-hak masyarakat Dayak yang dilakukan oleh orang Madura merupakan peringatan terakhir, dan sanksinya mereka harus meninggalkan tanah Dayak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Madura terhadap orang-orang Dayak, telah menimbulkan kemarahan yang mendalam yang merka sebut dengan *kasingi ji mambatu tuntang tahi manyarena* (kemarahan yang membatu dan sudah lama dipendam). Puncak kemarahan masyarakat Dayak tersebut adalah ketika mendapat informasi bahwa Sampit telah dikuasai oleh orang-orang Madura, mengejek tokoh-tokoh Dayak dan menjadikan Sampit sebagai Sampang ke Dua. Sebagai orang Dayak, kami berkewajiban membela *utus* (hargadiri) dan tanggung jawab kami terhadap leluhur yang telah mendorong kami untuk *mambaleh* (melakukan perlawanan) dengan mengayau (pemenggala kepala) yang dibuktikan dengan *kaare takuluk* (banyaknya kepala) sebagai bukti kepada masyarakat luas dan leluhur bahwa orang-orang Dayak telah melaksanakan tugas dan kewajiban seperti yang diamanatkan oleh leluhur”

Pejelasan During di atas, menyebutkan bahwa terjadinya konflik etnis di Sampit adalah akibat meningkatnya intensitas kekecewaan masyarakat Dayak terhadap warga Madura. Pada sisi lain, terdapat informasi yang dianggap mengganggu harga diri (*utus*), sehingga kekerasan merupakan upaya memulihkan harga diri orang-orang Dayak.

KMA.M. Usop, mengatakan bahwa konflik etnis di Sampit ini merupakan solidaritas orang Dayak dalam membela *utus* (harga diri) orang Dayak dengan melibatkan roh-roh leluhur. Lebih jauh, Usop mengatakan :

“ Terjadinya konflik tersebut merupakan akumulasi kekecewaan warga masyarakat terhadap kelompok etnis Madura yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat Dayak yang berpegang pada nilai *belum bahadat* dan pelanggaran terhadap *utus* (harga diri) orang Dayak. Sebagai orang Dayak yang dilecehkan harga dirinya, maka muncul solidaritas dan gerakan spontanitas untuk melawan kelompok etnis Madura dengan melibatkan roh-roh leluhur untuk memulihkan ketentraman di bumi Isen Mulang“.

Menurut Usop, dalam mempertahankan kota Sampit, kelompok etnis Madura mendatangkan preman-preman dari Madura untuk berperang melawan warga Dayak. Umumnya mereka tidak mengenal orang Dayak, sehingga setiap orang yang bukan Madura ditanya asal-usulnya dengan ancaman carok dileher dan berteriak mana tokoh Dayak. Preman lainnya siap dengan jerigen berisi bensin dan menakuti penduduk seolah-olah kota Sampit akan dibakar. Berita mengenai penguasaan kota Sampit dan sikap arogansi warga Madura yang dianggap telah melanggar *utus* (harga diri) telah membangkitkan solidaritas komunitas masyarakat DAS Katingan, DAS Seruyan dan DAS Mentaya untuk berperang melawan kelompok etnis Madura.

Pada saat penyerbuan terhadap kelompok etnis Madura, kelompok masyarakat Dayak yang berasal dari DAS Katingan, Seruyan dan Mentaya telah didukung pula oleh kelompok etnis lainnya, termasuk dari kelompok etnis Banjar, Bugis, Jawa dan kelompok warga Cina yang khusus menyumbang bahan makanan bagi pasukan Dayak.

Selain itu, terdapat pula kelompok ibu-ibu yang secara spontanitas menyiapkan bahan makanan bagi kelompok masyarakat Dayak. Ketika itu, terdengar teriakan-teriakan *melahap* yang diikuti dengan *menawur behas*, yaitu teriakan-teriakan ritual sambil menaburkan beras dengan tujuan untuk melibatkan roh-roh leluhur yang dapat menambah *hambaruan* (kekuatan) bagi kelompok Dayak dan melemahkan semangat kelompok Madura. Dengan pelibatan roh-roh leluhur ini, seorang komandan pasukan dapat mengetahui tempat-tempat persembunyian orang-orang Madura dan memenggal kepala musuh seperti peristiwa *mengayau* (pemenggalan kepala) yang terjadi pada seratus tahun yang lalu.

Pandangan orang Dayak terhadap orang Madura yang menjadikan kota Sampit sebagai "Sampang Kedua" merupakan pelanggaran adat *belum bahadat*. Pelanggaran ini bagi orang Dayak disebut sebagai *pali atau rutas* (pantangan) yang dapat menyebabkan *indu kacicas harian andau* (mendapat kutukan dalam penghidupan); *tau papaparesan imbah gawi* (mendapat sakit atau kesengsaraan); *tau pamparesan akan pabelom harian* (mendapat kesusahan dimasa yang akan datang). Untuk menghilangkan pengaruh pali tersebut harus dilakukan upacara *mapas nantulak ambun rutas matei* atau upacara *manyadingen petak danum*, yaitu mensucikan kembali kehidupan di bumi sehingga diperoleh kesejahteraan bagi umat manusia.

Pandangan yang negatif terhadap warga Madura berhubungan dengan kebiasaan membawa senjata tajam dan seringnya terjadi konflik dan kekerasan dengan orang-orang Dayak. Interaksi orang Dayak dan Orang Madura ini diperburuk oleh kebiasaan orang Madura untuk menguasai tanah hak orang Dayak yang sebelumnya dalam status peminjaman atau tanah kosong milik orang lain yang ditebas dan diakui sebagai

miliknya Selain itu, meningkatnya tindakan kriminal yang terjadi di Sampit, dianggap oleh masyarakat Dayak sebagai perbuatan orang-orang Madura.

Pengalaman kontak etnis dengan warga Madura ini telah menimbulkan respon dari warga Dayak bahwa orang Madura dianggap telah melanggar *belum bahadat*, yaitu ketidakmampuan mereka menyesuaikan diri dengan adat di mana mereka berada. Pelanggaran terhadap *belum bahadat* ini biasanya mereka sebut dengan *belum dia bahadat* (hidup tidak beradat). Sebutan *belum dia bahadat* ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Madura, tetapi kepada siapa saja yang melanggar adat, seperti perkelahian pada saat berlangsungnya upacara tiwah.

Pada sisi lain, masyarakat Madura juga dianggap sering melanggar sumpah perdamaian ketika terjadi konflik antara warga Dayak dengan warga Madura. Salah satu adalah konflik yang terjadi pada tahun 1983 di Bukit Batu, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada kejadian tersebut, seorang warga Dayak mati terbunuh dikeroyok oleh 30 orang warga Madura. Terhadap pembunuhan tersebut dilakukan upacara adat perdamaian dengan upacara *tiwah* yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan. Upacara tersebut dilanjutkan dengan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya menyatakan bahwa apabila orang Madura mengulangi perbuatannya, mereka siap keluar dari Tanah Dayak.

Konflik dan kekerasan etnis yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di Sampit dipandang masyarakat Dayak sebagai pelanggaran terhadap batas-batas fisik (*physical boundaries*) dan pelanggaran batas-batas budaya (*cultural boundaries*).

Konflik dan kekerasan sebagai pelanggaran batas-batas fisik memosisikan penduduk lokal sebagai pemilik wilayah dan tuan rumah (*host*) terhadap penduduk pendatang. Oleh karena itu, slogan yang ingin menjadikan kota Sampit sebagai

”Sampang Kedua” dianggap oleh masyarakat Dayak sebagai pelanggaran nilai budaya *belum bahadat*.

Bagi masyarakat Dayak di Sampit, *lewo habaring hurung* yang semula dipahami sebagai interaksi sosial yang mengisyaratkan adanya hubungan timbal balik (*reciprocal*), saling menguntungkan dan persamaan (*inclusive*) tanpa adanya penonjolan oleh etnis tertentu, telah berkembang menjadi kepemilikan wilayah fisik. Demikian juga, hubungan antara etnis lokal dan etnis pendatang yang didasarkan pada prinsip *belum bahadat* dan implementasi dari budaya *betang* yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam kehidupan masyarakat plural (*plural society*), telah dilanggar oleh kelompok etnis Madura sehingga menguatkan nilai budaya *belum bahadat* sebagai standar terpeliharanya integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan menghormati orang Dayak sebagai tuan rumah (*host*) dan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan membela *utus* (identitas) Dayak, dalam kehidupan masyarakat plural.

Belom bahadat yang dipahami sebagai *pambelom* (pedoman hidup) dan *utus* (identitas) orang Dayak telah menjadi sangat sakral ketika pelanggaran pada batas-batas wilayah fisik (*physical boundaries*) dan batas-batas budaya (*cultural boundaries*) oleh etnis Madura dianggap sebagai “pali” yang akan mengganggu seluruh kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang (Tjilik Riwut, 1979), maka jalan yang ditempuh adalah jalan *baputi* (jalan damai) atau *jalan bahandang* (perang). Melalui pelibatan roh-roh leluhur dalam upacara *manajah antang* untuk memutuskan jalan yang terbaik bagi orang Dayak, diberi petunjuk bahwa jalan yang ditempuh adalah *mambaleh bunu* (perang) melawan etnis Madura.

Manyalamat utus tersebut dipahami sebagai : *pertama*, memulihkan harga diri orang Dayak karena terganggunya martabat orang Dayak akibat penguasaan kota Sampit, *bumi habaring hurung* (kebersamaan) dan sikap arogan yang merendahkan martabat orang Dayak. *Kedua*, terganggunya kehidupan roh-roh leluhur yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat Dayak pada masa yang akan datang. *Ketiga*, memulihkan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat Dayak yang pluralis dengan prinsip *belum bahadat*, "dimana bumi dipijak di situ langit di junjung".

3.4. Respons Masyarakat Madura Terhadap Konflik Etnis

Bagi orang-orang Madura tanah Sampit sebagai kampung halaman mereka, karena sudah lama menetap di Sampit dan sebagian dari mereka adalah kelahiran Sampit. Di Sampit, mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, tanah di Sampit sangat berarti bagi kehidupan warga Madura asal Sampit, bahkan dapat dikategorikan sangat sakral, karena rata-rata bangunan rumah orang-orang Madura di Sampit sudah bersifat permanen dan diperoleh dengan kerja keras dan pengorbanan. Berikut ini, tanggapan dari beberapa orang warga Madura :

Muh. Nur, mantan Gubernur Jawa Timur mengatakan :

“ Tindakan orang-orang Dayak tersebut sebagai tindakan biadab yang tidak berperikemanusiaan. Orang-orang Madura yang mengungsi kebanyakan sudah tidak memiliki sanak keluarga lagi di Madura, karena sudah lama meninggalkan kampung halamannya. Selain itu, mereka adalah pekerja yang keras dan ulet serta ikut mendorong kemajuan pembangunan di Sampit. Oleh karena itu, mereka mempunyai hak untuk tinggal di Sampit dan harus dikembalikan ke tempat pemukiman mereka semula. (Kalteng Pos, 12 april 2001) “

Ketua Ikatan Keluarga Madura, H. Marlinggih mengatakan :

“ Sampit juga tanah leluhur orang Madura karena mereka sudah ada di Sampit sebelum pendudukan Belanda. Oleh karena itu, wajar saja

kalau kami juga ikut memajukan pembangunan di Sampit bersama-sama dengan orang Dayak dan penduduk pendatang lainnya. Di Sampit ini, kami bekerja keras untuk mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi orang-orang Madura. Kekerasan di Sampit menurut saya adalah akibat pertarungan pada tingkat elit politik untuk merebut jabatan-jabatan strategi seperti jabatan gubernur, bupati, eselon satu dan dua. Mereka itu masing-masing mencari dukungan dari kelompok etnis atau agama dan kalau kelompok yang tidak terpilih menjadi kecewa dan marah-marah. Atas tragedi Sampit, saya menganggapnya sebagai musibah, dan tidak mendendam terhadap orang Dayak dan berharap agar aset orang Madura di Sampit tetap terjamin dan mereka dapat kembali ke Sampit. Tuduhan bahwa kami ingin menguasai Sampit adalah tidak benar, karena sebelumnya kami tidak ada masalah dengan orang Dayak bahkan banyak orang Madura yang telah kawin dengan orang Dayak. Mengenai perkelahian antara orang Dayak dengan orang Madura, sebagai ketua IKAMA tidak pernah saya melindungi orang Madura, tetapi merupakan urusan mereka kalau ada orang Madura yang melindungi atau ikut mengeroyok orang Dayak. (Tabloid Borneo, 20 April 2001)”

Tumi, warga Madura menyebutkan bahwa dia tidak tahu-menahu kalau ada gerakan massa Madura untuk melawan orang-orang Dayak. Pada waktu itu (18 Pebruari 2001) mereka semuanya diperintahkan untuk keluar rumah dengan membawa clurit karena mendapat informasi bahwa orang-orang Dayak akan menyerang mereka. Pada waktu itu memang ada sekelompok orang Madura yang berteriak mana orang Dayak, karena mereka tidak tahu mana orang Dayak dan yang bukan orang Dayak, sehingga orang-orang yang bukan Madura diancam dan ditanya apakah mereka orang Dayak atau bukan. Kami tidak percaya kalau orang Dayak akan menyerang kami, karena selama kami tinggal di Sampit tidak pernah terdengar mereka membuat kerusuhan dengan kami, sehingga tragedi Sampit ini merupakan trauma bagi kami, karena banyak anak-anak dan orang-orang Madura yang tidak tahu-menahu terbunuh dengan kepala putus. Kami pun sangat sedih sekali karena tempat tinggal, pekerjaan dan harta yang kami kumpulkan dengan susah payah musnah dalam seketika. Di Sampang kami sudah tidak memiliki keluarga lagi, sehingga kami berharap dapat kembali ke Sampit.

H. Abdul Wahid (42 Thn), mengatakan bahwa sebagai orang Madura kelahiran Sampit, sekecil apapun tidak ada keinginan untuk menjadikan Sampit sebagai Sampang Kedua, walaupun diakui bahwa sebagian besar orang Madura di Sampit berasal dari Sampang. Selain itu, sebagai umat beragama tidak ada ajaran yang mendorong saya untuk memusuhi apalagi menguasai wilayah yang saya tahu bukan merupakan asal-usul wilayah kami. Pernyataan H. Marlingih selaku ketua IKAMA dan anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sangatlah wajar untuk mencegah meluasnya konflik Sambas ke Sampit dengan mengatakan "Sampit jangan sampai menjadi Sambas Kedua". Pernyataan ini dapat saja dipelesetkan menjadi "Sampang Kedua".

Sebagai warga Madura kelahiran Sampit, dia juga menghargai apa yang disebut dengan *belum bahadat*, karena ini sesuai dengan ajaran orang Madura yang disebut dengan *rampak naung, beringin korang* (hidup rukun dan damai) yang berarti menghargai dan menghormati nilai-nilai budaya lokal.

Wahid menyebutkan bahwa konflik antara Dayak dan Madura sebenarnya bersumber dari politik di tingkat elit lokal, yaitu terjadinya perubahan pola kepemimpinan dari model Orde Baru yang menempatkan bupati berdasarkan *dropping* dari pusat, khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur biasanya dari kalangan kepolisian, tetapi setelah kepemimpinan diserahkan kepada orang lokal, terjadi ketidakseimbangan dari sisi jabatan antara pejabat dari kalangan Islam dan non Islam, seperti jabatan wakil Bupati dan Sekretaris daerah dijabat oleh pejabat yang dari kalangan Islam. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kelompok yang non muslim, sehingga mendorong munculnya konflik agama yang terselubung dan orang-orang Madura yang mayoritas dari sisi jumlah dan agama Islam dianggap memberikan andil untuk menciptakan ketidakadilan tersebut.

Pada sisi lain, terlihat pula peningkatan jumlah orang Madura setelah dibukanya pelayaran kapal Krakatau sejak tahun 1995 dari Sampit-Semarang dan Sampit-Surabaya. Besarnya jumlah orang Madura di Sampit ini sangat berpengaruh terhadap peta politik, sehingga orang-orang Madura dapat dimobilisasi untuk kekuatan politik yang akan menguntungkan partai-partai politik Islam khususnya PKB dan PPP.

Di tingkat horizontal, mereka dituduh menguasai sektor ekonomi di Sampit. Padahal selain orang Madura terdapat orang Banjar dan orang Cina. Tuduhan lain juga menyebutkan bahwa orang Madura sebagai warga yang memiliki pemukiman yang eksklusif dan hanya bekerjasama dengan sesama orang Madura. Menurut Wahid, pemukiman eksklusif itu adalah sesuatu yang wajar saja, karena sebelum mendapat pekerjaan mereka berkumpul di rumah-rumah orang Madura lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka sudah mapan, mereka selalu mencari rumah yang terdekat dengan sesama warga Madura, sama halnya seperti orang Dayak yang kebanyakan bermukim di pinggir sungai. Sedangkan kerjasama di kalangan orang Madura ini biasanya dilakukan terkait dengan pengajian yang diikuti dengan arisan. Seperti sekarang ini mereka buka arisan untuk membangun rumah, karena bangunan yang ditinggalkan kebanyakan sudah rusak.

Terkait dengan konflik etnis yang sudah terjadi, dia menganggapnya sebagai musibah yang harus diambil hikmahnya dan tidak menganggapnya sebagai dendam seperti ungkapan *Angoan poteya tolang etembang poteya mata* (lebih baik mati dari pada menanggung malu). Dalam hal ini yang penting bagi mereka adalah dapat pulang ke Sampit dan bekerja tanpa mendapat gangguan lagi.

Sjahriansyah (37 thn) mengatakan bahwa sebelum terjadinya konflik etnis, sudah ada pemberitahuan dari aparat kepolisian yang menyebutkan bahwa orang Dayak

akan menyerang orang Madura. Karena dia merasa tidak ada permusuhan dengan orang Dayak, maka perintah untuk mengungsi tidak diindahkannya. Namun setelah diketahui bahwa orang tuanya tewas dengan kepala terpotong, baru dia percaya dan dengan sangat terpaksa ikut mengungsi meninggalkan rumah dan harta benda di Sampit.

Mengenai isu Sampang Kedua yang dijadikan dasar bagi orang Dayak marah kepada orang Madura, dengan menggunakan bahasa Banjar, dia mengatakan *ngaramput* (dusta), itu rekayasa yang memojokan orang-orang Madura. Tidak ada gejala-gejala yang nampak bahwa ada rencana orang-orang Madura untuk menjadikan Sampit sebagai "Sampang Kedua".

Bagi orang Madura bekerja keras untuk mendapatkan nafkah sehari-hari dan mempunyai rumah adalah penting untuk menjadi orang yang merdeka, karena sebelumnya menumpang dengan sesama orang Madura dan menjadi orang yang tergantung dengan orang lain. Sjahriansyah mengatakan bahwa :

“ Kerja keras dan pengorbanan yang telah kami lakukan untuk menjadikan kami sebagai orang yang merdeka, telah memberikan keyakinan kami bahwa tanah dan rumah yang sudah dimiliki, menjadi sakral bagi kami dan wajar saja kalau kami mempertahankannya.”

Sebagian besar penduduk Madura di Sampit adalah pekerja buruh kasar, penjual sayur dan buah-buahan. Kerja keras dan kebiasaan mengumpulkan uang melalui arisan dengan sesama orang Madura pada saat kumpul warga dalam acara pengajian, telah memberikan kemampuan untuk membangun rumah yang layak bagi kehidupan keluarga mereka. Sjahriansyah menyebutkan bahwa tidak benar kalau dikatakan orang Madura telah menguasai perekonomian di Sampit, karena kebanyakan dari warga Madura adalah buruh, pedagang sayur dan buah-buahan, dan petani.

Diakuinya bahwa meningkatnya jumlah penduduk Madura Ke Sampit pada tahun 1990, telah mengubah kehidupan masyarakat Madura di Sampit dengan berbagai

masalah seperti benturan dengan orang Dayak dan etnis lainnya dan persaingan secara kurang sehat dalam usaha mencari nafkah. Benturan-benturan ini tidak dapat diselesaikan secara adil dan tuntas oleh pihak keamanan sehingga dendam dan sakit hati yang berkepanjangan dari orang-orang Dayak.

Martijo (48 Thn) mengatakan bahwa pada awalnya dia ikut teman dan tinggal bersama-sama dengan temannya tersebut. Setelah agak mampu, dia tinggal di barak dan secara perlahan-lahan membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Sebelum konflik etnis di Sampit, hidup sebagai buruh sudah cukup untuk menghidupi 5 orang anak dan istri serta membangun rumah yang layak. Sebagai buruh, sebenarnya dia disenangi oleh orang-orang Banjar dan Cina yang memerlukan tenaga mereka, karena kemampuan kerja orang-orang Madura jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja dari etnis lain, misalnya dibandingkan dengan orang Banjar. Selain itu, Martijo juga dapat melakukan tambahan pendapatan dengan menyalurkan beras ke toko-toko dengan harga yang sama dengan grosir.

Terkait dengan penghinaan terhadap orang Dayak sehingga menimbulkan konflik etnis di Sampit, Martijo mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah membayangkan dapat menyebabkan kemarahan orang Dayak dan tiba-tiba saja mereka disuruh mengungsi dengan meninggalkan rumah dan harta benda yang telah mereka peroleh dengan susah payah. Keadaan seperti ini dia sebut sebagai orang yang tidak makan buah nangka, tetapi terkena getahnya.

Belom bahadat seperti yang selalu dipakai untuk menyudutkan warga Madura sebagai orang yang tidak beradat, juga dirasakan oleh Martijo tidak beralasan karena mereka sudah lama berada di Sampit dan selama itu tidak pernah bermasalah dengan orang Dayak. Dia mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada pembinaan mengenai

hidup rukun dan saling menghargai, namun secara pribadi tidak pernah ada permusuhan dengan orang Dayak dan menurutnya, ada orang-orang yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan politik, misalnya mendukung calon bupati.

Lorat (55 Thn) mengatakan bahwa dia sudah tiga puluh tahun tinggal di Sampit dan hidup sebagai petani. Sebagai orang bawah, dia tidak tahu dan tidak mengerti mengapa terjadinya konflik etnis di Sampit. Kasihan kami orang bawahan ini yang terkena malapetaka akibat perbuatan orang lain, sehingga menyebabkan kami harus meninggalkan tanah pertanian yang merupakan sumber penghasilan bagi kehidupan kami.

Selama di pengungsian di Sampang dia merasa telah menjadi orang asing, karena mereka dianggap menjadi beban dan akan menambah kesulitan hidup mereka. Oleh karena itu apapun yang terjadi, mereka harus kembali ke Sampit yang sudah dianggap sebagai kampung halaman sendiri.

Lorat mengatakan bahwa konflik etnis tersebut bukan antara orang Dayak dengan orang Madura yang sudah lama tinggal di Sampit, tetapi dengan penduduk Madura yang baru datang yang belum banyak mengenal orang Dayak. Mereka itu, menurut Lorat ingin cepat-cepat mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah tanpa harus kerja keras, seperti preman-preman itu.

Pemahaman orang Madura terhadap konflik etnis di Sampit, merupakan fakta sosial yang dialami mereka, sehingga membentuk realitas objektif bahwa konflik tersebut sebagai musibah yang harus menjadi pelajaran bagi semua pihak dan upaya-upaya untuk memulihkan kerukunan dan keamanan agar mereka dapat kembali dan berusaha di Sampit.

Selain itu terdapat pemahaman bersama (*intersubjective*) sebagai hasil proses internalisasi yang membentuk realitas subjektif, bahwa konflik etnis tersebut bersumber dari konflik di tingkat elite politik lokal, sebagai akibat perubahan pola kepemimpinan dari model perimbangan antara pejabat yang beragama Islam dan non muslim menjadi pola Islamisasi yang menyingkirkan kelompok non muslim. Perubahan pola kepemimpinan ini, memberikan pemahaman dari kelompok etnis Dayak bahwa kelompok Islam di Sampit khususnya warga Madura menjadi kelompok yang strategis dan mendapat hak-hak istimewa, karena ikut memberi andil dalam proses perubahan pola kepemimpinan tersebut.

Pada sisi lain, tuduhan-tuduhan yang menyudutkan orang-orang Madura yang akan menjadikan kota Sampit sebagai Sampang Kedua, dipahami oleh mereka sebagai *ngaramput* (bohong), tidak beralasan dan suatu rekayasa yang sengaja menyingkirkan orang-orang Madura, dengan mencari pembenaran yang menyudutkan orang-orang Madura. Demikian juga dengan tuduhan yang menyebutkan bahwa orang-orang Madura yang dikatakan sebagai orang yang melanggar budaya *belum bahadat* sebagai orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan budaya Dayak di Sampit, model kehidupan yang mengelompok (*exclusive*) dan menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan.

Terhadap permasalahan di atas, mereka mengatakan bahwa mereka ini sama dengan *orang yang tidak makan buah nangka, tetapi terkena getahnya*. Pribahasa ini memberikan makna bahwa orang-orang Madura di Sampit harus dibedakan antara orang-orang yang sudah lama tinggal di Sampit dan orang-orang memang kelahiran Sampit serta orang-orang yang telah membaaur dengan Orang Dayak melalui perkawinan, dengan orang-orang Madura pendatang yang baru ke Sampit, sejak

dibukanya pelayaran Sampit-Surabaya pada tahun 1990 sehingga meningkatnya mobilitas orang-orang Madura Ke Sampit.

Orang-orang Madura di Sampit, sebagian besar bekerja sebagai buruh, petani dan pedagang kecil dengan menggunakan gerobak untuk menjual sayur, buah-buahan, dan ikan. Dengan orientasi pada kerja dan hasil ini, mereka dapat menghidupkan keluarga dan dapat membeli tanah dan rumah untuk kehidupan mereka pada masa kini dan yang akan datang. Orientasi pada kerja ini telah mendorong mereka untuk bekerja keras mengumpulkan uang melalui organisasi arisan yang dilakukan setiap malam jumat, bersamaan dengan kegiatan pengajian sesama orang Madura. Realitas kehidupan seperti ini, memberikan kesadaran bahwa dalam interaksi dengan orang lain, kerukunan dan kedamaian itu menjadi penting untuk menunjang keberlangsungan hidup mereka, seperti nilai budaya Madura yang disebut dengan *rompak naung, beringin korang* (hidup rukun dan damai, seperti berada dibawah pohon beringin).

Berdasarkan respon dari orang Dayak dan Madura atas konflik dan kekerasan etnis di Sampit, terdapat beberapa penyebab terjadinya konflik dan kekerasan tersebut, yaitu :

Pertama, hubungan antar etnis antara orang Dayak dan Madura telah merenggang akibat pengalaman konflik masa lalu yang tidak diselesaikan secara hukum formal dan pelanggaran terhadap perdamaian yang dilakukan secara adat. Merenggangnya hubungan tersebut telah meningkat menjadi permusuhan pada waktu terjadinya konflik individu antara orang Dayak dan Madura pada akhir Desember 1999 yang melibatkan organisasi masing-masing kelompok etnis dengan menguatkan identitas etnis.

Kedua, tidak adanya pengakuan atas terjadinya konflik pada Desember 2000 dan masing-masing kelompok etnik mencari pembenaran terhadap konflik tersebut. Kelompok etnis Madura menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dan kelompok etnik Dayak menyatakan bahwa konflik tersebut telah melanggar jati diri orang Dayak.

Ketiga, intensitas konflik tersebut semakin meningkat, akibat adanya kesenjangan sosial dan perlakuan istimewa terhadap kelompok etnik Madura oleh para elite politik. Pada sisi lain, tekanan ekonomi dan politik yang dialami oleh orang Dayak telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan terhadap negara.

Keempat, meningkatnya intensitas konflik akibat adanya mobilisasi kepentingan para elite politik dan meledaknya kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap negara karena munculnya kesadaran bersama mengenai marginalisasi dan isolasi politik yang mereka alami, telah mendorong terjadinya konflik etnis menjadi kekerasan kolektif.

Kelima, tidak adanya pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediasi atau arbitrase yang berfungsi menjembatani kepentingan dan perbedaan-perbedaan dari kedua kelompok etnik yang bertikai. Keadaan ini dapat meningkatkan intensitas konflik dan kekerasan.



BAB IV
MARGINALISASI DAN
ISOLASI POLITIK ORANG
DAYAK

BAB IV

MARJINALISASI DAN ISOLASI POLITIK ORANG DAYAK

4.1. Pandangan Terhadap Orang Dayak

Orang Dayak biasanya disebut berdasarkan tempat tinggal di daerah Aliran Sungai (DAS), seperti orang Kapuas, orang Katingan, orang Seruyan dan orang Barito. Mereka ini juga sering disebut dengan sebutan *uluh Ngaju*, bagi orang Dayak yang tinggal di bagian hulu sungai dan *uluh Ngawa* untuk orang yang tinggal di bagian hilir sungai. Kelompok masyarakat yang tinggal di bagian hilir sungai ini umumnya lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di bagian hulu sungai. Terhadap orang luar Dayak, mereka menyebutnya sebagai *uluh habasa* (orang yang tidak menggunakan bahasa Dayak) sehingga dalam berkomunikasi biasanya mereka menyesuaikan dengan lawan bicara dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Banjar.

Menjadi orang Dayak menurut Lewis sering diejek sebagai orang *biaju* (orang udik) yaitu orang yang berasal dari hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan orang yang tidak beragama, karena menganut kepercayaan Kaharingan yang dianggap sebagai agama *uluh helo* (orang tempo dulu). Dalam konteks ini orang sering mereproduksi informasi bahwa orang Dayak yang sudah menganut agama Islam adalah orang Melayu dan tidak dianggap lagi sebagai orang Dayak. Orang juga sering mempertanyakan apakah orang Dayak itu bisa makan orang dan hidup di hutan-hutan rimba, bahkan sering di beri merek sebagai orang bodoh dan malas bekerja karena dimanja oleh alam.

Pandangan-pandangan yang negatif terhadap orang Dayak ini menurut Lewis adalah karena kurangnya informasi dan pengetahuan orang luar mengenai kebudayaan Dayak itu sendiri. Orang Dayak di Kalimantan Tengah pada awalnya menganut

kepercayaan Kaharingan yang dekat dengan agama Hindu di Cina, terlihat dari kesamaan ras yang berasal dari Mongoloid dan simbol naga dalam kepercayaan Kaharingan. Keinginan untuk menjadikannya sebagai agama telah dirintis sejak tahun 1980 dan hasilnya adalah integrasi dengan agama Hindu Bali yang memiliki kedekatan dengan Hindu di India dengan nama agama Hindu Kaharingan.

Nama Kaharingan menurut Lewis berasal dari kata "Haring" yang artinya ada dengan sendirinya. Pada intinya agama ini percaya bahwa segala benda dan makhluk memiliki *Gana* (roh), dan hanya ada satu Tuhan yaitu Ranying Hatala Langit yang menciptakan segala isi alam semesta seperti tercantum dalam tutur Balian : *I Nayaho hai mamparijet tungkupah, kilat panjang mampa nyaho hai ruang* (Guntur/suara agung membuka kuasanya, kilat panjang menggerakkan ruang). Asal usul penciptaan manusia dan alam semesta digambarkan dengan simbol *Batang Garing* (pohon kehidupan) yang didalamnya terdapat burung *tingang* (enggang) sebagai simbol penguasa dunia atas dan *tambun* (naga) sebagai simbol penguasa dunia bawah. Sekarang ini, simbol Batang garing dipahami oleh masyarakat Dayak sebagai keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan keseimbangan hubungan antar manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari Lewis menuturkan :

“ Umat Kaharingan percaya kepada makhluk-mahluk Ilahi yang berkuasa dan bertugas membantu keselamatan manusia, memberi rezeki dan menyebarkan penyakit, dan lain-lain yang tersebar di air (sungai, danau dan laut), gunung, hutan, tanaman dan tempat-tempat tertentu. Bagi pemeluk Kaharingan, makhluk-mahluk Ilahi itu sangat berpengaruh dalam menentukan kehidupan manusia. Keberuntungan dan kemalangan hidup, bencana alam, kecelakaan terjadi karena tindakan mereka, walaupun penyebabnya munculnya tindakan itu akibat perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, wujud tertinggi dalam praktek Agama Hindu Kaharingan adalah mematuhi adat, yaitu tidak melanggar *pali* (pantangan) dan melaksanakan upacara keagamaan yang meliputi *gawi belom* (upacara kehidupan) dan *gawi matei* (upacara kematian). “

Beberapa ajaran Kaharingan, menurut Lewis sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan menghindari perpecahan dalam kehidupan masyarakat seperti pada ajaran berikut ini :

- *Hatangku manggeto bunu, kangkalu penang manguin betang* (bersatu memenangkan peperangan, bersatu membangun kembali kehidupan).
- *Penyang ketun hinje simpei, paturung humba tamburak. Te ketun belom panju-panjung, tau sanag-ureh ngalawan kilau bulan matan andau, tanggeren lewu mandereh danum* (Bersatulah kamu dengan seluruh kekuatan, dengan satu pedoman; kamu akan hidup bahagia sejahtera seperti bulan matahari dan bintang di langit sebagai contoh teladan).
- *Amun keton penyang pangarak simpei, te ketun akan gandang tatah lewu mandereh danum, amun paturung bakuhas tamburak, akan gandang rundung hapamantai tambun* (kalau terjadi perpecahan, engkau akan diejek dan dihina oleh orang lain. Supaya dunia ini damai sejahtera hidup di dunia dan dunia lain/lewu tatau, manusia harus memiliki *jalan belom*/pedoman hidup, yaitu *haring hatungku tungket langit* (ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan)

Dalam pemanfaatan sumberdaya alam telah terjadi pula tekanan-tekanan terhadap orang Dayak. Hendrick membantah bahwa orang Dayak yang bertani dengan cara ladang berpindah (*shifting cultivation*) dengan sistem tebang bakar, (*slash and burn*) dianggap sebagai sistem pertanian tradisional yang merusak hutan dan sumber kebakaran hutan, sehingga dianjurkan untuk melakukan pertanian menetap dengan penggunaan pupuk dan obat-obatan. Pada sisi lain, perusahaan HPH yang melakukan eksploitasi sumberdaya hutan telah menghambat rotasi perladangan yang berfungsi untuk menyuburkan kembali lahan yang sudah ditinggalkan oleh peladang. Tuduhan

atas kerusakan lingkungan harusnya di alamatkan kepada pemegangan HPH, karena pembabatan hutan yang dilakukan tidak sebanding dengan upaya pemulihan lingkungan melalui penanaman kembali.

Berkaitan dengan eksploitasi sumberdaya hutan oleh HPH, Hendrick mengatakan :

“ Telah terjadi pula pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, seperti pelanggaran tanah adat dan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat. Kondisi ini telah menimbulkan sengketa antara masyarakat dengan pemilik HPH dan kami terpaksa mengerahkan massa untuk menghentikan penebangan agar pihak HPH mengganti rugi atas pelanggaran tanah adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah kami dan melakukan upacara ritual adat untuk mensucikan kembali lingkungan alam yang telah terganggu. Pelanggaran yang kami anggap sangat mengganggu kehidupan kami pada masa yang akan datang adalah pelanggaran terhadap tempat-tempat keramat, karena kami percaya bahwa disana bersemayam roh-roh leluhur yang harus kami hormati agar kami tidak melanggar *pali* (pantangan) yang dapat meyengsarakan kehidupan kami, seperti kematian dan serangan penyakit. Khususnya tempat keramat *Pahewan*, yaitu suatu tempat yang terdapat kayu-kayu yang besar dan hutan yang rimbun merupakan areal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk penduduk desa setempat dan kami harus bertanggung jawab untuk menjaganya untuk menghindari kami dari malapetaka kalau tempat keramat tersebut terganggu. “

Beberapa landasan yuridis yang berkaitan dengan adat, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatur pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan bagi kepentingan masyarakat adat, termasuk menghindari pelanggaran tempat-tempat keramat adalah : *pertama*, pada pasal 18 butir 2 UUD 1945 setelah Amandemen tahun 2000 dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, pasal 67 Undang-Undang No.41 Tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa (1) masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan

diakui keberadaan haknya : a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, c) mendapat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. *Ketiga*, Perda Propinsi Kalimantan Tengah No.14 tahun 1998 Tentang Kedamaian, memuat penjelasan dan pengakuan mengenai (1) tanah adat, hukum adat dan wilayah adat, (2) institusi adat, meliputi lembaga adat, majelis adat dan mantir adat (3) pemberdayaan masyarakat adat.

Pada ladasan yuridis di atas, Hendrick berpendapat telah terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, karena menyangkut kontrol masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan, sehingga akan mengurangi aliansi antara birokrasi pemerintah dengan pengusaha HPH yang selama ini cenderung melindungi pihak pengusaha dan menekan masyarakat agar tidak mengganggu kelancaran eksploitasi hutan. Ketergantungan pemerintah dengan pengusaha HPH ini sangat besar sekali, mengingat hasil hutan masih merupakan sumber pendapatan daerah yang terbesar bagi pembangunan dan kepentingan birokrat. Berkaitan dengan keberadaan HPH ini, Hendrick mengatakan :

“ Kehadiran HPH di wilayah kami tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, malah sebaliknya hilangnya mata pencaharian kami yang terkait dengan hutan, seperti hasil dari kayu tengkawang, damar, rotan, kayu ulin dan terganggunya rotasi perladangan. Seharusnya kami menerima langsung bagian dari hasil penjualan per kubik kayu untuk kami kelola sendiri bagi pembangunan desa, bukan pengaturan oleh HPH melalui program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan ini, kami berharap agar diberi kewenangan untuk ikut mengontrol pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah kami. “

Hasil Musyawarah Besar Damang Kepala adat Se Kalimantan Tengah yang

diselenggarakan pada tanggal 23-24 Mei 2002 di Palangka Raya, telah merumuskan beberapa pokok pemikiran, yaitu : *Pertama*, selama ini kurangnya penghargaan terhadap adat dan hukum adat masyarakat Dayak, sehingga diperlukan upaya revitalisasi hukum adat. Upaya ini berkaitan dengan eksistensi lembaga Kedamaian sebagai lembaga adat yang telah dikenal khususnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Peran para Demang selaku Kepala adat dalam membina dan mengembangkan hukum adat masyarakat Dayak pada masa lalu cukup penting, namun karena proses sosial yang berlangsung selama ini, perannya lebih banyak pada hal-hal yang bersifat seremonial. *Kedua*, terjadinya keterpinggiran masyarakat adat sebagai akibat proses modernisasi yang kurang berkelanjutan sementara pengembangan daya tahan masyarakat belum cukup kuat mengintegrasikannya dalam suatu bingkai jatidiri yang tetap berlandaskan nilai-nilai adat yang relevan pada masa kini. *Ketiga*, dalam era demokratisasi, reformasi dan otonomi daerah telah muncul aspirasi masyarakat yang kian kuat untuk pemberdayaan diri secara berkelanjutan. *Keempat*, masih ada nilai-nilai adat yang relevan dan dapat membantu memperlancar proses pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup serta proses pembangunan pada umumnya.

Pada beberapa pertemuan Musyawarah Adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) pada tahun 2004 Menyebutkan bahwa peranan Hakim Adat atau Mantir Adat sangat penting dalam menegakkan hukum Adat yang berlandaskan pada prinsip perdamaian dan integrasi keduabelah pihak yang bertikai. Dalam penyelesaian kasus adat, tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Keduabelah pihak akan mencapai suatu kesepakatan (*hapakat*) yang akan diperkuat dengan upacara ritual adat

untuk memulihkan hubungan atau mensucikan kembali tempat keramat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Musyawarah Adat menyimpulkan bahwa hukum adat di Kalimantan Tengah baru sampai pada tingkat diakui, tetapi belum dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara legal oleh pemerintah sehingga keputusannya belum dianggap sah secara hukum. Karena itu, Musyawarah Adat tersebut merekomendasikan perlunya Perda mengenai Hukum Adat dan Kelembaga adat yang didahului dengan penelitian-penelitian, lokakarya dan pembentukan Kelompok Kerja untuk menyusun Rancangan Perda mengenai adat tersebut.

Dewin Marang sangat mengkhawatirkan bahwa tekanan-tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat Dayak telah menyebabkan berkurangnya dilakukan upacara *Tiwah* yang merupakan penghormatan terhadap roh leluhur dan institusi *Tiwah* sebagai proses untuk menanamkan nilai-nilai adat dan integrasi di kalangan masyarakat Dayak. Berkurangnya penyelenggaraan upacara *Tiwah* ini menyebabkan terhambatnya sosialisasi pada penyelenggaraan upacara ritual tersebut, karena proses alih pengetahuan dan kaderisasi melalui cara-cara lisan yang sangat tergantung dari frekuensi diselenggarakannya upacara ritual yang dipimpin oleh para *Balian*.

Dalam upacara ritual yang biasa dilakukan oleh umat Kaharingan, Marang mengatakan :

“ Para *Balian* menggunakan sastra suci Kepercayaan Kaharingan berisi cerita-cerita tentang kejadian dunia, manusia, dunia atau *lewo tatau* (surga) dunia bawah, *sangian-sangian* (para dewa), kekuatan baik dan jahat, perjalanan roh-roh manusia, mantra-mantra dan tawur menghantarkan sesajen serta doa-doa. Pewarisan nilai-nilai Kepercayaan Kaharingan ini dilakukan melalui cara lisan atau dari mulut ke mulut untuk menjamin kelangsungannya. Pada upacara ritual, terdapat *Basir Upu* (pimpinan *Balian*) yang didampingi oleh dua orang pengapit di kiri-kanannya sebagai pengulang atau penjawab apa yang diucapkan oleh *Basir Upu*. Melalui proses yang berulang-ulang dari upacara ke upacara lainnya, pewarisan ini terus berlangsung, walaupun tuturan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa

sangen (bahasa dewa-dewa) mengalami keausan dan telah dimasuki oleh bahwa Dayak Ngaju. “

Pada sisi lain, Marang sangat prihatin terhadap generasi muda yang sudah mulai kehilangan identitas karena dalam upacara ritual biasanya terdapat kegiatan kreasi seni tari dan seni pahat yang terkait dalam rangkaian kegiatan upacara tiwah yang biasanya berlangsung selama satu minggu. Kreasi seni tersebut terlihat pada *sandung* (tempat menyimpan tulang belulang), *pantar* (tugu), dekorasi dan *Banama* (perahu) hias yang menghantar *laluhan* (sumbangan). Kreasi seni ini biasanya terkait dengan simbol-simbol kepercayaan Kaharingan, seperti Burung *Tingang* (Enggang), *Tambun* (naga), *Batang Garing* (pohon kehidupan) dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk upacara ritual seperti gong, belanga, tombak, mandau dan talawang (prisai).

Seni ukir dan pahat ini merupakan sumber inspirasi dalam perkembangan kesenian Dayak Kalimantan Tengah yang menggambarkan identitas masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Dalam rangkaian penyelenggaraan ritual ini, tidak dibenarkan adanya perkelahian karena akan merusak proses ritual yang sedang berlangsung dan kejadian tersebut harus diselesaikan secara adat untuk menghindari *Pali* yang akan merugikan masyarakat pada masa yang akan datang. *Pali* atau pelanggaran terhadap pantangan ini dianggap sebagai perilaku *belum dia bahadat* (hidup tidak beradat) yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia tetapi juga kepada roh-roh leluhur yang menghuni lingkungan alam sekitar. Dengan demikian, Marang mengatakan :

“ Upacara ritual Tiwah saya anggap sebagai institusi adat yang sangat penting dalam menanamkan nilai *belum bahadat* khususnya bagi generasi muda agar mereka tidak kehilangan identitas sebagai orang Dayak yang selalu menjunjung nilai *belum bahadat* sebagai dasar interaksinya dengan orang lain. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Dayak, menyebabkan berkurangnya pelaksanaan upacara ritual Tiwah sebagai institusi *hadat* yang berfungsi untuk

menanamkan nilai-nilai *belum bahadat* kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan institusi kedamaian, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara dan konflik yang terjadi dalam masyarakat telah dikalahkan oleh hukum formal, sehingga institusi kedamaian berangsur-angsur kehilangan legalitas dalam ikut menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat”

Menanggapi berbagai kejadian yang dialami oleh masyarakat Dayak dan proses perkembangan masyarakat Dayak itu sendiri, Lewis dalam kesempatan penyelenggaraan pesta upacara sanggaran tahun 2004 untuk memindahkan tempat keramat di desa Tumbang Setawai, mengatakan :

“ telah terjadi proses kemerosotan nilai-nilai adat akibat pengikisan *pambelom* (pedoman hidup) masyarakat Dayak sehingga menimbulkan kebingungan dalam memahami realitas kehidupan. Kebingungan itu mereka ungkapkan dengan kata-kata : “ *ikei tuh mana galinga ih, tasarah ketun ji hunjun* “ kami ini kemana gelindingnya, saya terserah kepada pemerintah”. Dalam kondisi seperti ini, Lewis, orang mulai terjerumus kedalam kepentingannya masing-masing dan akan merugikan diri mereka sendiri, seperti dalam legenda Dayak yang menggambarkan tenggelamnya perahu yang ditumpangi oleh para *Damang Tumangung* (orang yang masing-masing memiliki pangkat dan Jabatan) karena tidak ada yang bersedia menimba air yang masuk kedalam perahu.“

4.2. Kebijakan Pembangunan dan Memarjinalisasikan Orang Dayak

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibu kota Sampit yang dikenal dengan kota *Habaring Hurung* (kebersamaan) dan terletak di tengah-tengah jalan Trans Kalimantan poros selatan yang menghubungkan Kalimantan Selatan, Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun dan Kalimantan Barat. Di samping letak geografis yang strategis, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi perkebunan dan hutan yang didukung oleh pelabuhan samudra Ujung Pandaran. Dalam visi dan misi pembangunan, pemerintah daerah akan menjadikan kota Sampit sebagai pintu gerbang perekonomian Kalimantan Tengah. Sebagai pusat perekonomian, Sampit akan dikembangkan menjadi pusat perdagangan, pariwisata, dan berkembangnya agribisnis dan agroindustri yang

akan mengaitkan dengan usaha masyarakat yang bermukim di Daerah Aliran Sungai. Interaksi kota Sampit dengan Wilayah DAS Seruyan, Katingan dan Mentaya akan menjadikan Wilayah DAS ini sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang akan mendukung daerah-daerah pinggirannya (*hinterland*).

Perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2000, menurut Aser telah mengalami perkembangan yang pesat pada wilayah-wilayah tertentu, seperti pada sentral produksi Pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Parenggean dan areal perkebunan Sambun di Jalan Trans kaliamantan Sampit-Pangkalan Bun, kota Kuala Pembuang yang dekat dengan potensi laut, serta kota Sampit sebagai sentral dalam simpul pembangunan perwilayahan. Sedangkan wilayah-wilayah pengembangan lainnya seperti DAS Seruyan, Katingan dan Mentaya tidak mengalami perkembangan yang berarti untuk dapat mendorong perkembangan di daerah-daerah pinggirannya (*hinterland*). Secara umum, Aser menyebutkan bahwa pembangunan dengan pengembangan perwilayahan di Kabupaten Kotawaringin telah menimbulkan kesenjangan pembangunan antara simpul pembangunan pusat dengan wilayah pinggirannya, yang berarti terjadi proses marjinalisasi terhadap masyarakat Dayak yang bermukim di bagian hulu-hulu sungai DAS Seruyan, Katingan dan Mentaya.

Pada Kongres Rakyat Kalimantan Tengah tahun 1998 yang diselenggarakan oleh LMMDD-KT, Aser mengatakan :

“ Pokok-pokok pikiran mengenai kesenjangan pembangunan ini telah saya paparkan di depan sidang Komisi yang membahas mengenai ekonomi dan politik. Pada kesempatan tersebut, seorang peserta merespon bahwa kebijakan pembangunan yang berjalan selama ini di Kalimantan Tengah, seperti kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah model pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil yang diibaratkan seperti *Speed Boat* yang sedang melaju di pinggiran sungai dan tidak mengindahkan ombaknya yang besar

dapat menenggelamkan perahu kecil atau menerpa orang-orang yang sedang mandi dan mencuci di Batang (MCK di pinggir sungai). Mencermati pemikiran yang berkembang dalam sidang komisi tersebut, telah mendorong kesadaran saya bahwa masyarakat yang bermukim di Daerah aliran Sungai (DAS) sebenarnya sudah tahu bahwa mereka telah dimarginalisasi oleh proses pembangunan dan bagaimana membantu mereka keluar dari proses marginalisasi ini. Berbekal dengan hasil Kongres Rakyat Kalimantan tahun 1998 yang mendesak pemerintah pusat untuk melakukan desentralisasi pembangunan di daerah Kalimantan Tengah dengan pertimbangan keuangan Pusat dan daerah yang tidak merugikan daerah, serta munculnya Undang-Undang Nomer 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah telah menguatkan tekad saya untuk menjadikan DAS seruyan sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur. “

Langkah-langkah yang perlu dilakukan menurut Aser adalah : *Pertama*, melakukan koreksi terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah menimbulkan kesenjangan pembangunan khususnya di wilayah DAS Seruyan. Salah satu hal yang mendasar yang menyebabkan kesenjangan ini adalah terbatasnya pembangunan infra struktur jalan yang menghubungkan daerah kecamatan dengan desa-desa yang berada dalam wilayah administratifnya. Selama ini mereka hanya menggunakan sarana transportasi sungai untuk mengangkut barang, orang dan jasa dengan keterbatasan jangkauan dan waktu, sehingga membatasi ruang gerak dan mobolitas mereka dalam memanfaatkan ruang publik. Pembangunan infra struktur di wilayah Kecamatan dan desa-desa ini terkendala oleh besarnya tuntutan pembangunan di daerah simpul pusatnya yaitu kota Sampit untuk memenuhi sarana dan prasarana akibat meningkatnya jumlah penduduk yang datang ke kota Sampit. Dalam konteks ini telah terjadi pemberian hak-hak istimewa (*privileges*) kepada penduduk pendatang dengan suatu pandangan bahwa mereka merupakan kelompok yang telah memberikan andil bagi kemajuan pembangunan di Kota Sampit. Dampak dari pemberian hak-hak istimewa ini telah merambah pula dalam penguasaan sektor perdagangan dan pelayanan

jasa dan menyempitkan ruang gerak bagi penduduk lokal untuk terlibat dalam persaingan memperebutkan sumberdaya ekonomi tersebut. Terhadap kondisi ini, mereka menyebutnya sebagai berikut “ *kan ngawa dia kuman manuk, kan ngaju dia kuman tabuan* (ke hilir tidak makan ayak, ke hulu tidak makan burung), maksudnya adalah gambaran ketidakberdayaan mereka untuk ikut bersaing di kota Sampit, sementara kesulitan yang dialami di desa mendorong mereka untuk mencari alternatif usaha di perkotaan.

Kedua, mengidentifikasi potensi di DAS Seruyan yang dapat dijadikan andalan dalam menghimpun pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor kehutan, perkebunan dan perikanan. Potensi yang tersedia ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme yang berpihak pada masyarakat dalam arti masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan termasuk pengawasan dan pemanfaat hasil. Mekanisme ini diharapkan dapat menggulirkan suatu kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sehingga terjadi suatu kegiatan ekonomi yang akan berdampak pada perubahan sosial khususnya bidang pendidikan, sehingga memberi kemampuan untuk menangkap peluang-peluang pembangunan yang tercipta dalam proses pembangunan itu sendiri. Dengan model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, akan terjadi perubahan perilaku dari budaya petik menjadi budaya olah akibat terjadinya perubahan dari sistem organisasi tradisional ke sistem organisasi sebagai jaringan kerja yang dapat mengembang usaha dan memperluas jaringan pasar. Pada suatu tahap tertentu akan menumbuhkan kemandirian (*self reliance*) masyarakat untuk menciptakan dan melindungi pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

Ketiga, mengusulkan tempat yang akan dijadikan sebagai ibukota Kabupaten dengan mempertimbangkan pluralitas masyarakat sebagai penghuni ibu kota Kabupaten yang sesuai dengan nilai budaya *Betang* yang menghargai perbedaan agama, etnis, budaya dan komunitas sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan bagi kesejahteraan bersama. Selain itu, dipertimbangkan pula akses terhadap Kabupaten Induk, sehingga masih ada keterkaitan dan kerjasama dalam pengelolaan dan pendistribusian hasil bagi kepentingan bersama. Letak yang strategis ini sangat penting bagi percepatan pembangunan kawasan wilayah DAS Seruyan. Pokok-pokok pikiran ini menurut Aser, harus disampaikan untuk menghindari agar para pengambil keputusan tidak terjebak dalam suara mayoritas yang lebih berpihak pada kepentingan kelompok dan golongan tertentu, sehingga dapat menimbulkan konflik sosial pada masa yang akan datang.

Di sektor kehutanan menurut Aser telah terjadi pula marginalisasi penduduk lokal yang melibatkan birokrat dan pengusaha HPH yang berlindung dibalik perundang-undangan yang sarat dengan interpretasi yang sulit dipraktekkan di lapangan karena terkendala oleh kelemahan sumberdaya masyarakat di desa untuk terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya hutan, sehingga yang dapat dilakukan oleh masyarakat hanyalah demonstrasi menuntut ganti rugi atas pelanggaran tanah adat atau tanah yang dianggap keramat oleh masyarakat. Dari aspek pengelolaan sumberdaya hutan ini, terdapat beberapa peraturan pemerintah yang memberi peluang kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Berdasarkan undang-undang kehutanan no. 41 tahun 1999, pemerintah menurunkan Peraturan Pemerintah Nomer 6 tahun 1999 Tentang perusahaan Hutan dan Perusahaan Hasil Hutan yang membenarkan masyarakat lokal untuk mengambil kayu

dan bukan kayu untuk keperluan sehari-hari; Kepmenhut no.677/Kpts-II/1999 tentang Hutan Kemasyarakatan yang memberi peluang kepada masyarakat lokal untuk memohon areal disekitar pemukiman mereka dalam bentuk koperasi dan dapat digunakan untuk tujuan komersil; Kepmenhut Nomer .318/Kpts-II/1999 tentang Peranan Masyarakat dalam Pengusahaan Hutan lebih memperkuat kedudukan masyarakat lokal sebagai aktor penuh dengan status yang sama dengan perusahaan swasta , perusahaan negara dan perusahaan daerah yang harus diberi akses terhadap pasar tenaga kerja dan kegiatan bisnis.

Berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat, menurut Aser yang terpenting adalah pengukuhan mengenai luasnya tanah adat yang dikenal dengan *Kaleka* (tanah warisan leluhur), *petak bahu* (lahan bekas ladang) dan tempat-tempat keramat seperti *pahewan* (wilayah hutan adat yang dikonservasi oleh masyarakat) dan *tajahan*, yaitu bekas tempat dilakukanya upacara ritual adat seperti Tiwah (upacara kematian) dan *Manajah Antang* (meminta petunjuk kepada roh-roh leluhur). Pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh pengusaha HPH antara lain disebabkan karena belum jelasnya status hukum tanah adat dan areal wilayah yang dikeramatkan berdasarkan hukum positif, walaupun berdasarkan hukum adat ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditelusuri dari riwayat, tradisi dan budaya lokal setempat dalam memperlakukan tanah adat dan tempat-tempat keramat.

Keadaan ini menurut Aser, memang disengaja dibiarkan mengambang untuk memberikan kesempatan kepada HPH dan pemerintah untuk menyiasati agar investasi di sektor kehutanan ini dapat berjalan dengan aman, karena sektor ini masih merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah, termasuk penyumbang dana bagi kepentingan pejabat-pejabat di daerah. Karena itu, pejabat dilingkungan Dinas

kehutanan merupakan daerah ” basah “ yang memiliki keterkaitan yang erat dengan Pemerintah Daerah dan aliansinya dengan pengusaha HPH. Konflik etnis yang terjadi di Sampit, ternyata bertepatan dengan penggantian pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur yang diketahui tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat Dayak.

Dari aspek peredaran uang yang berkaitan dengan pengolahan sumberdaya hutan, distribusi peredaran kayu dan jasa angkutan yang dikirim ke Pulau Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan selatan, Anwar mengatakan :

“dalam pengelolaan sumber daya hutan telah menyebabkan terjadi dana keluar (capital flight) bersamaan dengan pendistribusian barang dan jasa. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi Kabupaten Kotawaringin Timur yang hanya menerima bagian terkecil dari distribusi kayu tersebut”.

Lahirnya Perda nomer 14 tahun 2000 Tentang Retribusi Industri kayu, kayu Gergajian dan Kayu Olahan, menurut Anwar merupakan respon dari kepincangan tatanan struktur sosial ekonomi desain kebijakan pengelolaan hutan yang sentralistis. Keberhasilan pembangunan kehutanan selama ini hanya diukur dari besarnya nilai ekspor, pada kenyataannya hanya dinikmati para pengusaha dengan tanpa menyisakan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Peladang berpindah, penebang liar selalu dijadikan kambing hitam dalam kerusakan hutan, dibandingkan dengan luas areal HPH, luas ladang sangat kecil, dengan dibekali pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Maraknya penebangan liar merupakan fenomena nyata akibat kebijakan yang tidak cukup memberi ruang gerak usaha hutan bagi masyarakat lokal dengan keterbatasan modal, di samping keterhimpitan hidup dalam krisis ekonomi, sehingga hanya menjadi alat atau faktor produksi bagi pengusaha-pengusaha ilegal (cukong) yang kebanyakan tidak

berasal dari kalangan masyarakat setempat. Kehadiran Perda tersebut mempunyai tujuan untuk mengamankan aset daerah, dan menjadi solusi penghentian ketidakberdayaan daerah dalam mengupayakan potensi hutan secara maksimal, serta memberikan jaminan pada berjalannya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, karena selama ini peraturan perundang-undangan lebih berorientasi kepada pusat sehingga daerah hanya dijadikan penonton dan sapi perahan. secara tidak langsung perda ini diharapkan dapat memangkas praktek KKN yang selama ini menghantui tata niaga perkayuan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berbagai opini yang berkembang dalam praktek penyelenggaraan Perda tersebut menurut Anwar adalah vonis bahwa Perda perda tersebut telah menambah maraknya penebangan liar dan pengurusan sumberdaya hutan. Berbagai opini tersebut merupakan opini yang terlalu berlebihan, karena tebangan liar merupakan fenomena sosial ekonomi yang berkembang dalam masyarakat dan perlu ditanggapi secara arif. Kemampuan dan daya tebang masyarakat secara manual dan dalam skala kecil yang tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh pemegang HPH yang menggunakan segala peralatan yang berdaya rusak tinggi terhadap sumberdaya hutan dan lingkungan hidup. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah daerah kemudian dapat melihat fakta di lapangan bahwa selama ini daerah benar-benar menjadi lahan eksploitasi. Kerusakan lingkungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat di daerah terlihat dengan jelas merupakan dampak dari permainan yang juga dinikmati oleh oknum pemerintah. Dalam hal ini daerah tidak pernah mendapatkan hasil apapun, sedangkan investasi yang ditanamkan oleh daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan tidak dapat dikatakan sedikit. Adalah sebuah tindakan gegabah ketika pemerintah pusat begitu saja menolak dan membekukan Perda Nomer 14 Tahun 2000

hanya dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 41 tahun 1999. Kebijakan yang lahir dari desakan keadaan, tidak mustahil dapat berjalan mulus selama kebijakan di atas memahami arti tuntutan, perubahan, dan kecenderungan aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Pemerintah pusat seharusnya dapat memberikan solusi bagi permasalahan di lapangan, bukan malah mematikan upaya yang telah dilakukan dengan susah payah oleh pemerintah dan masyarakat di daerah.

Dampak dari kebijakan pembangunan tersebut menurut Anwar telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Dayak seperti hilangnya mata pencaharian dari sektor non kayu, hilangnya tanah adat dan rusaknya tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Dayak. Selain itu terjadi pula kerusakan lingkungan alam yang menyebabkan erosi, banjir dan pendangkalan air sungai. Terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat ini, Aser mengatakan :

“ yang terpenting sekarang adalah hak apa yang harus dikembalikan dan diterima oleh masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup mereka, termasuk memulihkan kerusakan lingkungan alam. Salah satu program yang dilakukan untuk masyarakat adalah program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Sejak diberlakukannya program tersebut pada tahun 1991 hingga sekarang, belum ada yang memperlihatkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terjadi hanyalah konflik antara masyarakat desa dengan pemegang HPH. Beberapa kelemahan program tersebut adalah kurangnya koordinasi, menimbulkan ketergantungan, tidak adanya ketentuan dan keterbukaan mengenai jumlah dana yang harus disediakan pemegang HPH untuk program tersebut. Berdasarkan pengamatan di lapangan saya berkesimpulan bahwa sebagian besar pemegang HPH tidak melaksanakan program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan secara sungguh-sungguh. “

Berkaitan dengan dana reboisasi, Anwar menyebutkan bahwa daerah hanya mendapatkan tugas untuk mengumpulkan dan menetapkan nominal pungutan yang dibebankan kepada pengusaha sesuai dengan besaran dalam ketentuan yang berlaku dan langsung disetorkan ke kas Khusus Menteri Kehutanan. Sebagai kompensasi dari

eksploitasi sumberdaya daerah, kontribusi kepada daerah sebagai lokasi penghasil tidak ada atau sangat kecil, dan hanya dikembalikan dalam bentuk proyek rehabilitasi yang nilainya tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang mengalami deforestasi akibat eksploitasi hutan secara besar-besaran.

Di sisi lain, sejak dilaksanakannya eksploitasi sumberdaya hutan, Anwar mengatakan:

“ Persoalan demi persoalan seakin berkembang, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh dilakukannya eksploitasi sumberdaya hutan tersebut. Konflik sosial dan gangguan adalah suguhan sehari-hari yang sangat mudah dijumpai di daerah yang memiliki sumberdaya hutan. Permasalahan lainnya adalah banjir, kekeringan dan kabut asap yang sering mengganggu distribusi kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga menyebabkan kelangkaan barang dan harga yang menjadi mahal. Untuk semua permasalahan yang terjadi karena eksploitasi sumberdaya hutan, pemerintah pusat banyak melemparkan tanggung jawab utama penyelesaiannya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dekat dengan lokasi permasalahan dianggap pihak yang seharusnya bertugas menyelesaikan segala persoalan, dengan sedapat mungkin tidak membebani pemerintah pusat, terlebih pada saat sekarang negara sedang mengalami krisis ekonomi. Kenyataan tersebut semakin menunjukkan tidak adanya penyelenggaraan sumberdaya hutan yang sistematis yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan komprehensif dan jangka panjang.

4. 3. Gerakan Melawan Isolasi politik

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah menurut Usop, adalah kelompok masyarakat yang dinamis dalam merespon masalah-masalah yang dihadapinya. Dinamika ini dapat di pahami dari perjalanan sejarah dan kebudayaan Dayak yang memiliki dua sisi yang bertolak belakang, yaitu sisi konflik dan sisi integratif. Keduanya sangat dipengaruhi oleh intensitas masalah yang dihadapi dan peranan tokoh masyarakat yang terlibat dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi

masyarakat tersebut. *Pertama*, sisi konflik yang terlihat dari masyarakat Dayak ini adalah sebelum peristiwa Rapat Damai Tumbang Anoi, yaitu pertikaian antar orang Dayak yang dikenal dengan *Hakayau* (saling potong kepala), *Habumu* (saling bunuh) dan *Hajipen* (saling memperbudak). Peristiwa ini bisa dirujuk dari mitologi Dayak yang percaya bahwa dalam upacara Tiwah diperlukan kepala manusia sebagai pengorbanan dan korban tersebut dapat mengabdikan sebagai budak di *lewo tatau* (surga). Kepercayaan ini merupakan salah satu sumber pertikaian antar masyarakat Dayak sehingga belakangan muncul istilah *mambaleh bumu* (membalas kematian) yang berarti ada pembenaran untuk melakukan tindakan pembalasan jika salah satu warga atau keluarga ada yang mati terbunuh. Beberapa istilah yang terkait dengan semangat konflik yang berkembang dalam masyarakat Dayak antara adalah *Ela buli manggeti hinting bumu panjang*, *isen mulang manetes tali kamara ambu* (pantang mundur, berjuang terus, tidak akan kembali pulang sebelum mengalahkan musuh); beberapa istilah perang seperti *manakir petak* (menumiti bumi), *lahap* (pekik perang), *jalan bahandang* (tindakan yang harus dilakukan dengan perang) dan *lawung bahandang* (ikatkepala merah) yang menggambarkan kesiapan untuk berperang.

Kedua, sisi integratif adalah sejak peristiwa Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1894 di rumah Betang desa Tumbang Anoi, yang dipahami sebagai tonggak peradaban masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Sejak peristiwa tersebut, diberlakukan hukum adat dalam penyelesaian pertikaian yang terjadi antar masyarakat Dayak dan merupakan cikal bakal berkembangnya hukum adat dan institusi adat di wilayah Kalimantan Tengah. Perkembangan berikutnya dikenal pula *Batang* sebagai tempat yang menyatukan masyarakat Dayak yang pluralis dari segi agama, etnis dan komunitas dan semangat integratif Pakat Dayak yang berkembang dari Pakat Damai

Tumbang Anoi.

Selain itu, pada upacara kematian Tiwah telah dipahami sebagai institusi adat yang berfungsi menanamkan nilai-nilai *belum bahadat* (hidup berdasarkan aturan adat yang berlaku) tidak boleh dilanggar karena bisa menjadi *pali* (pantangan) yang mengganggu kehidupan hari esok. Pengorbanan dengan kepala manusia telah digantikan dengan kerbau dan sebagai pengawal atau budak di *lewo tatau* (surga) disimbolkan dengan *sapundu* (patung Manusia) yang ditancapkan mengelilingi *Sandung*, yaitu tempat menyimpan tulang belulang orang yang sudah mati setelah upacara Tiwah. Dari legenda Dayak, dikenal *Sansana Bandar* yang menceritakan seorang pimpinan spiritual Dayak bernama Bandar yang digambarkan sebagai orang yang arif, bijaksana, cerdas, pandai serta memiliki paras yang tampan dan budi pekerti yang baik. Beberapa ungkapan dalam bahasa *sangiang* (bahasa dewa-dewa) yang menganjurkan sikap integrasi yaitu *Penyang hinje simpei, paturung humba tamburak* (bersatulah kamu dalam satu keyakinan, harapan dan kasih sayang); *Manjadi tanggeren lewu mandereh danum, pananggak rundung hapamantai tambun* (menjadi contoh dan tauladan, kebanggaan dan pelindung bagi semua orang); *Hatamuei lingu nalatai, hapangaja karendem malempang* (sebelum memutuskan sesuatu keputusan hendaknya melalui komunikasi, musyawarah dan mufakat); *Belum pajajewung kilau pisang tanggan tarung, raja manggigi tingkah lawang baun andau* (hidup teratur bahagia, sejahtera, perkasa bagaikan awan berbaris di angkasa).

Dinamika masyarakat ini menurut Usop, digerakkan oleh tiga kekuatan penyangga dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan *Garing Hatungku Tungket Langit*, yaitu *Pampang Saribu* (kasum cerdas pandai), *Pampang Erang* (kaum adat) dan *Gamalan Nyaho* (kaum Agama). Ketiga kekuatan ini merupakan satu

kesatuan yang disebut dengan *Penyang huije simpei* dalam menggerakkan kekuatan masyarakat untuk merespon permasalahan yang sedang dihadapi. Pada tahun 1920, muncul gerakan Pakat Dayak yang lahir dari kesadaran bahwa orang-orang Dayak tertinggal dan ditinggalkan oleh kelompok etnis lainya karena terkait dengan pandangan yang rendah terhadap orang Dayak. Cita-cita yang ingin diperjuangkan oleh Pakat Dayak adalah kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dalam meningkatkan martabat hidup dan dipertahankannya adat istiadat sebagai identitas masyarakat Dayak.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Usop menyebutkan, isolasi politik dan tekanan terhadap orang-orang Dayak dalam meningkatkan taraf hidupnya kembali dirasakan oleh mereka, selama orang-orang Dayak merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Selatan. Berkaitan dengan kondisi ini, diadakanlah Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin yang mempersiapkan dan memperjuangkan berdirinya Propinsi Kalimantan Tengah. Sabran Achmad selaku salah satu anggota panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah di Sampit menyebutkan bahwa panitia telah menyampaikan tuntutanannya dan menyatakan bahwa apabila kehendak dan tuntutan rakyat ini ditinjau berdasarkan objektif, berdasarkan kenyataan, terlepas dari perasaan yang dikuasai oleh sentimen, maka tuntutan kami rakyat daerah pedalaman Kalimantan hendak mendirikan Propinsi Kalimantan Tengah itu adalah patut, adalah tuntutan nyata, malahan adil, bukan saja di dalam perbandingan dengan pembagian propinsi-propinsi lain, tetapi pemberian status propnsi Kalimantan Tengah akan menunjukkan kepada umum, terutama kepada suatu golongan yang terkebelakang di dalam segala soal sebagai akibat dari penindasan, pemerasan di masa lampau, bahwa kini nasib mereka diperhatikan, malahan diusahakan mencari segala jalan yang amat pendek untuk masa yang amat singkat memperbaiki nasib mereka dan meninggikan

derajat mereka. pemberian status propinsi pada Kalimantan Tengah akan membesarkan kemungkinan serta keyakinan dan menebalkan kepercayaan golongan yang sangat menderita di Kalimantan, bahwa terwujudnya nasib mereka diberi perhatian yang lain sifatnya di masa penjajahan, sesuai dengan hasrat nasional negara dan pemerintah kita, bahwa pada nasib mereka diberi perhatian yang sebesar-besarnya, sesuai pula dengan besarnya keterbelakangan mereka; bahwa rencana nasional pemerintah kita pada dewasa ini yang meyakinkan kami, mempercayai bahwa tuntutan kami diperhatikan.

Pada perkembangan selanjutnya Usop menyebutkan bahwa latar belakang sejarah yang penuh dengan dinamika interaksi dan integrasi kembali menampilkan diri dalam bentuk persatuan, sehingga perjuangan itu di dukung oleh semua golongan, baik golongan Islam, Kristen dan kaharingan, maupun berbagai aliran komunitas di Daerah Aliran Sungai. Setelah R.T.A Milono Memjabat sebagai Gubernur Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah (1956-1957), tokoh-tokoh angkatan 45 pejuang Angkatan 45 yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup di kalangan masyarakat Kristen tampil sebagai Gubernur : Tjilik Riwut (1957-1966), Ir. R. Sylvanus (1966-1978), W.A. Gara (1978-1983). Perkembangan dan interaksi politik antar golongan yang mencapai puncaknya pada masa penghujung masa bakti W.A. Gara menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah dan Tokoh masyarakat tidak berhasil menampilkan tokoh-tokohnya baik dari kalangan Kristen, Islam, Kaharingan sebagai Gubernur. Maka munculah tokoh-tokoh yang di ditugaskan dari Pusat untuk memimpin Kalimantan Tengah selanjutnya : H. Eddy Sabara (1983-1984), Gatot Amrih, S.H (1984-1989), drs. Soeparmanto (1989-1993), Waristo Rasman (1994-1999).

Selama 15 tahun kepemimpinan yang ditunjuk pemerintah pusat ini, Usop

dengan bersemangat menuturkan sebagai berikut :

“ Masyarakat Kalimantan Tengah merasa adanya isolasi politik, karena sejak itu kepemimpinan pada Dinas Instansi sektoral dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten, termasuk para Bupati telah dibagikan kepada orang – orang yang bukan berasal dari etnis Dayak. Khususnya untuk kepemimpinan pada tingkat Kabupaten diserahkan kepada kalangan militer, seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, khusus dijatahkan untuk kalangan yang berlatarbelakang kepolisian. Kesadaran akan adanya isolasi politik kepada orang Dayak ini mulai menjadi pemikiran dikalangan tokoh – tokoh masyarakat Dayak, dan bermula pada peringatan persiapan 100 tahun Rapat Damai Tumbang Anoi tahun 1994 telah digagas kelahiran lembaga Musyawarah masyarakat dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) yang didasarkan pada pemikiran untuk membina dan mengembangkan masyarakat Kalimantan Tengah yang Pluralis serta upaya untuk mengakomodasikan tuntutan dinamika gejolak – gejolak perkembangan masyarakat Kalimantan Tengah yang ketika itu sudah terasa kian termagnalisasi. Ibarat perahu itu terus juga dikayuh mengarungi arus gelombang perkembangan masyarakat. Pada waktu itu muncul pandangan kedaerahan/kesukuan (*etnocentries*) berhadapan dengan pandangan kemajemukan atau pluralisme, dan pantas Orde Baru selalu menekan masyarakat lokal dengan isi SARA, sehingga muncul reaksi yang lebih menguatkan padangan kedaerahan. “

Sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat Usop menceritakan mengenai terbentuknya LMMDDKT kabupaten bahkan pada tingkat Kecamatan. Masa normalisasi dan konsolidasi ini berjalan terus, sementara tekanan politik atau marjinalisasi terhadap masyarakat lokal kian terus mendesak sebagai akibat kebijakan yang sentralistik. Untuk meneruskan perjuangan rakyat Kalimantan Tengah meningkatkan harkat dan martabatnya dan kesejajaran dengan daerah-daerah lainnya serta percepatan pembangunan daerah, maka LMMDDKT menyelenggarakan Kongres Rakyat Kalimantan (KRKT) pertama pada 2 – 5 Desember 1998 dengan mendesak dilakukannya desentralisasi dan Gubernur putra daerah Kalimantan Tengah. Dalam Mubes tersebut dan KRKT itu disepakati tentang kepala daerah / Gubernur/ Bupati haruslah yang dikenal dan mengenal daerah dan masyarakatnya berdasarkan budaya

betang dan *belum bahadat* (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung). Pada waktu itu telah terjadi pula demo reformasi pertama yang menentang calon Gubernur Karna Suhanda yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Terpilihnya Warsito Rasman sebagai Gubernur menurut Usop, merupakan rekayasa dari pemerintah pusat dan upaya untuk memecah belah Masyarakat Dayak dengan primordialisme sebagai isu SARA bagi kepemimpinan putra daerah. Pada waktu itu telah digulirkan organisasi kedayakan tandingan untuk meredam perkembangan LMMDDKT, yang sudah mulai mengakar dalam kehidupan masyarakat Dayak dengan menggelar Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh semua perwakilan masyarakat akar rumput, tokoh masyarakat termasuk birokrat yang berasal dari etnis Dayak. Pada masa kepemimpinan Warsito Rasman ini, terjadi pula tekanan terhadap masyarakat Dayak dengan munculnya Proyek raksasa pembukaan Lahan satu juta hektar sebagai upaya pemerintah pusat untuk mempertahankan swasembada pangan dengan dasar keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 82 tahun 1995 tentang pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian pangan di Kalimantan tengah. Proyek Lahan Gambut Satu Juta hektar ini telah meresahkan masyarakat Dayak, karena banyak penduduk kehilangan sumber pendapatan akibat terbakarnya kebun, rotan, hilangnya *beje* (kolam ikan) sawah, karet dan terjadi pengeringan dan banjir karena pembukaan saluran saluran air untuk pertanian. Pengambilalihan terhadap tanah masyarakat secara paksa tanpa mengindahkan pemiliknya karena dilaporkan sebagai tidak bermasalah dan untuk kepentingan umum. Demo yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut hak mereka langsung ditanggapi dengan menerjunkan tentara untuk mengamankan masyarakat. Pada saat itu rapat terpadu pimpinan proyek dengan gaya yang otoriter menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi dengan masyarakat

mengatakan bahwa masalah tersebut harus ditangani secara cepat, sehingga masyarakat yang menolak harus dipindahkan, dicarikan lokasi lain, dimasukkan dalam sistem, tanpa terlebih dahulu dilakukan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui aspirasi masyarakat.

Berkaitan dengan pandangannya di atas, Usop mengatakan :

“Pelaksanaan proyek satu juta hektar ini adalah salah satu dari sentralistik pemerintah pusat yang memaksakan dilaksanakannya proyek satu juta hektar termasuk pembenaran yang melibatkan kelompok intelektual, tekanan terhadap pemerintah daerah dan sektor sektor terkait untuk mensukseskan program tersebut, termasuk pendekatan keamanan yang diberlakukan dengan mengedepankan militer yang mengamankan jalannya proyek dari tuntutan masyarakat lokal. “



BAB V

ANALISIS STRUKTURAL

ATAS KONELIK DAN

KEKERASAN ETNIS DI

SAMPIT

BAB V

ANALISIS STRUKTURAL ATAS KONFLIK DAN KEKERASAN ETNIS DI SAMPIT

Analisis struktural termasuk dalam paradigma fakta sosial yang didasarkan pada pemikiran positivisme untuk menjelaskan realitas sosial, dilihat dari sebab dan akibat. Objek analisisnya adalah struktur sosial dan kelembagaan, termasuk dampaknya terhadap pemikiran dan tindakan individu.

Negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat, cenderung memaksakan kebijakan untuk memperbesar pendapatan nasional dan daerah, tetapi dapat merugikan masyarakat. Misalnya kebijakan eksploitasi sumber daya hutan yang menimbulkan kesenjangan sosial akibat distribusi sumberdaya yang tidak merata dan kerusakan lingkungan.

Distribusi sumber daya yang tidak merata ini merupakan faktor penyebab terjadinya konflik; dan konflik ini dapat menjadi intens dan kekerasan (*intens and violence*) jika lemahnya upaya-upaya organisasi yang meliputi kondisi teknikal suatu organisasi (*technical condition of organization*), kondisi politik (*political condition of organization*) dan kondisi sosial (*social condisition of organization*) untuk mengatur konflik (*conflict regulation*).

Dasar pemikiran di atas, merujuk pada para penganut teori konflik khususnya dari Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik merupakan gejala yang selalu hadir dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu konflik tidak bisa dihindari, tetapi harus ada upaya pengaturan untuk mencegah meluasnya konflik menjadi tindakan kekerasan.

5.1. Ketimpangan Pembangunan

Kebijakan pembangunan dengan model pengembangan perwilayahan telah menimbulkan kesenjangan sosial antara simpul pembangunan pusat (kota Sampit) dengan simpul-simpul pembangunan di wilayah pinggiran (*hinterland*), yaitu masyarakat di DAS Seruyan, Katingan dan Mentaya. Ketimpangan sosial ini merupakan konsekuensi dari model pembangunan perwilayahan yang mengadopsi model pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi dari luar untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam.

Pelaku ekonomi yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tersebut dalam pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan mekanisme pasar, sehingga masalah yang terkait dengan masyarakat adalah urusan negara. Akibatnya adalah surplus ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat, menguap keluar (*capital flight*) dari kabupaten Kotawaringin dan sebagian dihisap oleh masyarakat yang berada di wilayah perkotaan.

Kondisi seperti ini menjelaskan bahwa pemerintah belum mampu melaksanakan fungsinya dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan ke wilayah pinggiran dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketidakmampuan ini erat kaitannya dengan orientasi pembangunan yang lebih mengedepankan upaya memperbesar pendapatan daerah. Ketidakmampuan ini juga terkait dengan upaya menciptakan efek ganda (*trickle down effects*) dari sebuah investasi pembangunan untuk menggerakkan perekonomian rakyat.

Kesenjangan sosial tersebut terlihat dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Rp.5.009.769,- Dibandingkan dengan Kabupaten Barito Utara Rp. 6.662.908,- dengan Produk Domestik Regional Bruto

(dalam jutaan rupiah), yaitu Rp.1.057.286 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Kotawaringin Timur Rp.2.643.431, walaupun secara faktual kabupaten Kotawaringin Timur menyumbang yang lebih besar dari kabupten lainnya (30%) terhadap pendapatan provinsi kalimantan Tengah

Keadaan tersebut dapat pula diperlihatkan dari indeks pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Kotawaringin Timur (65,3 %) yang lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Kapuas (72,1%) dan kota Palangkaraya (72,3 %). Disamping itu struktur ekonomi yang sangat tergantung dari sumber usaha kehutanan, yaitu 18,26 % dari total sumbangan sektor pertanian (48,41 %) terhadap PDRB kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan besarnya kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui eksploitasi sumberdaya hutan. Keadaan ini dapat mengabaikan pembangunan manusia melalui distribusi pendapatan yang layak bagi pengembangan kualitas hidup mereka.

Rasionalisasi dari konsep pembangunan ekonomi yang mengadopsi cara-cara moderen, berfokus pada produksi dan mengabaikan konsep pembangunan manusia. Orientasi pada produksi terkait dengan pemupukan modal dan manusia menjadi alat dari produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Akibatnya pemanfaat terbesar dalam proses produksi tersebut adalah para pengusaha yang mengabaikan tanggung jawab sosial untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga mereka pun seharusnya dapat menikmati kehidupan yang layak.

Sebaliknya pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan masyarakat terperangkap dengan kepentingan untuk memperbesar pendapatan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan di daerah bukan dikendalikan oleh pemerintah, tetapi oleh pengusaha sebagai pemilik modal.

Berlangsungnya dominasi pengusaha dalam pembangunan di daerah menimbulkan ketergantungan yang merugikan masyarakat.

Lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ini, telah menimbulkan respons dari masyarakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut seperti "speed boat" yang melaju di pinggir sungai tanpa mengindahkan ombaknya yang besar dapat menenggelamkan perahu-perahu kecil. Respon masyarakat ini dapat dipahami bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini tidak berkiprah kepada kepentingan masyarakat kecil, sehingga mereka merasa dimarginalisasikan oleh proses pembangunan.

Marjinalisasi ini, oleh masyarakat digambarkan sebagai proses peminggiran masyarakat Dayak dalam pemanfaatan ruang publik, di mana peran pemerintah sebagai penentu regulasi kebijakan belum mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga masyarakat Dayak.

Gambaran mengenai pandangan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, ketidakadilan dalam pemanfaatan akses ekonomi yang digambarkan oleh masyarakat sebagai *tempon petak manana sare*, yaitu proses peminggiran orang Dayak dengan mereproduksi informasi bahwa mereka adalah orang-orang yang dimanja oleh alam, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk bekerja keras dan kemampuan bersaing dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, posisi masyarakat pendatang menjadi sangat strategis dalam mendukung proses pembangunan, dan masyarakat Dayak beranggapan bahwa pemerintah telah memberikan hak-hak istimewa kepada masyarakat pendatang.

Kedua, kehidupan subsisten yang dialami oleh masyarakat Dayak yang disebut mereka sebagai *sepangakas sapanutuk*, yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang

diusahakan pada hari itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pada hari itu juga, diibaratkan seperti ayam yang mencari makan setiap hari. Berlangsungnya keadaan seperti ini, telah menimbulkan tekanan psikologis seperti kondisi kebingungan yang mereka sebut sebagai *kan ngawa dia kuman manuk kan ngaju dia kuman tabuan* (ke hilir tidak makan ayam, ke hulu tidak makan burung) dan kondisi pasrah menerima nasib dalam ungkapan yang mereka sebut sebagai *ikei tuh mana galinga ih, tasarah dengan ketun ji hunjun* (ke mana gelindingannya saja, dan terserah kepada pemerintah saja).

Proposisi 1.

Kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi untuk memperbesar pendapatan daerah, telah menimbulkan kesenjangan sosial. Kondisi ini merupakan faktor penyebab terjadinya konflik sosial di tingkat masyarakat.

5.2. Dampak pembangunan Kehutanan

Negara sebagai pemegang mandat kekuasaan dari masyarakat, memiliki kewenangan untuk melakukan proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dengan kewenangan tersebut, negara dapat pula mendahulukan kepentingan negara dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Keterlibatan negara dalam pasar bebas dengan melakukan eksploitasi sumber daya hutan melalui para pemilik modal, sangat menguntungkan bagi penerimaan devisa negara, tetapi merugikan masyarakat. Dampak dari eksploitasi hutan tersebut adalah hilangnya penghasilan dari hasil non kayu dan kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan (*deforestry*) yang menimbulkan banjir dan tanah longsor.

Disamping itu, terjadi pula pelanggaran terhadap hak-hak tanah adat, tempat yang dikeramat oleh masyarakat dan situs-situs budaya serta penguasaan lahan yang menyempitkan wilayah pemanfaatan masyarakat.

Secara umum dapat kita tarik kesimpulan bahwa negara telah gagal dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ekonomi yang menganut pasar bebas yang tidak terkendali, akan mempercepat kerusakan lingkungan dan mengabaikan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, orientasi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat harus terus menerus dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.

Kebijakan pemerintah dengan melakukan eksplotasi sumberdaya hutan ini merupakan kolaborasi kepentingan antara pemerintah dengan pengusaha yang sangat merugikan masyarakat. Pada tingkat nasional, dari total luas 24.165.751 hektar areal hutan dikuasai oleh 10 kelompok pengusaha besar, yaitu 47 % dari total hutan produk seluas 51.251.052. Kalimantan Tengah dengan luas hutan produksi 8,86 juta hektar dikelola oleh 56 buah perusahaan HPH dan kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas hutan produksi 3,17 juta hektar dikelola oleh 20 perusahaan HPH.

Dampak dari keberadaan perusahaan HPH ini adalah hilangnya sumber penghasilan masyarakat dari hasil non hutan, terganggunya rotasi perladangan, hancurnya situs-situs budaya dan pelanggaran terhadap tanah adat (lihat tabel 2.16). Tekanan-tekanan yang kuat dari masyarakat terhadap keberadaan HPH tersebut, telah mendorong munculnya berbagai kebijakan pemerintah dalam meredam potensi konflik dapat terjadi antara masyarakat dengan pengusaha HPH.

Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut di antaranya adalah Keputusan Menteri Kehutanan No.69/Kpts-II/1995 tentang kewajiban pemegang HPH dalam pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Program ini mengalami kegagalan, karena

tekanannya pada usaha pertanian menetap yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat yang memiliki beberapa alternatif usaha yang bersifat musiman. Diterbitkan pula Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengikutkan masyarakat mengelola hutan berdasarkan hukum adat setempat, mengumpulkan hasil hutan untuk keperluan sehari-hari dan mendapatkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kebijakan pembangunan dengan mengeksploitasi sumberdaya hutan, telah menimbulkan kerusakan lingkungan, juga dianggap telah mengganggu keseimbangan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Gangguan terhadap kehidupan roh-roh leluhur yang menghuni lingkungan alam yang dipahami sebagai *pali* (melanggar pantangan) sehingga roh-roh tersebut menjadi marah dan dapat mengganggu kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Keadaan ini merupakan pelanggaran dari kebiasaan masyarakat Dayak yang biasanya memperlakukan alam secara arif, baik dalam pemanfaatan maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam, terdapat konsep *pahewan*, yaitu hutan belantara yang tidak boleh ditebang dan memiliki kawasan yang tidak boleh diganggu. Gangguan terhadap kawasan *pahewan* ini dipercaya masyarakat akan mendatangkan malapetaka bagi orang yang bersangkutan. Hutan *pahewan* ini ternyata sebagai lahan konservasi yang dilindungi oleh masyarakat bagi kelangsungan hidup aneka ragam satwa (*biodiversity*) dan juga sebagai sebagai hutan penyangga bagi kawasan sekelilingnya. Demikian pula dalam pemanfaatan sumberdaya alam, terdapat konsep kelangsungan sumberdaya alam bagi kehidupan generasi yang akan datang (*sustainable livelihood*) yang mereka sebut sebagai *ingat peteh tatu hiang, petak danum akan kalunen harian andau* (ingat pesan leluhur, sumberdaya alam bagi kehidupan manusia pada masa yang akan datang).

Selain gangguan keseimbangan hubungan manusia dengan alam terjadi pula gangguan terhadap lingkungan fisik berupa lahan kritis. Segah (2007) memperlihatkan bahwa lahan kritis yang tersebar di 14 kabupaten di Kalimantan Tengah yang terbesar adalah Kabupaten Murung Raya seluas 1.403.972 hektar dan di kabupaten Kotawaringin Timur seluas 953.269 hektar. Diantaranya terdapat pula dua kabupaten pemekaran kabupaten kotawaringni Timur, yaitu Kabupaten Seruyan dengan luas lahan kritis sebesar 891.946 hektar dan kabupaten Katingan seluas 578.548 hektar.

Dampak lainnya adalah terjadinya dana keluar (*capital flight*) sebesar 70 %-80 %, sehingga keberadaan pengusaha HPH tidak memiliki efek ganda (*multiplier effects*) terhadap perekonomian rakyat (Cornelis Rintuh, 2002). Dari sisi pemerintah, Anwar (2002) menyebutkan bahwa penerimaan dari sektor kehutanan ini lebih banyak diterima oleh pemerintah pusat, sehingga kabupaten Kotawaringin Timur hanya menjadi “sapi perah” bagi pemerintah. Terkait dengan ketimpangan ekonomi tersebut, Fedlik Aser (1998) pada Kongres Rakyat kalimantan Tengah tahun 1998 menyebutkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mendorong desentralisasi dan pemekaran kabupaten kotawaringin Timur menjadi Kabupaten seruyan dan Kabupaten Katingan.

Disektor perkebunan, terjadi pula konflik penguasaan lahan antara masyarakat lokal dengan pengusaha perkebunan yang disebabkan pelanggaran terhadap tanah adat dan situs-situs budaya. Konflik penguasaan lahan ini, salah satunya dilakukan oleh sepuluh kelompok pengusaha yang tergabung pada perusahaan PT. Agro Indomas.

Secara umum, Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah telah merumuskan sebuah konsep *manyanyalamat petak danum*, yaitu : *Pertama*, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang arif terhadap

lingkungan untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia pada masa yang akan datang (*sustainable livelihood*). Dalam pemahaman orang Dayak, *sustainable livehood* disebut sebagai *ingat peteh Tatu Hiang, petak danum akan anak jarian harian andau* (ingat pesan leluhur, sumber daya alam bagi kehidupan generasi yang akan datang) *Kedua*, pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, untuk menjamin kelangsungan sumber daya alam pada masa yang akan datang *Ketiga, belum bahadat* sebagai pedoman dalam mengatur hubungan manusia dengan alam sehingga mendorong kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam serta dalam kehidupan bersama, sehingga terpelihara suasana *hakam belum-belom* (kerukunan) dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah yang pluralis. *Keempat*, penguatan institusi Kedamaian dan mengoptimalkan peran Damang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. *Kelima*, menembus isolasi keterasingan masyarakat Dayak yang berada pada simpul pembangunan di daerah pinggiran (*hinterland*), sehingga mengurangi kesenjangan sosial dengan kelompok masyarakat yang bermukim pada simpul pembangunan di pusat pertumbuhan (kota Sampit).

Proposisi 2.

Dominasi peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui kebijakan eksploitasi sumber daya hutan, telah menimbulkan keberpihakan negara kepada kepentingan pengusaha tetapi merugikan pihak masyarakat lokal. Kondisi ini merupakan faktor pendorong terjadinya konflik etnis

5.3. Dinamika Politik Lokal

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, model pembangunan yang sentralistik dari pemerintahan Orde Baru telah memperkuat kedudukan negara,

atas nama rakyat untuk mengatur dan mengambil keputusan yang terbaik bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang pluralis, bagi pemerintahan Orde Baru dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas nasional, sehingga pemerintah lebih mengedepankan pembangunan nasionalisme (*national building*) dengan mengembangkan isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yang harus diwaspadai sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.

Dasar pemikiran nasionalisme ini terkait pula dengan model pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan kondisi ketertiban, stabilitas dan keamanan nasional. Akibatnya, sentralisasi pembangunan telah memperkuat peran negara yang didukung oleh militer yang kuat. Oleh karena itu, *national building* dan pembangunan ekonomi yang menerapkan stabilitas dan keamanan nasional telah menempatkan masyarakat pada posisi yang pasif, yaitu sebagai penerima dari semua kebijakan pemerintah dan mematikan kreatifitas dan dinamika masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat seperti ini, merupakan tindakan kekerasan yang mengabaikan secara faktual keragaman budaya dan kebutuhan yang berbeda pada setiap masyarakat daerah di Indonesia.

Pergolakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia adalah akibat ketidakadilan ekonomi dan politik yang menempatkan daerah sebagai “sapi perah” melalui kebijakan dan ketidakadilan yang diberlakukan kepada daerah. Oleh karena itu, setelah lengsernya presiden Soeharto pada tahun 1998, pada pemerintahan presiden Habibie telah diberlakukan Undang-Undang Nomer 22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah. Prinsip otonomi daerah tersebut adalah penyerahan beberapa urusan yang

terkait dengan kesejahteraan masyarakat, inisiatif dan kreativitas daerah dalam mengurus daerahnya masing-masing dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengalaman historis yang dialami oleh masyarakat Dayak pada masa pemerintahan Orde Baru adalah isolasi politik terhadap penduduk lokal sebagai bagian dari intervensi pemerintah pusat dalam menentukan pimpinan di daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, hingga pimpinan pada dinas dan instansi pemerintah. Isolasi politik ini dipahami oleh orang Dayak sebagai *benteng dereh*, yaitu suatu posisi atau keadaan yang tidak menentu dari masyarakat Dayak, sehingga tidak mampu mengaktualisasikan diri dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi kehidupan mereka.

Kuatnya campur tangan pemerintah pusat ini, telah mendorong munculnya kekuatan lokal untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat yang menekan orang-orang Dayak dalam menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Keadaan tersebut, telah mendorong munculnya Lembaga Musyawarah Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) sebagai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap tekanan-tekanan politik yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

LMMDD-KT sebagai kekuatan lokal ini menjadi sangat kuat, karena momentum yang digunakan dalam merekomendasi munculnya lembaga ini adalah pada saat memperingati Seratus Tahun Rapat Damai Tumbang Anoi pada tahun 1994 sehingga memiliki ikatan yang kuat secara emosional dengan masyarakat Dayak, dan dilegitimasi melalui Kongres Rakyat Kalimantan Tengah sebagai wadah perjuangan masyarakat Dayak dalam merespon tekanan-tekanan politik yang mereka alami. Selain itu, unsur-unsur pimpinan dari LMMDD-KT ini terdiri dari tiga kekuatan penyangga dalam kehidupan orang Dayak, yaitu *Garing Hatungku Tungket Langit* yang terdiri dari

Pampang Saribu (kaum cendikiawan), *Gamalan Nyaho* (kaum agama) dan *Pampang Erang* (kaum adat).

Dinamika kehidupan masyarakat Dayak tersebut dapat dilihat pada sejarah transformasi budaya Dayak berikut ini.

Tabel 5.1
Sejarah Transformasi Budaya Dayak

Tahun	Gerakan Sosial Politik	Pakat Dayak
1894	Rapat Damai Tumbang Anoi	Menghentikan Habunu (saling bunuh), Hakayau (saling potong kepala), dan Hajipen (saling merperbudak) antar sesama orang Dayak.
1920	Pakat Dayak	Memperjuangkan ketertinggalan, kebodohan dan mempertahankan adat leluhur orang Dayak
1950 – 1957	Gerakan Mandau Talawang Pancasila	Perjuangan mendirikan propinsi Kalimantan Tengah, terlepas dari Kalimantan Selatan.
1994	Peringatan 100 tahun Rapat Damai Tumbang Anoi	Merekomendasikan berdirinya LMMDD- KT untuk memperjuangkan nasib orang Dayak
1996	LMMDD-KT	Menggalkan Drping Gubernur dari pusat
1998	Kongres Rakyat Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Memperjuangkan Gubernur Putra Daerah - Otonami daerah - Hak-hak adat masyarakat Dayak - Memperkuat kelembagaan adat
2001	Kongres Rakyat Kalimantan II khusus membahas konflik dan Dayak Madura di Sampit	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan bersyarat pengungsi Madura asal Sampit - Pemberdayaan masyarakat Dayak
2002	Musyawahar besar Damang Kepala Adat se Kalteng	Mengaktifkan peran Damang dalam menyelesaikan konflik, hak – hak Adat dan ikut mengawasi kelestarian lingkungan alam

Sumber : Usop, SR (2003)

Dinamika perkembangan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah tersebut merupakan refleksi dari Rapat Damai Tumbuhan Anoi yang merupakan tonggak peradaban masyarakat Dayak karena berhasil menyelesaikan konflik antarsesama orang Dayak dan memberlakukan hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat. Setelah itu muncul gerakan Pakat Dayak tahun 1927 yang mendorong

penguatan adat dan hukum adat; Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMPTS) yang memperjuangkan pemisahan Kalimantan Tengah dari Kalimantan Selatan dan kemudian berdirinya provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1957.

Pada masa Orde Baru muncul pula Gerakan Lembaga Musawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) yang menentang dominasi dan sentralisasi pemerintah pusat yang merugikan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Gerakan yang dilakukan oleh LMMDD-KT ini merupakan refleksi dari pengalaman sejarah dan upaya merespon masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang Dayak. Rangkaian tindakan yang dilakukan tersebut merupakan transformasi sosial dengan prinsip terjadinya perubahan yang tidak mencabut masyarakat dari akar budayanya.

Proposisi 3.

Tekanan ekonomi dan politik yang dialami oleh masyarakat Dayak telah mendorong munculnya kelembagaan di tingkat masyarakat sebagai wujud dari kesadaran bersama untuk melakukan perubahan terhadap dominasi negara yang telah merugikan kepentingan mereka.

5.4. Ketimpangan Sumberdaya Etnis

Ketimpangan sumber daya etnis adalah bagian dari proses pembangunan yang memiliki dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat yang berada dalam bingkai negara kesatuan kesatuan Indonesia. Dengan demikian semua warga masyarakat Indonesia memiliki hak untuk bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

Secara alami, penduduk pendatang (*migrant*) adalah orang-orang yang memiliki semangat yang besar dalam memperbaiki taraf hidup mereka di tempat tujuan, sehingga persaingan dalam merebut sumber daya ekonomi yang langka telah menimbulkan

benturan dengan kelompok masyarakat lokal. Dalam interaksi sosial ini, dapat pula terjadi benturan nilai antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal, karena adanya perbedaan tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok etnis yang berbeda tersebut. Benturan nilai akan semakin kuat, jika terjadi perlakuan yang istimewa (*privileges*) terhadap penduduk pendatang.

Dari aspek politik, terdapat mobilisasi kelompok etnis untuk mendukung kepentingan elite politik yang memanfaatkan perbedaan kelompok etnis sebagai upaya untuk menguatkan identitas etnis dan batas-batas budaya yang membedakan kelompok etnis tersebut. Kondisi ini akan memperbesar jarak sosial antar kelompok etnis dan memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan konflik dan kekerasan etnis.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi dalam tiga kawasan pembangunan, yaitu kawasan pembangunan utara yang berpusat di Das Seruyan, bagian tengah berpusat di Das Mentaya dan Bagian Selatan Di DAS Katingan. Dari ketiga kawasan pembangunan tersebut sejumlah 50% penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur berada di DAS Mentaya dengan pusat pertumbuhan di Kota Sampit. Di Kota Sampit ini, terdapat 60% etnis Madura, Banjar 20%, Dayak 10% dan Jawa 10 %.

Dilihat dari usaha penduduk di Kota Sampit, penduduk etnis Madura mendominasi sektor perekonomian kota Sampit dengan menguasai usaha perdagangan sayur, buah, daging (55 %); buruh pelabuhan, jalan dan bangunan (80 %); tukang becak, ojek (80 %); kontraktor (50 %); angkutan darat dan sungai, masing-masing 55 % dan 75 %. Penduduk etnis lainnya seperti etnis Banjar lebih banyak pada usaha pedagang sembako dan rumah makan; etnis Jawa tersebar dalam semua usaha; dan etnis Dayak lebih banyak sebagai pegawai negeri (65 %).

Penyebaran sumberdaya etnis dari aspek politik memperlihatkan bahwa pada pemilu periode 1999-2004 terjadi peningkatan jumlah etnis Banjar yang duduk sebagai anggota DPRD kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu dari 4 orang pada periode 1994-1999 menjadi 12 orang. Sedangkan untuk etnis Dayak kristen turun dari 14 orang menjadi 9 orang dan etnis Madura telah berhasil menempatkan 4 orang sebagai anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin pada pemilihan tahun 1999-2004. Secara umum, DPRD kabupaten Kotawaringin Timur dikuasai oleh kelompok pemeluk agama Islam yang berasal dari etnis Banjar dan Madura.

Pada pemilihan tahun 1999-2004 tersebut, warga etnis Madura tersebar dalam organisasi politik PPP dan PKB. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Tengah, jumlah perolehan suara untuk PKB di kabupaten Kotawaringin Timur adalah yang terbesar (16.949), Kotawaringin Barat (8.639), Kapuas (11.910), Barito Utara (3.340), Barito Selatan (3.995) dan Palangka Raya (4.049), dan perolehan suara untuk PPP terdapat dua kabupaten yang memperoleh jumlah terbesar, yaitu Kabupaten Kapuas (34.210) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (24.888).

Massa dari etnis Madura yang besar di Sampit, merupakan potensi yang besar untuk mendukung kepentingan para elite politik. Oleh karena itu, kelompok Madura termasuk kelompok yang mendapat perlakuan istimewa oleh para elit politik lokal. Sebaliknya, bagi kelompok elite Dayak yang berseberangan dengan politik aliran menjadikan kekuatan massa etnis Madura sebagai ancaman yang akan memperbesar kelompok aliran Islam menguasai arena politik di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan demikian, konflik etnis di Sampit merupakan kontribusi dari pertikaian elite politik di tingkat lokal yang memanfaatkan kelompok etnis Madura dan etnis Dayak sebagai massa pendukung kepentingan politik bagi para elite politik lokal

Proposisi 4

Konflik kepentingan para elite politik telah mendorong terjadinya konflik etnis di Sampit, dengan memobilisasi kelompok etnis Madura sebagai kekuatan massa politik yang dihadapkan dengan massa etnis Dayak untuk melakukan perubahan terhadap struktur kepemimpinan.

5.5. Batas-batas Budaya dan Menguatnya Identitas Etnis

Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan selalu dihadapkan pada perubahan nilai, dalam wujud integrasi nilai moderen dengan nilai tradisional sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Dapat pula terjadi pemaksaan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan respon dan perlawanan dari masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia yang pluralis, maka interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak harus menyamakan nilai budaya yang berbeda, tetapi dibutuhkan konformitas dari kelompok etnis yang berbeda tersebut untuk memelihara keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi dalam masyarakat yang dinamik, konformitas tersebut tidak mutlak harus ada, sehingga yang dibutuhkan adalah adanya kesadaran terhadap perbedaan tersebut.

Munculnya batas-batas budaya (*cultural boundaries*) dan identitas etnis ini adalah akibat lunturnya nilai budaya yang merupakan nilai yang menjadi sumber integrasi masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Tekanan ekonomi yang dialami oleh suatu kelompok etnis yang menimbulkan kesenjangan sosial, telah mendorong

munculnya solidaritas kelompok etnis yang memperkuat identitas etnis dan menciptakan batas-batas budaya dalam interaksinya dengan kelompok etnis lainnya.

Tekanan ekonomi yang secara struktural dialami oleh suatu kelompok etnis, berhimpit dengan perbedaan kesejahteraan antar kelompok etnis, akan semakin memperkuat identitas etnis dan batas-batas budaya yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan etnis.

Bagi orang Dayak, upacara *tiwah* merupakan upacara yang dianggap sangat sakral dan berfungsi sebagai institusi yang menanamkan nilai *belum bahadat* dalam kehidupan masyarakat. Kesakralan upacara *tiwah* ini terletak pada proses penghantaran roh orang yang sudah mati ke *lewu tatau (surga)* sebagai kesempurnaan kehidupan di dunia.

Pada upacara ritual tersebut terdapat sistem pewarisan kepemimpinan dari *Basir Upu (pimpinan upacara)* kepada dua orang *Basir Pangapit (pendamping)* yang berfungsi untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh *Basir Upu*. Melalui proses yang berulang-ulang pada setiap upacara ritual *tiwah*, terjadilah pewarisan kepemimpinan. Pada saat itu, berlangsung pula proses penanaman nilai *belum bahadat*, *laluhan (gotong royong yang bersifat timbal balik)*, dan *pali (pantangan)*. *Pali* yang tidak boleh dilakukan seperti perkelahian pada saat berlangsungnya upacara *tiwah*. Perkelahian itu dianggap sebagai *pali*, karena akan mengganggu kehidupan masyarakat Dayak pada masa yang akan datang.

Di samping itu, kehidupan orang yang sudah meninggal tercermin pula pada perangkat *tiwah* seperti tiang *sandung (tempat penyimpanan tulang belulang)* yang menggambarkan bahwa kematian wajar dengan tiang empat dan yang tidak wajar dengan tiang satu, misalnya karena perkelahian yang mengeluarkan darah. Di sekitar

sandung terdapat pula patung-patung yang menggambarkan kehidupannya di dunia, misalnya patung dengan lidah yang menjulur menggambarkan bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan semasa hidupnya dengan hal tersebut.

Gambaran mengenai kehidupan masyarakat Dayak tersebut memperlihatkan bahwa upacara *tiwah* sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Dayak, khususnya keberlangsungan sosialisasi dan penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang mempertahankan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menunjukkan berkurangnya kegiatan ritual *tiwah* yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan politik yang dialami oleh masyarakat Dayak, sehingga sangat mengganggu proses pewarisan nilai-nilai yang dilakukan secara lisan dan proses penanaman nilai-nilai yang bersifat integrasi dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Melemahnya nilai-nilai yang berfungsi mengintegrasikan masyarakat berpotensi menimbulkan konflik etnis di Sampit. Sebaliknya, tekanan ekonomi dan politik yang menyebabkan berkurangnya penyelenggaraan upacara *tiwah* oleh masyarakat Dayak, telah mendorong menguatnya solidaritas dan berkembangnya identitas Dayak (*Dayak Identity*) sebagai bentuk penyesuaian mereka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang dianggap merugikan mereka.

Gambaran mengenai kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Dayak di atas, menunjukkan bahwa *pertama*, dalam mitologi Dayak terdapat nilai-nilai yang mengintergrasikan masyarakat Dayak yang berbeda agama, etnis dan komunitas, maupun terhadap penduduk pendatang dalam budaya *betang* atau kehidupan warga *betang*. Sebagai warga *betang*, maka berlaku aturan *belum bahadat* (*hidup mengikuti aturan adat setempat*) yang memberikan penghormatan terhadap hubungan antar

manusia dan hubungan dengan alam. Dalam hal ini, tanah, sungai, dan hutan bukan hanya sebagai sumberdaya yang akan memberikan kesejahteraan, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual yang dianggap sebagai sesuatu yang suci atau sakral bagi masyarakat Dayak.

Kedua, kebijakan-kebijakan pembangunan dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat Dayak, telah menciptakan kesenjangan ekonomi dan politik yang mendorong munculnya kesadaran kolektif (*collective conscieousness*) masyarakat Dayak untuk melakukan perlawanan terhadap tekanan ekonomi dan politik yang memarginalisasikan mereka. Keadaan ini menyebabkan tatanan sosial yang diwarnai dengan kegiatan ritual telah jarang mereka lakukan, seperti upacara *tiwah*. Kondisi ini menyebabkan keterputusan sejarah (*historical discontinue*), karena alat untuk memelihara proses integrasi telah kehilangan makna dan tidak mampu lagi dijadikan sebagai perekat sosial. Selain itu, hubungan sosial telah berubah menjadi hubungan yang menonjolkan kebendaan *reifikasi* yang selalu mempertimbangkan untung dan rugi dan sangat bertentangan dengan prinsip orang Dayak yang lebih menonjolkan dasar-dasar kesamaan (*equity*) dan kebersamaan (*inclusive*).

Gambaran historis yang dialami oleh warga masyarakat Dayak tersebut, menjelaskan bahwa nilai budaya *tiwah* merupakan nilai yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan warga masyarakat Dayak. Sedangkan upacara *tiwah* itu sendiri berfungsi sebagai institusi tempat menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai budaya Dayak, sehingga proses integrasi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat Dayak dihadapkan pada pengaruh dari luar, berupa tekanan-tekanan ekonomi dan politik yang menyebabkan berkurangnya upacara *tiwah* tersebut diselenggarakan.

Kondisi di atas, pada satu sisi menimbulkan solidaritas orang-orang Dayak, pada sisi lain telah mendorong menguatnya identitas Dayak. Dengan demikian, maka dampak yang dialami oleh masyarakat Dayak adalah meningkatnya intensitas kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpotensi menciptakan konflik.

Proposisi 5

Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang berhimpit dengan kesenjangan sosial yang dialami oleh kelompok etnik Dayak, telah memperkuat batas-batas budaya dan identitas etnis. Kondisi ini yang berpotensi menciptakan terjadinya konflik.

5.6. Intensitas Konflik dan Kekerasan

Merujuk pada respon dari kelompok etnis Dayak dan Madura atas konflik dan kekerasan etnis di Sampit, terdapat beberapa penyebab terjadinya konflik dan kekerasan tersebut, yaitu : *Pertama*, hubungan antar etnis antara orang Dayak dan Madura telah merenggang akibat pengalaman konflik masa lalu yang tidak diselesaikan secara hukum formal dan pelanggaran terhadap perdamaian yang dilakukan secara adat. Merenggangnya hubungan tersebut telah meningkat menjadi permusuhan pada waktu terjadinya konflik individu antara orang Dayak dan Madura pada akhir Desember 1999 yang melibatkan organisasi masing-masing kelompok etnis dengan menguatkan identitas etnis. *Kedua*, tidak adanya pengakuan atas terjadinya konflik pada Desember 2000 dan masing-masing kelompok etnik mencari pembenaran terhadap konflik tersebut. Kelompok etnis Madura menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dan kelompok etnik Dayak menyatakan bahwa konflik tersebut telah melanggar jati diri orang Dayak. *Ketiga*, intensitas konflik tersebut semakin

meningkat, akibat adanya kesenjangan sosial dan perlakuan istimewa terhadap kelompok etnik Madura oleh para elite politik. Pada sisi lain, tekanan ekonomi dan politik yang dialami oleh orang Dayak telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan terhadap negara. *Keempat*, meningkatnya intensitas konflik akibat adanya mobilisasi kepentingan para elite politik dan meledaknya kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap negara karena munculnya kesadaran bersama mengenai marginalisasi dan isolasi politik yang mereka alami, telah mendorong terjadinya konflik etnis menjadi kekerasan kolektif. *Kelima*, tidak adanya pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediasi atau arbitrase yang berfungsi menjembatani kepentingan dan perbedaan-perbedaan dari kedua kelompok etnik yang bertikai.

Berdasarkan respon dari kelompok etnis Dayak dan Madura atas terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit di atas, dapat disusun suatu proposisi umum yang merupakan gabungan dari beberapa proposisi sebelumnya.

Proposisi 6

Lemahnya organisasi pengaturan konflik dan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah serta adanya perlakuan yang istimewa kepada kelompok etnik lainnya, dapat meningkatkan intensitas konflik dan tindakan kekerasan.



BOB VI

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

TEORITIK

BAB VI SIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

6.1. Simpulan

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan telah menimbulkan dinamika kehidupan masyarakat dalam memperebutkan sumber daya yang langka. Interaksi antar kelompok masyarakat dalam ranah Publik ini dapat menciptakan konflik jika terjadi kesenjangan sosial sebagai akibat perbedaan kemampuan dan kesempatan dalam memperoleh sumber daya tersebut. Konflik dan perubahan tersebut merupakan sesuatu yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat, namun yang terpenting adalah upaya untuk melakukan pengaturan konflik (*conflict regulation*) sehingga tidak menjadi intens dan menimbulkan tindakan kekerasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat dapat menciptakan integrasi dengan cara yang bersifat memaksa (*imperatively coordinated association*) sehingga memberikan batas yang jelas antara kelompok dominan karena memiliki kewenangan (*authority*) yang bersifat mempertahankan terpeliharanya integrasi (*status quo*) dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki kewenangan (*subjection*) untuk melakukan perubahan terhadap kondisi sosial yang telah dirampas oleh penguasa.

Aliansi antara negara dengan pengusaha untuk memperbesar pendapatan melalui eksploitasi sumber daya hutan, telah merugikan masyarakat akibat hilangnya sumber mata pencaharian, pelanggaran terhadap tanah-tanah adat dan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat serta dampak lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Pada sisi masyarakat yang merasa dirugikan, terbentuk pula kelompok kepentingan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi yang mereka alami tersebut.

Kedua kelompok kepentingan yang berbeda tersebut, dapat menciptakan kelompok kepentingan karena terpenuhinya kondisi organisasi yang meliputi : kondisi teknis, yaitu adanya pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpendam; kondisi politik, adanya kebebasan secara politis untuk

mendiskusikan kepentingan kelompok; dan kondisi sosial, yaitu adanya kesempatan bagi kelompok masyarakat untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka tersebut.

Intensitas konflik dan kekerasan yang terjadi adalah akibat meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah; lemahnya kondisi organisasi meliputi kondisi teknik, politik dan sosial; dan tidak adanya pengaturan konflik oleh pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediasi atau arbitrase untuk menjembatani kepentingan kelompok masyarakat yang berbeda tersebut.

6.2. Temuan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Struktural atas Konflik dan Kekerasan etnis di Sampit telah menghasilkan temuan penting. *Pertama*, dalam proses terjadinya konflik, meningkatnya intensitas konflik etnis adalah akibat lemahnya kondisi organisasi, meliputi : tidak adanya pengakuan mengenai adanya konflik etnis di Sampit (*technical condition*), lemahnya kemampuan tokoh masyarakat untuk mengembangkan kesepakatan dalam mengendalikan konflik (*political condition*) dan tidak tersedianya ruang dialog untuk menyampaikan kepentingan dan permasalahan dari kedua etnis yang bertikai (*social condition*).

Kedua, ketimpangan pembangunan merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai keberhasilan pembangunan. Kebijakan pembangunan tersebut cenderung melakukan eksploitasi sumberdaya alam sebagai upaya untuk memperbesar pendapatan daerah melalui kerjasama dengan para investor yang berorientasi pada produksi dan pemupukan modal. Akibatnya terjadi penguasaan sumberdaya alam oleh pemilik modal yang berfungsi sebagai informal politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah.

Kesenjangan sosial tersebut adalah konsekuensi dari kebijakan model pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang menciptakan ketergantungan pemerintah dengan pemilik modal. Kondisi ini melemahkan peran

pemerintah atau negara untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah harus berani keluar dari ketergantungan dan aliansinya dengan pengusaha dan mendorong pengusaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dengan melakukan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Ketiga, dominasi peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat telah mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan pengusaha. Akibatnya terjadi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap kepunahan flora dan fauna; pelanggaran terhadap hak-hak adat masyarakat atas tanah dan menghilangkan sumber pendapatan masyarakat yang bersumber dari lingkungan hutan tersebut.

Hubungan antara negara dengan pengusaha ini telah mengabaikan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang seharusnya juga sebagai penerima manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Karena itu dominasi negara ini akan mendorong munculnya gerakan-gerakan sosial untuk melakukan perubahan terhadap sistem yang membelenggu kehidupan mereka. Oleh karena itu, upaya untuk mengamankan investasi dan hasil-hasil pembangunan, negara melalui militer melakukan pengamanan dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

Keempat, tekanan-tekanan ekonomi dan politik terhadap kelompok masyarakat telah menimbulkan kesadaran yang mendorong munculnya solidaritas etnis yang dibangun dengan atribut-atribut budaya untuk melakukan perlawanan terhadap keadaan yang merugikan kelompok mereka tersebut. Proses transformasi untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang membelenggu kehidupan mereka dapat berimplikasi

pada konflik etnis ketika identitas kelompok etnis yang dibangun terus disosialisasikan dan ditanamkan sebagai batas-batas budaya yang memperbesar jarak sosial dengan kelompok etnis lainnya.

Kelima, ketimpangan sumberdaya etnis akan memperbesar ruang bagi kelompok etnis yang diuntungkan untuk memperluas pengaruhnya melalui kerasama dengan elite politik sehingga mereka mendapat perlakuan istimewa (*priviledge*). Sebaliknya kelompok etnis yang merasa dirugikan akan memperkuat identitas kelompok etnis untuk melakukan perlawanan terhadap sistem yang merugikan mereka. Identitas kelompok etnis yang dirugikan sangat rentan terhadap mobilisasi kelompok kepentingan sehingga kondisi seperti ini sangat berpotensi menimbulkan konflik etnis.

Keenam, lemahnya organisasi pengaturan konflik dan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah serta adanya perlakuan yang istimewa kepada kelompok etnik lainnya, dapat meningkatkan intensitas konflik dan tindakan kekerasan.

6.3. Implikasi Teoritik

Pembangunan sebagai sebuah proses perubahan telah mendorong terjadinya polarisasi dalam kehidupan masyarakat. Polarisasi tersebut terjadi dalam interaksi sosial, baik secara vertikal antara masyarakat dengan negara, maupun secara horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda etnis, agama dan budaya.

Dalam hubungan antara kelompok masyarakat dengan negara, terdapat kecenderungan dominasi negara dan memaksakan kepentingan terhadap masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan sosial akibat distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Dahrendorf bahwa negara sebagai lembaga yang bersifat memaksa (*imperatively coordinated association*) terhadap masyarakat sebagai kelompok subordinat. Unsur pemaksaan tersebut dilakukan melalui

kebijakan yang merugikan masyarakat, maupun upaya untuk mempertahankan integrasi sosial melalui kekuatan militer. Oleh karena itu, konflik dan kekerasan tersebut selalu hadir dalam kehidupan masyarakat, akibat adanya respon dan perlawanan masyarakat terhadap kebijakan negara tersebut. Namun hasil penelitian ini juga memperlihatkan dinamika struktur akibat adanya dialektika antara aktor dalam struktur. Dinamika struktur ini telah melahirkan transformasi sosial yang digerakan oleh aktor yang berada dalam organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan gabungan teori konflik dari Coser dan Dahrendorf, hasil penelitian ini membuktikan tiga proposisi yang ditawarkan memperlihatkan hubungan yang positif atas terjadinya tindakan kekerasan dalam konflik etnis di Sampit.

Proposisi pertama, para aktor tidak berupaya untuk mencari jalan damai bagi kelompok etnis yang bertikai (*technical condition*), tetapi sebaliknya memperkuat identitas etnis yang memperbesar jarak sosial. Para aktor politik maupun organisasi kemasyarakatan cenderung mencari kesalahan dari masing-masing kelompok etnis dari pada berupaya melakukan reorganisasi dalam mengatur sumberdaya yang langka (*political condition*) Demikian juga dengan tindakan yang seharusnya menampung keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat (*social condition*), tetapi secara faktual berupaya untuk memperkuat organisasi dengan terus menanamkan batas-batas budaya pada masing-masing kelompok etnis.

Proposisi kedua, akar permasalahan bukan terletak pada hubungan antar etnis yang berbeda, tetapi perbedaan yang diciptakan oleh negara sehingga menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang membedakan antara kelompok etnis, bahkan memberikan perlakuan istimewa kepada suatu kelompok etnis karena adanya kepentingan politik. Dengan kata lain terjadi kegagalan dalam menafsirkan kepentingan

masyarakat. Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh aparat penegak hukum akan berkembang menjadi konflik terbuka.

Proposisi ketiga, pemerintah daerah tidak memiliki aturan formal dalam menangani konflik yang terjadi dalam masyarakat, karena peraturan daerah mengenai penanganan konflik baru dibuat setelah terjadinya konflik dan kekerasan etnis di Sampit.

Kesenjangan sosial tersebut dapat pula menimbulkan konflik horizontal antar kelompok etnis yang berbeda, baik sebagai akibat adanya perlakuan istimewa terhadap suatu kelompok etnis, maupun akibat mobilisasi kelompok etnis yang dilakukan oleh elite sebagai kelompok kepentingan. Fakta yang terjadi adalah faktor primordialisme seperti agama, etnis dan budaya yang membedakan suatu kelompok masyarakat, berhimpit dengan tekanan-tekanan ekonomi dan politik yang mereka alami berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan etnis.

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Ted Gurr (1970) yang menempatkan negara secara legal melakukan tindakan kekerasan melalui kebijakan dan tindakan pengamanan dengan menggunakan kekuatan militer. Sebaliknya tindakan kekerasan dilakukan pula oleh kelompok masyarakat akibat kekecewaannya terhadap pemerintah. Kekecewaan dan kemarahan masyarakat tersebut bersumber dari besarnya harapan terhadap barang-barang kebutuhan hidup, seperti tanah dan sumberdaya alam untuk memenuhi kehidupan mereka dan bersamaan dengan menurunnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan harapan tersebut akibat tekanan negara melalui kekuatan militer. Kondisi ini merupakan pencetus (*impetus*) terjadinya konflik dan

kekerasan etnis, karena orang-orang yang berada dalam kekecewaan dan kemarahan sangat mudah dimobilisasi untuk mendorong terjadinya konflik dan kekerasan.

Pada tataran elite terjadi mobilisasi terhadap kelompok etnis yang merasa dirugikan oleh proses pembangunan atau tersingkir akibat persaingannya dengan kelompok etnis lainnya. Mobilisasi ini biasanya memanfaatkan identitas kelompok etnis untuk merasionalkan kepentingan elite (*plausible*) sehingga mudah diterima oleh kelompok etnis tersebut. Dalam konteks ini, konflik etnis akan terjadi seperti rumput kering yang siap terbakar. Konsep pemikiran Gurr ini memperjelas keterlibatan negara dalam melakukan konstruksi tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

Merujuk pada pemikiran Bart (1998), maka identitas etnis sangat tergantung dengan dinamika suatu kelompok etnis dalam interaksinya dengan dunia luar. Hasil interaksi ini dapat memperkuat identitas etnis yang disosialisasikan sebagai batas-batas budaya yang membedakan suatu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya. Perbedaan inilah yang berpotensi menimbulkan konflik ketika adanya ancaman terhadap suatu kelompok etnis.

Pemikiran Bart ini memiliki relevansi dengan pendapat Usman Pelly (1999:28) yang menyebutkan bahwa kondisi yang terjadi bukan karena kelompok etnis tertentu ingin kembali menegakkan superioritas etnis (*ethnocentrism*) dalam pengertian yang sempit (*return to the tribe or the particular culture*), atau memisahkan dari kehidupan masyarakat majemuk (*separatism*). Akan tetapi kekerasan itu merupakan suatu protes budaya terhadap ketidakadilan, kecurangan dan penindasan yang diderita oleh kelompok - kelompok etnis tertentu.

Penguatan identitas etnis ini disebut pula oleh Manual Castel sebagai identitas kolektif. Menurut Castell (1997) identitas kolektif ini merupakan upaya merespons

permasalahan yang dihadapi bersama, identitas kolektif ini dapat menjadi resistansi identitas, yaitu identitas etnis, agama dan komunitas yang dikonstruksikan dalam bentuk perlawanan kolektif terhadap dominasi kelompok dari luar (*out group*), ketidakadilan (*injustice*) dan ancaman terhadap eksistensi kelompok. Biasanya dasar pembentukan identitas ini diambil dari sejarah, geografi atau biologi yang sangat memudahkan untuk memberikan batas - batas etnis.

Terhadap kondisi ini, Alqadrie (1999) menyebutkan sebagai kesadaran etnis (*ethnic conciousness*) dan solidaritas etnis (*ethnically based solidarity*) untuk melakukan reaksi spontan terhadap kondisi keterpurukan dan keterpinggiran kelompok etnis setempat. Kondisi itu terjadi tidak saja melalui dominasi dan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam yang membuat mereka menjadi penonton, tetapi juga melalui pengusuran, pemerasan dan pengambilalihan kepemilikan alat - alat produksi dengan cara intimidasi oleh sekumpulan anggota kelompok etnis pendatang atau kelompok kepentingan lainnya.

Implikasi teoritis yang dibangun dengan menggunakan teori konflik dari Dahrendorf dan Coser dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Pertama, penguasaan sumberdaya etnis oleh kelompok etnis tertentu merupakan sumber ketidakadilan yang akan mengganggu hubungan dengan kelompok etnis yang merasa paling dirugikan. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa permusuhan mendorong munculnya penguatan identitas etnis sebagai suatu bentuk respon terhadap ketidakadilan tersebut. Kekuatan dari teori konflik tersebut terletak pada pandangan mereka yang melihat konflik sebagai perubahan yang akan memperjelas batas-batas budaya dari kedua etnis yang bertikai sehingga konflik akan memperbaiki sistem integrasi dalam

kehidupan masyarakat yang dinamik. Sementara Bart, Castel dan Pelly hanya memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab munculnya konflik etnis.

Kedua, adanya penggalan sejarah mengenai nilai-nilai budaya yang memiliki nilai integratif dalam kehidupan masyarakat untuk memahami dinamika struktur, yaitu hubungan antara aktor dengan struktur yang membentuk kehidupan masyarakat tersebut. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, maka nilai budaya yang berfungsi integratif dapat mengalami degradasi nilai akibat tekanan-tekanan ekonomi dan politik, sehingga muncul perlawanan suatu masyarakat dengan mengembangkan atribut-atribut budaya yang mereka miliki sebagai suatu bentuk penyesuaian diri dengan kondisi yang sedang mereka alami.

Hasil penelitian ini memberikan penguatan kepada teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, bahwa harmonisasi dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dilihat sebagai suatu masyarakat yang statis, tetapi harus pula dilihat dalam kehidupan masyarakat yang dinamik untuk melakukan perubahan terhadap sistem yang membelenggu kehidupan mereka.

Ketiga, transformasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan refleksi dari pengalaman sejarah suatu masyarakat ketika mereka merespon masalah-masalah yang dihadapi. Rangkaian pengalaman sejarah ini membentuk suatu kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang berlanjut dengan munculnya suatu gerakan untuk melakukan perubahan terhadap tekanan ekonomi dan politik yang dialami oleh suatu masyarakat dengan memberikan penguatan dan penyesuaian terhadap nilai-nilai budaya etnis untuk melakukan suatu perlawanan. Hasil penelitian ini memperkuat pendapat Castel dan Alqadri mengenai munculnya kesadaran dari masyarakat yang

tertindas untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi pihak-pihak yang telah merugikan mereka.

6.4. Kontribusi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pada tataran teoritis, penelitian ini telah melakukan verifikasi terhadap pemikiran Ritzer yang menyebutkan bahwa pendekatan struktural bukan hanya melihat dari segi negara, kelembagaan, kelompok masyarakat dan pengaruhnya terhadap pemikiran individu dan aksi individu, tetapi juga memahami (*understanding*) historis dan dinamika struktur yang digerakkan oleh aktor dalam struktur. Pemikiran ini menempatkan suatu pertemuan antara pendekatan makro-obyektif dengan makro subyektif yang dapat ditelaah melalui pendekatan dialogis untuk memahami dialektika aktor dalam struktur, sehingga teori yang dihasilkan berada pada tataran metateori.

Pada tataran makro-obyektif telah diperlihatkan bahwa sosialisasi dan penanaman nilai-nilai dan norma-norma tidak selalu mendorong ke arah integrasi, karena adanya kepentingan untuk melawan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti dominasi kepentingan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kondisi ini bukan melahirkan bentuk penyesuaian yang bersifat integratif, tetapi sebaliknya mendorong ke arah perlawanan masyarakat melalui kelembagaan sosial setempat.

Konsep di atas, dapat dilihat dari kebijakan negara yang memberikan konsesi hutan kepada pengusaha HPH untuk melakukan eksploitasi sumberdaya hutan dan model pembangunan perwilayahan yang telah menciptakan kesenjangan sosial terhadap masyarakat Dayak. Kondisi kesenjangan sosial ini telah mendorong menguatnya solidaritas Dayak yang diwujudkan melalui lahirnya Lembaga Musyawarah Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT) sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat dan melakukan respon terhadap masalah yang sedang dihadapi.

Penjelasan pada tataran Makro-subyektif dapat dilihat dari proses transformasi yang dilakukan oleh LMMDD-KT sebagai salahsatu kelembagaan etnis lokal. Hadirnya kelembagaan etnis lokal tersebut merupakan refleksi dari pengalaman historis yang dilakukan oleh kelembagaan masyarakat sebelumnya, sehingga rangkaian tindakan yang dilakukan tersebut merupakan sebuah proses perubahan yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dalam dinamika pembangunan.

6.5. Penelitian Lanjutan

Penelitian mengenai konflik etnis di Sampit ini, memperlihatkan adanya dinamika struktur yang dilakukan oleh aktor untuk melakukan perubahan terhadap struktur yang dianggap telah membelenggu kehidupan orang-orang Dayak. Dalam hal ini muncul kesadaran masyarakat untuk memberi respons dan perlawanan terhadap tekanan-tekanan ekonomi dan politik yang datangnya dari luar komunitas Dayak, maupun sebagai tanggung jawab moral untuk memulihkan ketertiban sosial pada masa pasca konflik melalui proses rekonsiliasi dengan fokus pada integrasi sosial yang menempatkan budaya Dayak sebagai tuan rumah (*host*) menjadi rujukan dalam proses integrasi sosial tersebut. Berkaitan dengan integrasi sosial ini, perlu adanya penelitian lanjutan mengenai proses rekonsiliasi yang merupakan bagian dari integrasi nasional yang telah mengalami masa surut ketika bangsa Indonesia digoncang oleh krisis ekonomi dan politik yang berdampak terhadap disintegrasi bangsa.

6.6. Keterbatasan Studi

Selama penelitian dilakukan, subjek dari orang Dayak masih dalam kondisi emosional, ketika berbicara mengenai konflik etnis di Sampit. Kondisi ini harus

dikendalikan untuk menghindari terjadinya bias Dayak, karena dalam penelitian ini di samping wawancara menggunakan angket, peneliti juga berperan sebagai instrumen dalam melakukan dialog dengan subjek untuk melihat dinamika struktur yang digerakkan oleh aktor dalam melakukan perubahan terhadap struktur.

Dari sisi orang Madura, sangat sulit mendapatkan informasi mengenai konflik etnis di Sampit, karena mereka pada umumnya sangat khawatir terhadap terjadinya salah pengertian dengan orang-orang Dayak, sehingga akan mengganggu keamanan mereka di Sampit.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan (2001). Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan Indonesia : Kebijakan Negara dalam Pemecahan Masalah Konflik Etnis. *Antropologi Indonesia*, Vol.25, No.66
- Abdurahman (2002). Lembaga Kadamangan Di Kalimantan Tengah. *Mubes Damang Kepala Adat. Palangka Raya, 22-23 Juni*.
- Alawi, Ade, dkk (2001), *Kabar dari Poso, Menggagas Jurnalisme Damai*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim (2002). Pola Pertikaian Etnis Di Kalimantan Barat dan Faktor-faktor Sosial , Budaya, Ekonomi dan Politik yang Mempengaruhinya. *Percik, Seminar Internasional. Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Salatiga 9 – 12 Juli
- (1999). Konflik di Ambon dan Sambas. Suatu Tinjauan Sosiologis. *Antropologi Indonesia*, Th.XXIII No.58.
- Alvesson, Mats dan Skoldberg, Kaj (2000), *Reflexive Methodology, New Vistas for Qualitative Research*, Landon : Sage Publications.
- Anwar, Wahyudi (2002). *Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Yogyakarta : BP Arupa.
- (2006). Kotawaringin Timur Sebagai Pintu Gerbang Kalteng, *Seminar Sehari, Politik Lokal dan Demokratisasi dalam Pembangunan Kalimantan Tengah*, 30 Januari 2006.
- Assegaf, N (2001) The Role of Attitude and Communication in Ethno-religious Conflict In Indonesia Today. *The International Workshop On Ethno-Religious Conflict In Indonesia Today*. Jakarta 25-27 September.
- Arman, Samsuni (2003) Reinterpretasi dan Reposisi Adat dalam Rangka Pemanfaatan Sumberdaya Hutan. *Prakonggres Kebudayaan Ke lima*. Bali, 27-30 April
- Barth, Frederik (1998), *Ethnic Groups and Boundaries The Social Organization of Culture Difference*. Illinois : Waveland Press. Inc.
- , (2000), Boundaries and Connection (dalam Anthony Cohen) *Signifying Identities. Anthropological Perspectif on Boundaries and Contested Value*. London and Newyork : Roudledge.
- Castells, Manuel (1997), *The Power of Identity*. Massachusetts : Blackwell Publishers Inc.

- Chaniago, Andrinof(2001). *Gagalnya Pembangunan. Kajian Ekonomi Politik terhadap krisis Indonesia*. Jakarta : LP3 ES
- Cohen, Anthony (2000). *Signifying Identities. Anthropological Perspektif on Boundaries and Contested Values*. London and Newyork : Roudledge.
- Conway, George and Kiski Nozomi (2001). *Conflict Risk Assessment Report : Cambodia, Indonesia, Philippines*. Country Indicators Foreign Policy (CIFP) Project, Carleton University.
- Cosson, Anne (2001). *Decentralisation of Policies Affecting Forest and Estate Crops in Kotawaringin Timur Ditriect*. Bogor : Center for International Forestry Research.
- Crawford, Beverly, (1998), *The Mith of "Ethnic Conflict" : Politics, Economics and Cultural Violence*. Berkeley : University of California.
- Collin, Finn (1997). *Social Reality*. London and New York ; Routledge.
- Coser, Lewis (1964) *The Functions of Social Conflict*. New York : The Free Press.
- Dahrendorf, Ralf (1957). *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford : Stanford University Press.
- Dean, Michel (2001). Michel Focault : A Man In Danger (dalam Ritzer dan Smart) *Handbooks of Social Theory*. London : Sage Publicantions Ltd.
- Delanty, Gerard (1999). *Social Theory in a Change of Modernity*. Cambridge : Polity Press.
- Diamond, L dan Plattner, MF (1994). *Nationalism, Ethnic Conflict and Democracy*. London : The John Hopkins University Press.
- Denzin Norman K dan Lincoln S.Yvonna (1994) *Handbook of Qualitative Research*. London : Sage Publications
- Feagin (1996). *Radical and Ethnic Relations*, New Jersey : Printice Hall
- Galtung, Johan (1999), Cultural Violence, dalam Steger dan Lind, *Violence and its Alternatives an Inter Disciplinary Reader*, New York : St. Martin's Press.
- Geertz, Clifford (1992), *Tafsir Kebudayaan (terj. F.B. Hardiman)*, Yogyakarta : Kanasius.
- Gidden,Anthony (1984), *The Constitution of Society : outline of The Theory of Structuration*. Berkeley : University of California.

- Grillo, Ralph (1998), *Pluralism and the Political of Difference*. New York : Oxford University Press Inc.
- Gurr, Ted Robert (1970), *Why Men Rebel*, New Jersey : Princenton University Press
- (1995), *Minorities At Risk : A Global Ethnopolitical Conflict*, Washington : Institute of Peace Press.
- Human Rights Watch (1998), *Konflik Etnis Di Kalimantan Barat* (terjemahan Herlan Artono). Jakarta: Institusi Studi Arus Informasi.
- Jenkins, Richard (1997). *Rethinking Ethnicity, Arguments and Explorations*. London : Sage Publications.
- Kartodirdjo, Sartono (1984), *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Liem, Yusiu (2001), *Prasangka Terhadap Etnis Cina*, Jakarta : Djambatan.
- Lingu, Amu Lanu A (2001), *Majelis Adat Dayak Kalteng, Menjawab Tantangan Terjadinya Kerusuhan Di Kalimantan Tengah*. Palangka Raya : Pusat Penelitian Kebudayaan Dayak Unpar.
- Mallinckrodt (1984), *Gerakan Nyuli Di Kalangan Suku Dayak Lawangan*. Jakarta : Bharata
- Marzali, Amri (2001), "Kekerasan Sosial di Kalimantan: Sebuah Analisis Antropologi Sosialkultur", *Analisis CSIS*, Tahun XXX / 2001, No. 3.
- Masoed, Mochtar (2002), *Kekerasan Kolektif. Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta: P3PK UGM.
- Maunati, Yekti (2004) *Identitas Dayak, Komodifikasi dan politik Kebudayaan*. Yogyakarta : LKiS
- Nitibaskara, (2000), Etnografi Kekerasan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol.2, No. 1.
- Nordholt, Henk Schultc (2000). Geneologi Kekerasan. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol2, No 1
- O'Donnell, Guilermo dan Schmitter, Philippe C. (1995). Transsition From Authoritarian Rule : Tentative Conclusions About Uncertain Democracies, dalam NilJ.Kritz (ed). *Tansitional Justice*. Washington : United States Institute of Peace Press.
- O'Donnel,Guillermo,A(1979). Modernization and Bureucratic Authoritarian: Studi in South American politics (dalam R.William Liddle dan Sjaifrul Mujadi,2000), Islam,Kultur Politik,dan Demokrasi. *Jurnal Demokrasi dan HAM*. Vol.1 No.1.

- Pattiselanno, J.Th.F (1999). Tradisi Uli, Pela dan Gandong pada Masyarakat Seram, Ambon dan Uliase. *Antropologi Indonesia*, Th XXIII No.58
- Pelly, Usman (1999). Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia. Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. *Antropologi Indonesia* Thn XXIII, No 58
- (1994). *Urbanisasi dan Adaptasi Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta. LP3ES .
- Rintuh, Cornelis (2002). Modal Keluar dalam Eksploitasi Kayu dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Rakyat. *Mubes Damang Kepala Adat Se Kalimantan Tengah di Palangka Raya*
- Ritzer, George (1996) *Modern Sociological Theory*. New York : The McGraw-Hill Companies, INC
- Ritzer, George dan Smart, Barry (2001) *Handbook of Social Theory*, London : Sage Publications Ltd.
- Satia, M. Riban (2001) Analisis Alternatif Kebijakan Resolusi Konflik Antara Etnik Dayak – Madura Di Sampit Kalimantan Tengah, *Thesis UGM Yogyakarta*.
- Shiller, Anne Loise (1987), *Dinamic of Death, Ritual, Identity and Religious Change Among The Kalimantan Ngaju*. New York : Cornel University.
- Smelser,Neil J.(1976). *The Theory Collective Behavior*. London : Routledge and Kegan Paul,Ltd.
- Steier, Fredrick (1991). *Research and Reflexivity*. London : SAGE Publications Ltd.
- Sudagung, Hendro Suroyo (2001), “*Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Etnis Madura ke Kalimantan Barat*”, Jakarta : Institut Studi Arus Informasi.
- Sugandi, Yulia (2002) *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praksis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suparlan, Parsudi (1999). Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan. *Antropologi Indonesia*, Thn. XXIII, No.58.
- (2001),“Keyakinan Keagamaan dalam Konflik Antar Suku Bangsa”, *Simposium Internasional Kedua, Jurnal Antropologi Indonesia*, Padang, 18- 21 Juli 2001.
- Silverman, David (1993). *Interpretating Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interation*. London : Sage Publications Ltd.
- Strauss, Alselm and Corbin Juliet (1997). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Jakarta : Pt. bina ilmu.

- Taufiq. A. Tuhana (2000). *Konflik Maluku*, Yogyakarta : Gama Global Media
- Tockary, R (2001) Short Note On Ethno-Religious Conflict In Indonesia. *The International Workshop On Ethno-Religious Conflict In Indonesia Today*. Jakarta 25-27 September 2001.
- Turner, Jonathan H (1978). *The Structure of Sociological Theory*, Homewood : Dorsey
- Usop, KMA (1994). *Pakat Dayak. Sejarah Integrasi dan Jatidir Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah*, Yayasan Pendidikan Kebudayaan Batang Garing.
- Usop, SR (2004). Reproduksi Budaya Etnis dalam Konflik dan Kekerasan Di Sampit, *Cakrawala*, Jurnal Penelitian Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. UKSW Vo.2 No. 1
- _____ (2007). *Pahewan, Kawasan Hutan Yang Dilindungi Oleh Masyarakat Adat*, Palangka Raya : LMMDD-KT dan WWF Indonesia
- Van Klinken Gerry (2002), Indonesia Ethnic Elite, (dalam Nordholt dan Abdulah, *Indonesia in Search of Transition*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Varshney, Ashutosh (2002). *Ethnic Conflict and Civil Life Hindus and Muslims in India*. New Haven & London. Yale University Press.
- Wilber, Charles K dan Jameson, Kennet P (1992), *The Political Economic of Development*, Singapura : Mc. Graw-Hill Inc.
- Wiyata, A, Latif (2002). *Carok, Konflik Kekerasan dan. Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : LKiS.

LAMPIRAN

GLOSSARY

Balian	Sebutan orang yang melaksanakan upacara adat
Baram	Arak yang dibuat dari beras ketan
Banama Hintan	Perahu yang diukir untuk mengantar sumbangan upacara tiwah
Basir Upu	Pimpinan upacara adat
Basir Pangapit	Pendamping pimpinan upacara adat
Batang Garing	Pohon Kehidupan, simbol keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan hubungan dengan sesama manusia
Bawin Tingang	Enggang Betina
Belom Bahadat	Menyesuaikan dengan adat yang berlaku dalam wilayah adat
Benteng Dereh	Tidak bisa mengembangkan potensi
Betang	Rumah panjang
Eka malan manan satiar	Wilayah tempat berusaha dengan radius 5 Km
Gamalan Nyahu	Tokoh agama
Ganan Batu	Roh yang ada dalam batu
Ganan Kayu	Roh yang ada dalam kayu
Ganan Danum	Roh yang ada dalam air
Garing Hatungku - Tungket Langit	Tiga tiang penyangga dalam kehidupan masyarakat Dayak
Gawi Belom	Upacara kehidupan
Gawi Matei	Upacara kematian
Habaring Hurung	Kebersamaan
Habunu	Saling bunuh
Hakayau	Saling potong kepala
Hadat	Beradat
Hajipen	Saling memperbudak
Hambaruan	Kekuatan/semangat
Handep	Gotong royong yang bersifat timbal balik
Hapakat	Sepakat
Hasapa	Bersumpah
Hatala	Tuhan
Indu Kacicas Harian - Andau	Mendapat kutukan pada masa yang akan datang
Jalan baputi	Jalan damai
Jalan bahandang	Jalan perang
Jipen	Budak
Jata	Penguasa dunia lapisan bawah
Kadamangan	Lembaga adat
Kalunen Harian Andau	Generasi yang akan datang
Karak Betang	Pecahan dari rumah betang
Kutak Bawi	Penuturan sifat perempuan
Kutak Hatuwe	Penuturan sifat laki-laki
Laluhan	Sumbangan pada upacara tiwah
Lewu Tatau	Surga

Liau	Roh
Liau Karahang	Roh yang melekat pada tulang
Mambaleh bunu	Membalas kematian
Manajah Antang	Meminta petunjuk kepada roh leluhur
Manakir Petak	Perang
Manyalamat Petak – Danum	Menyelamatkan tanah air
Manyalamat utus	Menyelamatkan harga diri
Mana galingah	Kemana gelindingannya/mengikuti saja
Manawur behas	Menabur beras pada upacara adat
Mangayau	Memenggal kepala
Pahewan	Hutan Keramat
Pali	Pantangan
Pakat Dayak	Kesadaran orang Dayak
Pabelom	Pedoman hidup
Pabelom Matan Andau	Mata hari terbit
Pambelep Matan andau	Mata hari tenggelam
Pampang Erang	Tokoh adat
Pamparesan Pabelum	Kutukan kehidupan
Pampang Saribu	Para cendikiawan
Peteh Tatu Hiang	Pesan Leluhur
Ranying Hatala Langit	Tuhan Penguasa Dunia lapisan atas
Sandung	Tempat penyimpanan Tulang-be;ulang orang yang sudah di tiwah
Singer	Denda
Sumpah Sarapah	Puji-pujian
Tajahan	Hutan Keramat
Tambirang Tambun	Naga
Tariau	Roh
Tatu Hiang	Leluhur
Tempon petak manana – Sare	Masyarakat marjinal
Tetek Tatum	Asal-usul
Tiwah	Upacara kematian
Tungket	Tiang Penyangga
Uluh Habasa	Bukan orang Dayak
Uluh Ngaju	Orang dari Hulu
Uluh Ngawa	Orang dari hilir
Utus Dayak	Harga diri orang Dayak